

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Banten

Agustus 2016

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten

2016

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur atas berkat dan rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih karena atas karunia-Nya, "Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Banten Triwulan II 2016 dapat diselesaikan dan dipublikasikan. Buku KEKR yang diterbitkan setiap triwulanan ini, berisi berbagai data dan informasi mengenai kondisi perekonomian Provinsi Banten terkini. Analisis dalam buku ini mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan inflasi, perbankan dan sistem pembayaran, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta prospek perekonomian ke depan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan II 2016 tumbuh 5,16% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2016 yang tercatat 5,10% (yoy). Peningkatan tersebut ditopang oleh konsumsi dan lapangan usaha perdagangan yang tumbuh lebih tinggi seiring dengan momentum Ramadhan. Sementara di sisi perkembangan harga, inflasi pada triwulan II 2016 terjaga di level 3,77% (yoy). Sementara itu, kinerja perbankan secara umum masih terjaga dengan penyaluran kredit yang tumbuh lebih tinggi.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan buku ini antara lain Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten Provinsi Banten, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, perusahaan/asosiasi di Provinsi Banten serta pihak-pihak lainnya.

Kami berharap koordinasi yang selama ini terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan. Selanjutnya kami juga mengharapkan saran dan kritik membangun untuk meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pengembangan perekonomian Provinsi Banten dan perekonomian Nasional.

Serang, 23 Agustus 2016

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BANTEN

TTD

Budiharto Setyawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
TABEL INDIKATOR EKONOMI.....	5
TABEL INDIKATOR PERBANKAN.....	6
TABEL INDIKATOR SISTEM PEMBAYARAN.....	6
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	7
BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH.....	9
1.1. SISI PENGELUARAN.....	10
1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga.....	11
1.1.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	13
1.1.3. Ekspor - Impor.....	17
1.2. SISI PENAWARAN.....	21
1.2.1. Industri Pengolahan.....	23
1.2.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.....	27
1.2.3. Konstruksi.....	29
1.2.4. Transportasi dan Pergudangan.....	30
1.2.5. Real Estate.....	31
1.2.6. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.....	32
BAB II. KEUANGAN PEMERINTAH.....	34
2.1. PENDAPATAN DAERAH.....	35
2.2. BELANJA DAERAH.....	37
BAB III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....	41
3.1. KONDISI UMUM.....	41
3.2. INFLASI BULANAN (% <i>month to month</i>).....	42
3.3. INFLASI TAHUNAN (% <i>year on year atau yoy</i>).....	44
3.4. INFLASI MENURUT KOTA.....	45
3.4.1. Kota Tangerang.....	46
3.4.2. Kota Serang.....	46
3.4.3. Kota Cilegon.....	47
3.5. DISAGREGASI INFLASI.....	48
3.5.1. Komponen <i>Volatile Food</i>	49
3.5.2. Komponen <i>Administered Prices</i>	51
3.5.3. Komponen Inti.....	52

BOKS 1. UPAYA PENGENDALIAN HARGA PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 2016.....	54
BOKS 2. ANALISIS DAMPAK KEMACETAN DI PELABUHAN MERAK SAAT MUDIK LEBARAN 2016	57
BAB IV. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	58
4.1. PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN	58
4.2. STABILITAS KEUANGAN DAERAH.....	61
4.2.1. Ketahanan Sektor Korporasi	61
4.2.2. Kinerja Keuangan Korporasi.....	63
4.2.3. Eksposur Perbankan Terhadap Sektor Korporasi	64
4.2.4. Ketahanan Sektor Rumah Tangga.....	66
4.2.5. Eksposur Perbankan dalam Sektor Rumah Tangga.....	67
4.3. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	70
4.3.1. Perkembangan Pembiayaan UMKM	70
4.3.2. Program Pengembangan UMKM.....	71
4.3.3. Tantangan Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.....	72
BOKS 3. BI 7-DAY REPO RATE.....	73
BOKS 4. RELAKSASI KEBIJAKAN <i>LOAN TO VALUE</i> DAN <i>FINANCING TO VALUE</i>	75
BAB V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....	77
5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI.....	77
5.1.1. Perkembangan Transaksi Kliring.....	77
5.1.2. Perkembangan Transaksi RTGS	78
BAB VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	80
6.1. KETENAGAKERJAAN.....	80
6.2. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	82
6.2.1. Nilai Tukar Petani	82
6.2.2. Tingkat Kemiskinan.....	84
6.2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	86
6.2.4. Perkembangan Upah Buruh.....	87
BAB VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	88
7.1. PERTUMBUHAN EKONOMI.....	88
7.1.1. SISI PENGELUARAN	89
7.1.2. SISI PENAWARAN.....	91
7.2. INFLASI.....	92
7.2.1. Komponen <i>Volatile Food</i>	92

7.2.2. Komponen <i>Administered Prices</i>	93
7.2.3. Komponen Inti	93
DAFTAR ISTILAH.....	94

TABEL INDIKATOR EKONOMI

Indikator	2014	2015				2015	2016	
		I	II	III	IV		I	II
PDRB (% yoy)								
	5.47	5.51	5.21	5.90	4.87	5.37	5.10	5.16
Berdasarkan Sektor Ekonomi:								
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.45	3.77	13.33	11.99	(1.08)	7.08	0.53	2.38
2. Pertambangan dan Penggalian	4.12	2.95	3.37	4.76	4.16	3.82	5.65	4.45
3. Industri Pengolahan	1.49	4.97	2.98	4.56	0.86	3.30	2.78	2.62
4. Pengadaan Listrik, Gas	6.91	(3.81)	(7.73)	0.31	1.36	(2.55)	0.22	(0.41)
5. Pengadaan Air	7.15	5.81	6.81	3.91	4.19	5.16	5.93	6.23
6. Konstruksi	11.46	7.57	3.94	8.44	14.41	8.62	5.76	4.25
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.57	3.79	5.94	2.88	5.39	4.49	3.88	3.91
8. Transportasi dan Pergudangan	6.26	6.72	8.08	6.68	5.36	6.69	9.16	7.81
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.81	7.57	7.70	7.68	8.91	7.98	9.71	9.75
10. Informasi dan Komunikasi	18.71	9.25	9.98	10.02	9.96	9.81	9.41	10.01
11. Jasa Keuangan	4.75	9.29	3.28	9.27	11.64	8.40	13.89	19.80
12. Real Estate	9.06	6.02	5.61	5.34	5.54	5.62	7.21	7.57
13. Jasa Perusahaan	8.78	7.41	7.83	7.96	8.65	7.97	8.12	8.28
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.22	5.65	6.09	5.29	9.37	6.62	8.64	10.14
15. Jasa Pendidikan	6.83	6.64	8.40	7.42	9.06	7.90	9.00	9.18
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.34	3.42	3.28	5.16	9.03	5.24	9.07	9.10
17. Jasa lainnya	7.49	6.19	6.32	6.60	7.01	6.54	7.20	7.30
Berdasarkan Penggunaan:								
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.75	5.32	5.18	5.06	5.54	5.27	5.51	5.66
2. Lembaga Non Profit	12.25	1.14	0.11	6.16	7.69	3.75	4.37	4.54
3. Konsumsi Pemerintah	(0.05)	2.37	4.75	6.05	10.01	6.27	0.01	4.08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.27	5.24	5.93	6.45	4.84	5.60	4.94	5.00
5. Perubahan Inventori	(1.96)	(82.55)	(87.55)	(84.69)	(52.37)	(83.47)	(27.78)	(235.26)
6. Ekspor Total	7.67	(1.84)	1.10	7.26	0.97	1.79	5.78	1.75
7. Impor Total	5.90	(4.59)	(2.28)	4.88	2.10	(0.03)	5.69	0.49
Ekspor¹⁾								
Nilai Ekspor Non Migas (USD juta)	7,590	2,263	2,485	2,109	2,148	9,005	2,103	2,436
Volume Ekspor Non Migas (juta ton)	3,990	1,169	1,296	1,158	1,082	4,704	1,119	1,271
Impor²⁾								
Nilai Impor Non Migas (USD juta)	21,451	4,835	4,888	4,583	5,572	19,879	4,405	4,499
Volume Impor Non Migas (juta ton)	21,296	5,877	6,368	5,482	6,853	24,580	6,150	6,008
Indeks Harga Konsumen³⁾								
Kota Cilegon	120.92	120.63	122.47	124.60	125.69	125.69	126.94	128.20
Kota Serang	123.07	122.16	125.20	126.76	128.82	128.82	130.13	130.72
Kota Tangerang	124.82	124.09	126.64	128.50	130.16	130.16	131.06	131.06
Provinsi Banten	124.06	123.36	125.89	127.74	129.39	129.39	130.39	130.64
Laju Inflasi Tahunan (%yoy)								
Kota Cilegon	9.93	7.74	8.41	8.08	3.94	3.94	5.23	4.68
Kota Serang	11.28	7.76	9.63	8.34	4.67	4.67	6.52	4.41
Kota Tangerang	10.04	7.34	8.85	8.11	4.28	4.28	5.62	3.49
Provinsi Banten	10.20	7.45	8.91	8.14	4.29	4.29	5.70	3.77

Keterangan :

1) Ekspor triwulan II 2016 adalah angka sementara April-Juni 2016 (Sumber: Bea Cukai, diolah)

2) Impor triwulan I 2016 adalah angka sementara April-Juni 2016 Sumber: Bea Cukai, diolah)

3) Sumber : BPS Provinsi Banten

TABEL INDIKATOR PERBANKAN

INDIKATOR	2013	2014	2015				2015	2016	
			I	II	III	IV		I	II
Bank Uraun Konvensional (dalam Rp miliar)									
Total Aset	115,880	133,884	130,220	136,664	140,992	143,840	143,840	152,415	159,038
Dana Pihak Ketiga (DPK)	100,517	116,169	113,563	118,449	122,116	123,585	123,585	124,366	132,876
Giro	25,644	29,959	27,652	29,840	30,405	32,920	32,920	32,963	34,894
Tabungan	37,311	40,496	36,885	38,575	39,812	43,297	43,297	42,844	46,578
Deposito	37,563	45,714	49,027	50,033	51,550	47,368	47,368	48,558	51,405
Kredit Berdasarkan Lokasi Bank	71,120	83,422	83,161	85,212	88,077	91,419	91,419	98,228	103,888
Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek	176,682	197,821	199,281	207,602	218,458	223,376	223,376	228,005	238,273
Modal Kerja	73,589	85,563	84,564	89,852	96,620	95,819	95,819	96,302	104,604
Investasi	51,363	54,430	55,938	56,799	58,976	61,094	61,094	64,217	64,487
Konsumsi	51,730	57,827	58,778	60,950	62,862	66,463	66,463	67,487	69,182
Loan to Deposit Ratio (LDR) (%)	70.8	71.8	73.2	71.9	72.1	74.0	74.0	79.0	78.2
Bank Uraun Syariah (dalam Rp miliar)									
Total Aset	6,826	6,987	6,874	7,213	7,264	7,893	7,893	8,109	7,918
Dana Pihak Ketiga (DPK)	4,975	5,444	5,340	5,584	5,746	6,051	6,051	6,515	6,434
Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Bank	5,057	5,803	5,792	5,909	5,914	5,760	5,760	5,968	5,962
Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Proyek	9,216	10,372	10,710	10,805	10,604	10,885	10,885	10,788	11,798
Financing to Deposit Ratio (FDR)	101.6	106.6	108.5	105.8	102.9	95.2	95.2	91.6	92.7
Total Bank Uraun									
Total Aset	122,706	140,871	137,095	143,876	148,256	151,733	151,733	160,524	166,956
Dana Pihak Ketiga (DPK)	105,493	121,613	118,904	124,032	127,862	129,636	129,636	130,881	139,310
Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Bank	76,177	89,225	88,953	91,121	93,990	97,179	97,179	104,195	109,850
Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Lokasi Proyek	185,898	208,192	209,991	218,407	229,062	234,261	234,261	238,793	250,071
Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross	1.3	2.0	2.1	2.1	2.5	2.0	2.0	2.3	2.5
Kredit UMKM (Lokasi Proyek)	23,790	27,832	29,084	29,888	30,317	31,571	31,571	32,648	33,110

TABEL INDIKATOR SISTEM PEMBAYARAN

INDIKATOR	2013	2014	2015				2015	2016	
			I	II	III	IV		I	II
Transaksi Kliring									
Nominal (Juta)	7.40	7.55	2.08	2.80	4.34	7.95	17.17	13.18	15.18
Volume transaksi (Ribu)	228.50	217.96	58.61	87.09	144.16	203.62	493.48	275.07	311.02

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perekonomian Provinsi Banten pada triwulan II 2016 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan I 2016 yang tercatat 5,10% (yoy). Tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada triwulan II 2016 ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang meningkat sejalan dengan masuknya bulan Ramadhan. Sementara investasi tumbuh stabil ditopang oleh pembangunan proyek multiyears milik swasta. Di sisi lain, ekspor luar negeri menunjukkan perlambatan yang disebabkan oleh belum kuatnya permintaan luar negeri. Meskipun demikian, tingginya permintaan domestik menjadi penopang tumbuhnya ekspor total, sekaligus berkontribusi pada tumbuhnya lapangan usaha perdagangan di sisi penawaran.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan berlanjut pada triwulan III 2016 sejalan dengan terealisasinya proyek pemerintah yang mendorong lapangan usaha industri pengolahan dan konstruksi. Sejalan dengan hal tersebut, konsumsi baik swasta maupun pemerintah diperkirakan akan tumbuh lebih kuat. Membaiknya optimisme pelaku usaha terhadap perkiraan realisasi usaha triwulan III 2016 juga diharapkan dapat mendorong investasi tumbuh lebih tinggi.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, realisasi anggaran pemerintah Provinsi Banten juga dipercepat dimana secara umum meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2015 khususnya pada komponen belanja daerah. Di sisi pendapatan daerah, ketiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah terealisasi lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Pada sisi belanja, kedua komponen belanja juga menunjukkan realisasi yang lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Belanja tidak langsung masih menjadi penopang terealisasinya belanja daerah di triwulan II 2016. Sementara belanja langsung baru terealisasi 27% ditengah tantangan proses pengadaan yang masih cukup tinggi.

Di sisi perkembangan harga, tingkat harga di Provinsi Banten pada triwulan II 2016 mencapai 3,77% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I 2016 sebesar 5,70% (yoy). Berkurangnya tekanan inflasi pada triwulan II 2016 didorong oleh penurunan harga kelompok bahan makanan atau komponen volatile food khususnya cabai merah, bawang merah, daging ayam ras dan beras. Pengeluaran masyarakat untuk komponen administered prices juga mengalami penurunan. Sementara pada komponen inti mencatatkan inflasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan lalu. Secara spasial, inflasi di Kota Cilegon sebesar 4,68% (yoy)

merupakan yang tertinggi dibandingkan dua kota lainnya yaitu Kota Serang 4,41% (yoy) dan Kota Tangerang 3,49% (yoy).

Stabilitas keuangan di Provinsi Banten masih terjaga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2016. Ketahanan korporasi di Provinsi Banten menunjukkan perbaikan walaupun masih dalam fase kontraksi. Optimisme perbaikan kondisi korporasi semakin ditunjukkan dengan peningkatan penyaluran kredit modal kerja. Namun demikian, risiko kredit korporasi masih mengalami peningkatan dipengaruhi perlambatan yang masih terjadi pada industri pengolahan. Di sisi lain, kondisi rumah tangga masih mengalami peningkatan penghasilan pada triwulan II 2016 sehingga mendorong pertumbuhan pengeluaran perseorangan. Eksposur perbankan terhadap rumah tangga juga masih terjaga dengan risiko pembiayaannya yang masih relatif stabil.

Indikator ketenagakerjaan di Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana tercermin dari peningkatan jumlah penduduk yang bekerja pengangguran yang disertai oleh menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selain itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan yang diikuti oleh turunnya angka kemiskinan. Demikian juga Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin, meskipun belum merata ke daerah perdesaaan.

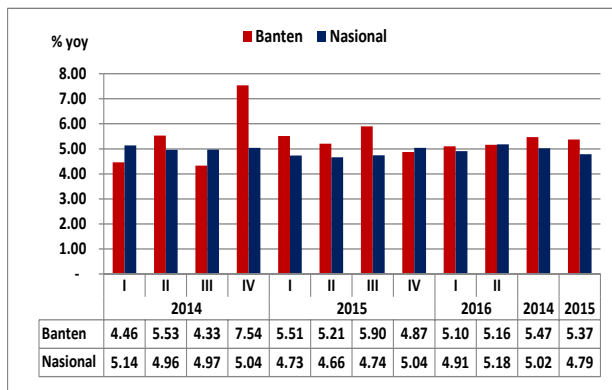
Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2016 diperkirakan tumbuh lebih tinggi di kisaran 5,5–5,8% (yoy). Di sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten didorong oleh konsumsi dan investasi yang meningkat sejalan dengan percepatan realisasi anggaran di sisi pengeluaran. Sementara itu di sisi penawaran, industri pengolahan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. **Secara keseluruhan, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten diperkirakan berada di kisaran 5,2 – 5,5% (yoy) dengan bias ke bawah.** Relatif lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada semester I 2016, diharapkan dapat terdorong oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi pada semester II 2016.

Tingkat inflasi Banten triwulan IV 2016 diperkirakan terkendali di kisaran 3,0 - 3,3% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan III 2016. Seluruh komponen yaitu inti, administered prices dan volatile food diperkirakan akan mengalami inflasi seiring dengan peningkatan permintaan di akhir tahun.

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

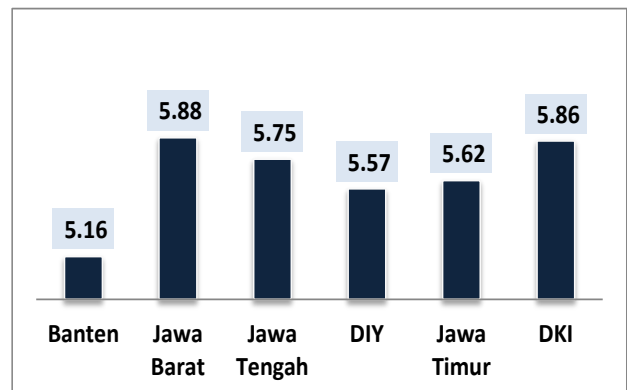
Perekonomian Provinsi Banten pada triwulan II 2016 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan I 2016 yang tercatat 5,10% (yoy). Tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada triwulan II 2016 ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang meningkat sejalan dengan masuknya bulan Ramadhan. Sementara investasi tumbuh stabil ditopang oleh pembangunan proyek multiyears milik swasta. Di sisi lain, ekspor luar negeri menunjukkan perlambatan yang disebabkan oleh belum kuatnya permintaan luar negeri. Meskipun demikian, tingginya permintaan domestik menjadi penopang tumbuhnya ekspor total, sekaligus berkontribusi pada tumbuhnya lapangan usaha perdagangan di sisi penawaran.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan berlanjut pada triwulan III 2016 sejalan dengan terealisasinya proyek pemerintah yang mendorong lapangan usaha industri pengolahan dan konstruksi. Sejalan dengan hal tersebut, konsumsi baik swasta maupun pemerintah diperkirakan akan tumbuh lebih kuat. Membaiknya optimisme pelaku usaha terhadap perkiraan realisasi usaha triwulan III 2016 juga diharapkan dapat mendorong investasi tumbuh lebih tinggi.



Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS RI

Grafik I.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Banten dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS RI

Grafik I.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Jawa

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan II 2016 tumbuh sebesar 5,16% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 yang tercatat 5,10% (yoy). Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten pada triwulan II 2016 tercatat Rp127,73 triliun, lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan I 2016 yang hanya mencapai Rp123,99 triliun. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, pada periode ini perekonomian Provinsi Banten tumbuh sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional 5,18% (yoy), begitu pula jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi-

provinsi di Kawasan Jawa. Meskipun demikian, optimisme pelaku usaha terindikasi meningkat pada triwulan III 2016 ditopang oleh kebijakan fiskal yang terakselerasi. Konsumsi masyarakat juga diperkirakan masih tumbuh kuat ditopang oleh momentum Hari Raya Idul Fitri dan tahun ajaran baru sekolah. Kedua hal tersebut berpotensi mendorong tumbuhnya industri pengolahan sebagai lapangan usaha utama di Provinsi Banten.

1.1. SISI PENGELUARAN

Momentum Ramadhan pada triwulan II 2016 menjadi penopang tingginya konsumsi rumah tangga di sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Secara musiman terlihat bahwa masuknya bulan Ramadhan mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi khususnya pada kelompok bahan makanan dan transportasi. Konsumsi pemerintah juga menunjukkan peningkatan sejalan dengan terealisasinya belanja pegawai untuk pencairan gaji ke-14 dan belanja hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sumber pertumbuhan ekonomi yang terbesar di sisi pengeluaran pada triwulan II 2016 adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 3,24% diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan kontribusi sebesar 1,46%. Berbeda dengan konsumsi rumah tangga yang mengalami kenaikan pada triwulan II 2016, investasi tumbuh relatif stabil ditopang oleh realisasi investasi swasta yang masih berjalan dan bersifat *multiyears*. Sementara investasi baru masih belum banyak terealisasi di triwulan II 2016 seiring dengan kepastian perbaikan ekonomi domestik maupun global yang masih dinanti pelaku usaha.

Di sisi lain, terdapat komponen yang mengalami perlambatan pada triwulan II 2016 yaitu ekspor dan impor. Ekspor antar daerah yang merupakan dominasi ekspor di Provinsi Banten dengan pangsa 64% terhadap total ekspor mengalami perlambatan pada triwulan II 2016, hal ini sejalan dengan melambatnya industri pengolahan yang pangsa pasarnya didominasi oleh pasar domestik. Sementara pada ekspor luar negeri masih mengalami kontraksi meskipun telah menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, impor pada triwulan II 2016 ditopang oleh impor antar daerah di tengah menurunnya impor luar negeri khususnya pada barang modal.

Tabel I.1 Pertumbuhan Ekonomi Banten Berdasarkan Kelompok Penggunaan (% yoy)

KATEGORI (YOY)	2015				2015	2016		
	I	II	III	IV		I	Growth	Source of Growth
							II	
Konsumsi								
Konsumsi RT	5.32	5.18	5.06	5.54	5.27	5.51	5.66	3.24
Konsumsi Pemerintah	1.14	0.11	6.16	7.69	3.75	4.37	4.54	0.02
Konsumsi LNPRT	2.37	4.75	6.05	10.01	6.27	0.01	4.08	0.16
Penanaman Modal Tetap Bruto	5.24	5.93	6.45	4.84	5.60	4.94	5.00	1.46
Perubahan Inventori	(82.55)	(87.55)	(84.69)	(52.37)	(83.47)	(27.78)	(235.26)	(0.80)
Net Ekspor	27.91	41.77	32.45	(13.44)	22.79	6.50	12.18	1.08
Ekspor	(1.84)	1.10	7.26	0.97	1.79	5.78	1.75	1.44
Impor	(4.59)	(2.28)	4.88	2.10	(0.03)	5.69	0.49	0.36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.84	5.11	5.53	4.22	4.92	5.10	5.16	5.16

Sumber: BPS Provinsi Banten

Tabel I.2. PDRB Provinsi Banten ADHB Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (juta Rp)

KATEGORI	2015				2015	2016	
	I	II	III	IV		I	II
Konsumsi							
Konsumsi RT	60,949,874	62,220,666	63,918,125	64,993,486	252,082,150	65,334,474	67,056,912
Konsumsi Pemerintah	530,152	545,843	559,522	580,161	2,215,678	564,571	582,934
Konsumsi LNPRT	4,234,472	4,732,710	5,424,376	7,734,722	22,126,280	4,587,018	5,346,965
Penanaman Modal Tetap Bruto	32,573,174	33,962,700	35,415,750	37,648,096	139,599,719	35,452,936	36,565,187
Perubahan Inventori	145,150	143,019	134,304	80,800	503,273	116,759	(210,602)
Net Ekspor	15,534,665	16,439,689	16,915,267	12,519,797	61,409,418	17,944,182	18,389,181
Ekspor	88,421,914	96,916,216	91,835,795	92,198,658	369,372,583	90,885,234	95,372,095
Impor	72,887,249	80,476,527	74,920,528	79,678,860	307,963,165	72,941,051	76,982,915
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	113,967,486.54	118,044,626.94	122,367,343.81	123,557,061.47	477,936,518.75	123,999,939.53	127,730,576.48

Sumber: BPS Provinsi Banten

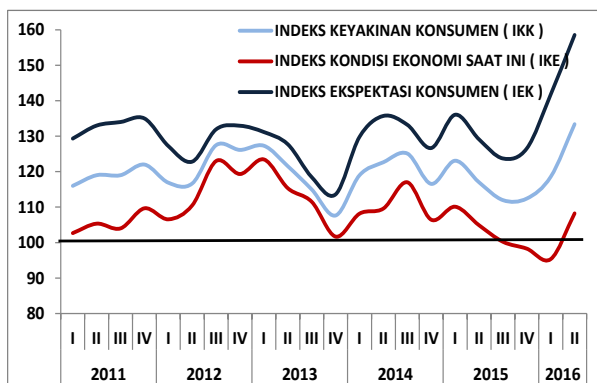
1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2016 tumbuh sebesar 5,66% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2016 yang tercatat 5,51% (yoy). Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten dengan andil terbesar yaitu 3,24% terhadap total pertumbuhan. Masuknya bulan Ramadhan pada triwulan II 2016 mendorong naiknya konsumsi rumah tangga khususnya pada komoditas bahan makanan, makanan jadi, dan alat angkut. Terlebih dengan terjaganya angka inflasi di level yang rendah yaitu 3,5±1% (yoy) dibandingkan triwulan I 2016 yang mencapai 5,70% (yoy), mendorong perbaikan daya beli masyarakat pada triwulan II 2016.

Meningkatnya pendapatan rumah tangga seiring dengan cairnya gaji ke-14 berupa THR juga mendorong kemampuan rumah tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih tinggi. Selain itu berbagai kegiatan sosial yang dilakukan pada momentum Ramadhan juga menjadi pendorong tingginya konsumsi rumah tangga. Arus perdagangan yang meningkat pada triwulan II 2016 mendorong ketersediaan lapangan pekerjaan tumbuh dan berpotensi turut mempengaruhi daya beli masyarakat.

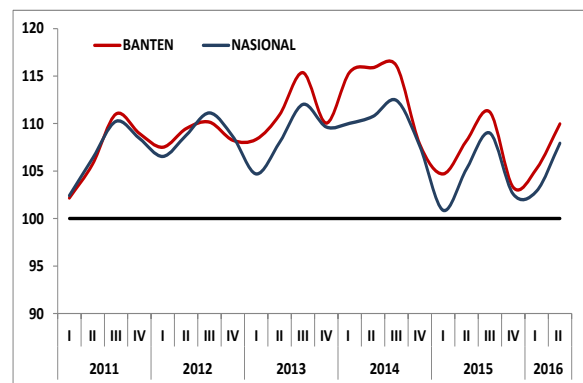
Perbaikan kinerja konsumsi juga tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK)¹ Bank Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami kenaikan dari sebelumnya 118,56 pada triwulan I 2016 menjadi 133,39 pada triwulan II 2016. Peningkatan tersebut didorong oleh tingginya Indeks Kondisi Ekonomi saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masing-masing tercatat 108,23 dan 158,56. Meningkatnya IKE tersebut ditopang oleh penghasilan konsumen yang mengalami kenaikan di tengah harga barang dan jasa yang relatif stabil. Indeks penghasilan konsumen mengalami kenaikan dari sebelumnya tercatat 124,50 pada triwulan I 2016 menjadi 126,83 pada triwulan III 2016. Indeks pengeluaran konsumen dibandingkan 3 bulan yang lalu juga mencatat adanya kenaikan dari sebelumnya 186,50 pada triwulan I 2016 menjadi 189,13 pada triwulan II 2016.

Tingkat *consumer confidence* yang tercermin dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK)² juga menunjukkan peningkatan. ITK pada triwulan II 2016 tercatat 109,97 atau meningkat dibandingkan posisi triwulan I 2016 sebesar 105,25. Peningkatan tersebut didorong oleh perbaikan seluruh variabel pembentuk seperti meningkatnya pendapatan rumah tangga, rendahnya pengaruh inflasi serta meningkatnya konsumsi bahan makanan, makanan jadi dan barang lainnya.



Sumber: Survei Konsumen – Bank Indonesia

Grafik I.3. Indeks Keyakinan Konsumen Banten



Sumber: BPS Provinsi Banten

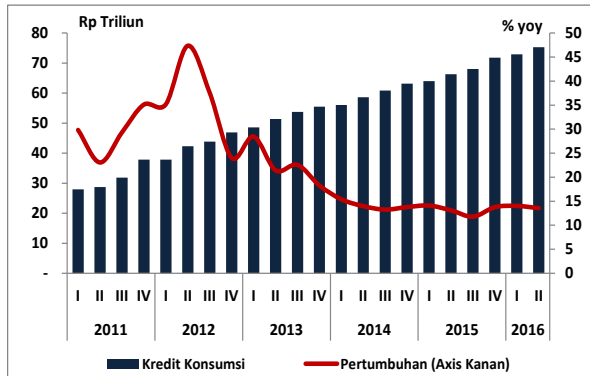
Grafik I.4. Indeks Tendensi Konsumen

Tingginya konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2016 tidak sejalan dengan kondisi kredit konsumsi yang menunjukkan sedikit perlambatan dari sebelumnya tumbuh 14,02% (yoy) pada triwulan I 2016, menjadi 13,56% (yoy) pada triwulan II 2016. Hal ini disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada kredit kendaraan bermotor (KKB) dan perlambatan yang terjadi

¹ Survei konsumen adalah survei bulanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap rumah tangga responden untuk mendapatkan informasi atau indikator dini (*prompt indicator*) mengenai tendensi/arah permintaan konsumen

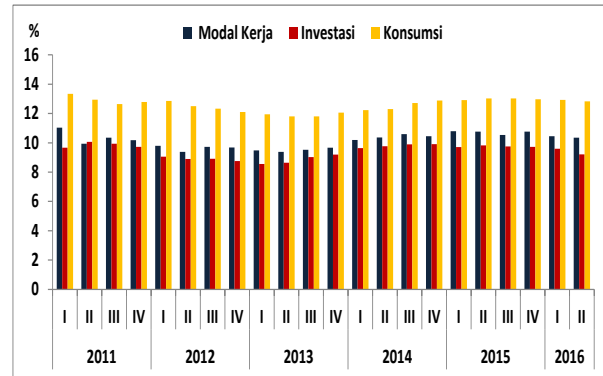
² Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Tendensi Konsumen (STK). Indeks ini menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan triwulan mendatang.

pada kredit multiguna. Selain itu, suku bunga kredit konsumsi yang tinggi juga menahan rumah tangga menggunakan pembiayaan melalui kredit perbankan. Secara umum peningkatan yang terjadi pada konsumsi rumah tangga belum cukup kuat sebagaimana terindikasi dari indeks konsumsi barang tahan lama yang masih dalam level pesimis.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik I.5. Perkembangan Kredit Konsumsi



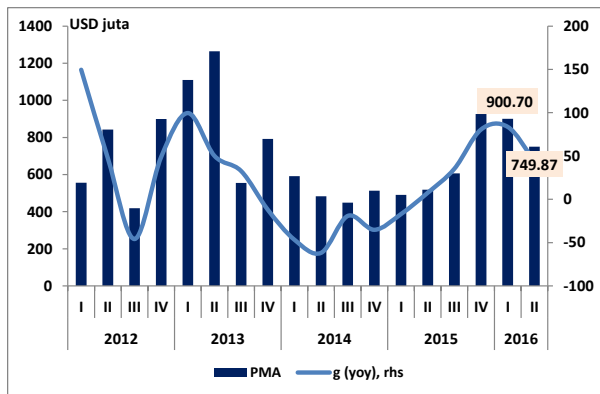
Sumber: Bank Indonesia

Grafik I.6. Suku Bunga Perbankan

Perkembangan kinerja konsumsi pada triwulan III 2016 terindikasi masih cukup kuat meskipun berisiko mengalami perlambatan paska tingginya pertumbuhan konsumsi pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan perkiraan *consumer confidence*, tumbuhnya konsumsi pada triwulan III 2016 ditopang oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga seiring dengan cairnya gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Juli 2016. Hari Raya Idul Adha pada September 2016 yang juga dirayakan sebagai hajatan dalam rangka kenaikan haji menjadi salah satu pemicu tumbuhnya konsumsi rumah tangga. Selain itu, peningkatan upah konstruksi sejalan dengan semakin maraknya realisasi proyek juga mendorong kuatnya konsumsi triwulan III 2016.

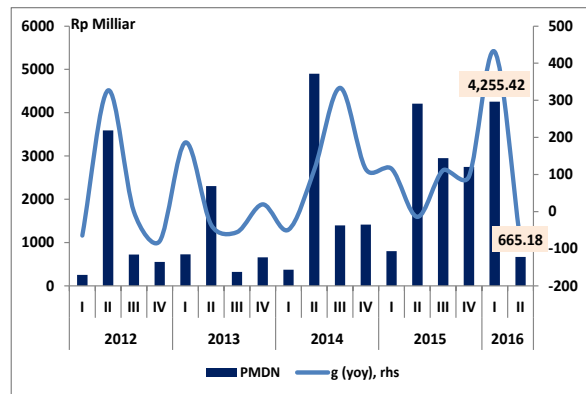
1.1.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Secara nominal, PMTB yang terealisasi di Provinsi Banten pada triwulan II 2016 tercatat Rp10,65 triliun atau tumbuh sebesar 5% (yoy) relatif stabil dibandingkan triwulan I 2016 yang tercatat 4,94% (yoy). Kinerja investasi pada triwulan II 2016 ditopang oleh Penanaman Modal Asing (PMA) yang tumbuh positif sebesar 44,54% (yoy), di tengah penurunan yang terjadi pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar -84,20% (yoy). Adapun pangsa PMA pada triwulan II 2016 mencapai 94% dari total PMTB, sementara PMDN hanya memiliki pangsa sebesar 6% dari total PMTB.



Sumber: BKPM

Grafik I.7. Perkembangan PMA Banten



Sumber: BKPM

Grafik I.8. Perkembangan PMDN Banten

Berdasarkan hasil liaison³, realisasi investasi pada triwulan II 2016 mengalami peningkatan yang didorong oleh inovasi dunia usaha dalam menghasilkan produk yang lebih terjangkau bagi konsumen. Sebagian besar investasi bangunan yang terdapat pada triwulan II 2016 merupakan pembangunan pabrik yang bersifat *multiyears* seperti pembangunan Blast Furnace milik Krakatau Steel, PT Krakatau Osaka Steel (Perusahaan milik Krakatau Steel dan Osaka Steel Corporation), PT Synthetic Rubber Indonesia dan beberapa pabrik lainnya.

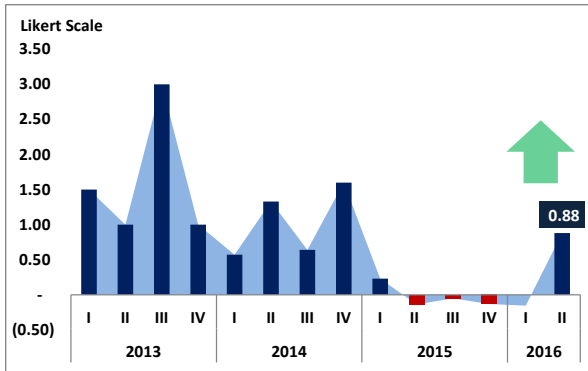
Pelaku usaha juga melakukan investasi barang modal seperti mesin sebagai investasi rutin dalam mendukung operasional perusahaan. Hal tersebut tercermin dalam *likert scale* yang menunjukkan peningkatan dari sebelumnya 0 menjadi 0,88. Impor barang modal juga mencatatkan adanya perbaikan dari sebelumnya mengalami penurunan hingga 39,24% menjadi 26,43% pada triwulan II 2016.

Meningkatnya realisasi investasi juga terindikasi pada Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)⁴ yang meningkat dari periode triwulan I 2016 sebesar 7,22 (SBT⁵) menjadi 10,17 (SBT) pada triwulan II 2016. Adapun subkategori yang tercatat mengalami peningkatan investasi pada triwulan II 2016 diantaranya subkategori industri kimia di Cilegon dan makanan/minuman di Tangerang

³ Liaison adalah kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung/tidak langsung kepada pelaku usaha/institusi lainnya mengenai perkembangan dan arah kegiatan usaha.

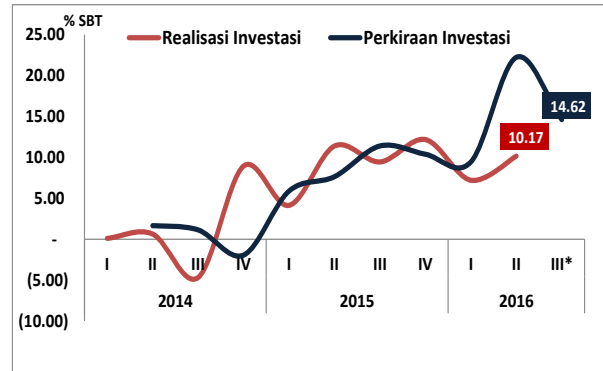
⁴ Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) adalah survei triwulanan yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai arah perkembangan usaha dari sisi penawaran pada triwulan berjalan dan pada triwulan mendatang.

⁵ Saldo Bersih Tertimbang



Sumber: Liaison, Bank Indonesia

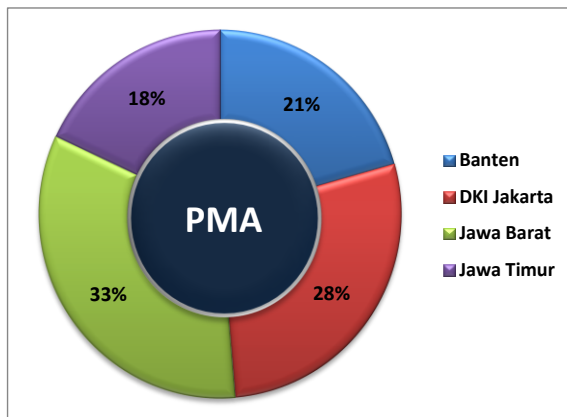
Grafik I.9. Perkembangan Investasi



Sumber: SKDU, Bank Indonesia

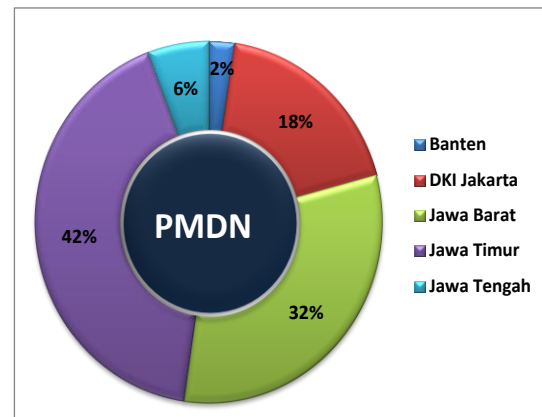
Grafik I.10. Realisasi dan Perkiraan Investasi

Di tengah pertumbuhan yang relatif stabil, PMA di Provinsi Banten masih menduduki peringkat yang sama seperti triwulan I 2016 yaitu ke-3 nasional setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sementara PMDN mengalami penurunan yang cukup drastis dari sebelumnya menduduki peringkat ke-4 nasional menjadi peringkat ke-17 nasional.



Sumber: BKPM

Grafik I.11. Realisasi PMA berdasarkan Lokasi



Sumber: BKPM

Grafik I.12. Realisasi PMDN berdasarkan Lokasi

Secara spasial, investasi asing terbesar di Provinsi Banten pada triwulan II 2016 berlokasi di Kota Cilegon dengan total nominal sebesar US\$ 236 juta, diikuti Kabupaten Serang dengan total nominal sebesar US\$ 229 juta. Tingginya investasi asing di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang didorong oleh pembangunan pabrik baru pada lapangan usaha industri pengolahan subkategori kimia dan mineral non logam (semen).

Sementara itu, investasi dalam negeri terbesar pada triwulan II 2016 berlokasi di Kota Cilegon dengan total nominal sebesar Rp 293 miliar, diikuti Kabupaten Tangerang dengan total sebesar Rp 267 miliar. Tingginya investasi dalam negeri di Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang didorong oleh perluasan dan pembangunan pabrik baru untuk subkategori logam dasar, kimia, dan makanan.

Tabel I.3. Realisasi PMA & PMDN per Kota/Kabupaten
Triwulan II 2016

WILAYAH		PMDN		PMA	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)
Banten	Kabupaten Pandeglang	3	1367.4	1	93
	Kabupaten Lebak	6	5,126.80	12	19,276.10
	Kabupaten Tangerang	89	267,220.80	349	146,478.60
	Kabupaten Serang	29	63,827.30	143	229,476.20
	Kota Tangerang	36	34,072.90	189	27,696.10
	Kota Cilegon	15	293,124.10	82	236,817.80
	Kota Tangerang Selatan	6	0	80	64,597.10
	Kota Serang	5	443.2	10	25444
TOTAL		189	665,182.50	866	749,878.90

Sumber: BKPM

Secara sektoral, investasi asing di Provinsi Banten masih didominasi oleh investasi pada lapangan usaha industri pengolahan yang bersifat *heavy industry*. Investasi asing terbesar ditujukan pada subkategori kimia dasar dengan total investasi sebesar US\$ 182 juta. Investasi pada subkategori kimia yang sedang berjalan pada triwulan II 2016 diantaranya merupakan perluasan pabrik dan pembangunan pembangkit listrik. Selain industri kimia, terdapat pula investasi besar pada subkategori mineral non logam dan logam dasar.

Seperti yang terjadi pada investasi asing, investasi dalam negeri juga didominasi oleh industri pengolahan. Adapun subkategori yang memiliki investasi dalam negeri terbesar yaitu industri makanan dengan total investasi sebesar Rp190 miliar dan logam dasar dengan total investasi sebesar Rp145 miliar. Jenis investasi dalam negeri yang mendominasi pada kedua subkategori tersebut adalah pembangunan pabrik guna mendorong peningkatan kapasitas industri.

Tabel I.4. Nilai Investasi PMA dan PMDN ke Provinsi Banten Triwulan II 2016

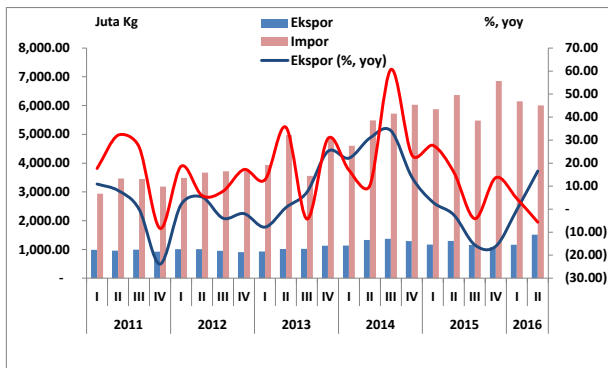
Sektor	PMDN		PMA	
	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	0	-	105	182,506
Industri Mineral Non Logam	8	5,615	31	160,389
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	36	145,861	120	144,077
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	12	319	29	124,552
Listrik, Gas dan Air	6	27,456	9	55,519
Jasa Lainnya	1	-	29	46,427
Industri Makanan	10	190,130	61	8,710
Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	3	-	25	5,994
Perdagangan dan Reparasi	14	23,716	181	4,301
Industri Tekstil	5	-	43	3,881
Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu	0	-	30	3,760
Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	44	189,398	31	2,758
Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	23	35,080	48	2,304
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	0	-	18	1,621
Konstruksi	2	10,882	19	1,173
Pertambangan	1	-	11	1,108
Hotel dan Restoran	8	-	47	684
Perikanan	0	-	1	93
Industri Lainnya	5	947	20	21
Industri Kayu	2	9,600	7	-
Tanaman Pangan dan Perkebunan	1	-	1	-
Peternakan	5	26,180	0	-
Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	3	-	0	-
TOTAL	189	665,183	866	749,879

Sumber: BKPM

Perkembangan kinerja investasi pada triwulan III 2016 diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan proyek pemerintah yang diharapkan semakin dipercepat realisasinya. Sementara pada investasi swasta, membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik yang didorong oleh implementasi paket kebijakan pemerintah disambut positif oleh dunia usaha dan diharapkan dapat menjadi pemicu masuknya investasi pada triwulan III 2016. Berdasarkan hasil SKDU, perkiraan investasi pada triwulan III 2016 diperkirakan mengalami peningkatan yang ditopang oleh investasi pada industri pengolahan khususnya pada subkategori kimia dan makanan.

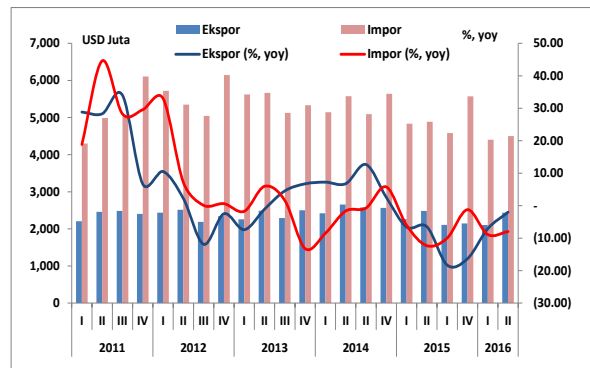
1.1.3. Ekspor - Impor

Kinerja ekspor dan impor pada triwulan II 2016 masing-masing tumbuh 1,75% (yoy) dan 0,49% (yoy). Kedua komponen pada sisi pengeluaran tersebut mengalami perlambatan dibandingkan periode triwulan I 2016 yang tumbuh 5,78% (yoy) untuk ekspor dan 5,69% (yoy) untuk impor. Meskipun demikian, perlambatan pada impor yang lebih dalam dibandingkan ekspor menyebabkan net ekspor tumbuh 12,18% (yoy) lebih tinggi dibandingkan net ekspor pada triwulan I 2016 yang tercatat 6,50% (yoy). Ekspor antar daerah masih menjadi penopang tumbuhnya ekspor pada triwulan II 2016 di tengah kontraksi yang terjadi pada ekspor luar negeri.



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.13. Perkembangan Volume Ekspor-Impor Antar Negara Provinsi Banten



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.14. Perkembangan Nilai Ekspor-Impor Antar Negara Provinsi Banten

Berdasarkan hasil liaison, kinerja ekspor luar negeri masih mengalami tekanan akibat melambatnya permintaan dari negara tujuan dagang. Negara tujuan ekspor yang menyebabkan terjadinya penurunan pada ekspor luar negeri adalah Eropa dan Tiongkok dengan masing-masing memiliki pangsa sebesar 17% dan 8% dari total nilai ekspor Provinsi Banten. Pertumbuhan ekspor ke Eropa mengalami kontraksi hingga 10,94% (yoy), sementara pertumbuhan ekspor ke Tiongkok tercatat mengalami kontraksi sebesar 9,82% (yoy). Meskipun demikian, di tengah penurunan yang terjadi pada beberapa negara utama, ekspor ke Amerika Serikat justru mengalami peningkatan ke level 7% (yoy). Hal tersebut menyebabkan ekspor luar negeri Provinsi Banten mengalami perbaikan meskipun masih berada dalam level kontraksi.

Kinerja ekspor luar negeri yang beragam dijelaskan untuk setiap komoditas unggulan dengan pangsa terbesar di Provinsi Banten seperti di bawah ini:

1. Alas Kaki (pangsa 28% dari total ekspor Provinsi Banten)

Perkembangan ekspor alas kaki pada triwulan II 2016 mengalami penurunan dari sebelumnya tumbuh 2,55% (yoy) menjadi terkontraksi di level -1,86% (yoy). Meskipun demikian, secara nominal ekspor alas kaki masih memberikan kontribusi terbesar pada ekspor di Provinsi Banten. Penurunan ekspor pada komoditas alas kaki merupakan dampak dari rendahnya permintaan dari negara-negara di Eropa. Sementara itu, permintaan ekspor alas kaki di Jepang, Malaysia dan Thailand justru mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya perluasan pasar paska gelombang penutupan pabrik sepatu di Tiongkok.

2. Tekstil (pangsa 12% dari total ekspor Provinsi Banten)

Perkembangan ekspor tekstil pada triwulan II 2016 masih berada dalam fase kontraksi yaitu sebesar -1,79% (yoy). Meskipun angka tersebut tercatat membaik dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2016 sebesar -8,39% (yoy), namun kontraksi yang terjadi pada triwulan II 2016 masih menunjukkan belum pulihnya permintaan pada komoditas tekstil

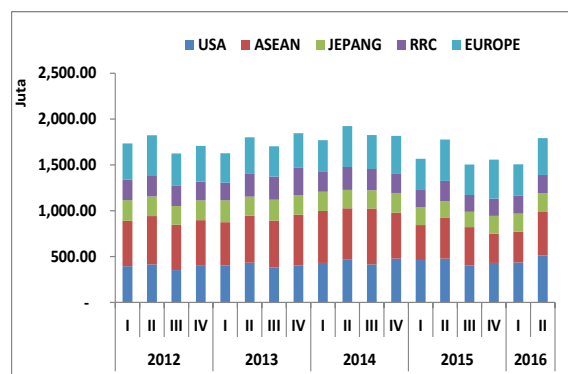
di pasar internasional. Penurunan ekspor yang terjadi pada komoditas tekstil utamanya terjadi pada sub komoditas benang dan serat tekstil.

3. Kimia (pangsa 11% dari total ekspor Provinsi Banten)

Perkembangan ekspor kimia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sebelumnya terkontraksi sebesar -14,69% (yoy) pada triwulan I 2016, tumbuh menjadi 27,75% (yoy) pada triwulan II 2016. Peningkatan ekspor tersebut bahkan menggeser pangsa ekspor kimia dari sebelumnya hanya 8% dari total ekspor Provinsi Banten menjadi 11% pada triwulan II 2016. Meningkatnya ekspor kimia didorong oleh ekspor ke negara Tiongkok, Jepang dan Thailand. Salah satu upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam mendorong penjualan adalah dengan melakukan diversifikasi produk dari beberapa *grade* kualitas yang berbeda sehingga dapat menjangkau semua pasar.

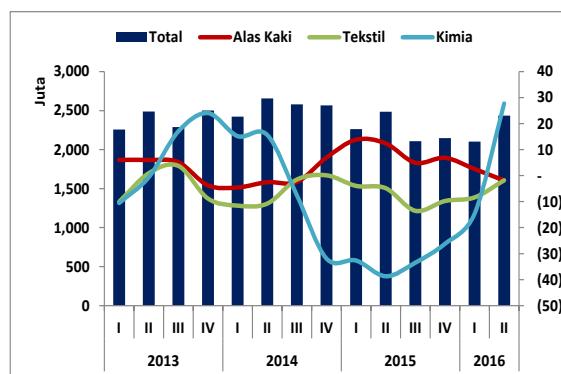
4. Baja (pangsa 9% dari total ekspor Provinsi Banten)

Perkembangan ekspor baja pada triwulan II 2016 tercatat mengalami kontraksi sebesar -10,26% (yoy), setelah sebelumnya terkontraksi hingga -28,10% (yoy). Secara umum, kinerja ekspor baja masih mengalami tekanan akibat *oversupply* baja di pasar internasional. Dalam mengatasi hal tersebut, produsen baja kemudian mencari alternatif negara tujuan ekspor sehingga penurunan yang terjadi pada ekspor luar negeri dapat lebih tertahan. Pasar domestik yang merupakan pangsa pasar utama penjualan baja pada perusahaan di Provinsi Banten menjadi penopang tumbuhnya penjualan baja pada triwulan II 2016.



Sumber : Bea Cukai, diolah

Grafik I.15. Nilai Ekspor Negara Tujuan

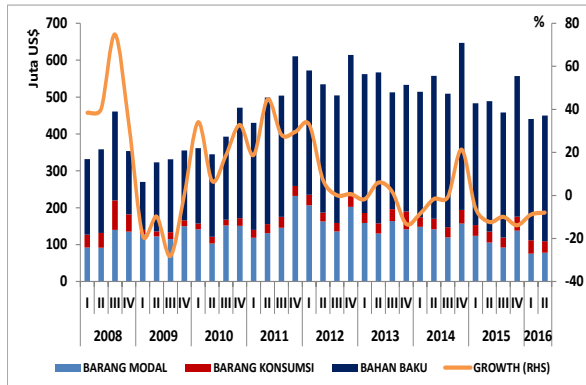


Sumber : Bea Cukai, diolah

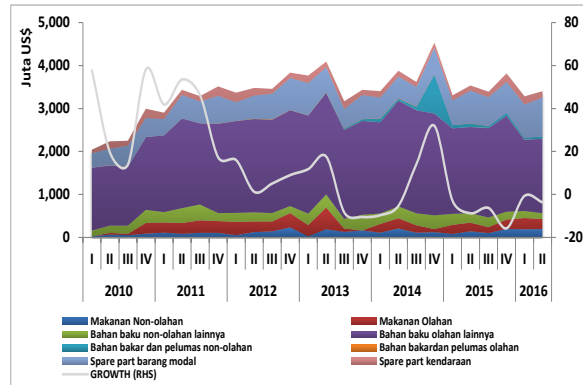
Grafik I.16. Perkembangan Ekspor Beberapa Komoditas

Impor luar negeri Provinsi Banten triwulan II 2016 mengalami perbaikan dari sebelumnya terkontraksi sebesar -8,89% (yoy) pada triwulan I 2016, menjadi -7,99% (yoy) pada triwulan II 2016. Perbaikan yang terjadi pada impor luar negeri ditopang oleh membaiknya impor barang modal dari sebelumnya tumbuh -29,24% (yoy) pada triwulan I 2016, menjadi -26,43% (yoy) pada triwulan II 2016. Impor konsumsi juga mampu tumbuh positif sebesar 7,06% (yoy) yang didominasi oleh impor bahan makanan olahan dan non olahan. Di sisi lain, impor bahan baku

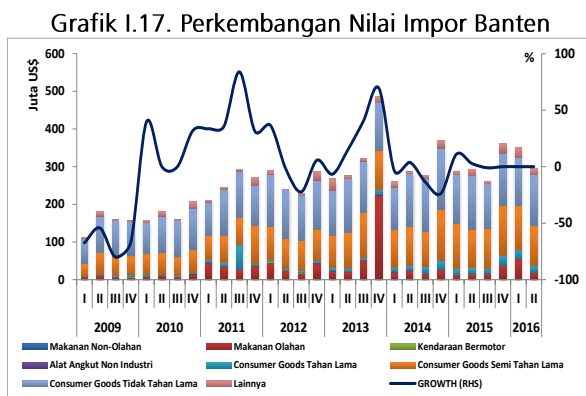
mengalami penurunan yang semakin dalam dari sebelumnya -0,61% (yoy) pada triwulan I 2016, menjadi -3,68% (yoy) pada triwulan II 2016. Hal tersebut sejalan dengan melambatnya industri pengolahan pada triwulan II 2016 dimana dominasi impor bahan baku yang dimiliki Provinsi Banten merupakan jenis bahan baku industri.



Sumber: Bea Cukai, diolah

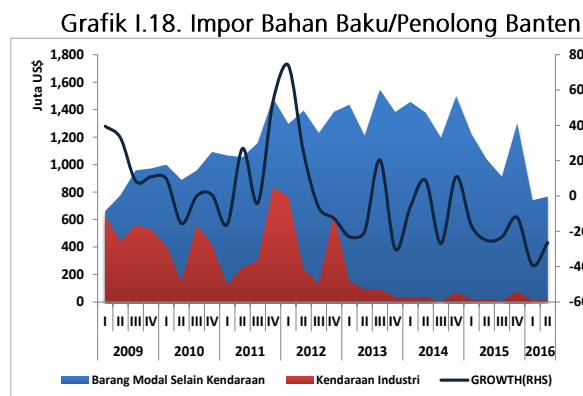


Sumber: Bea Cukai, diolah



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.19. Impor Barang Konsumsi Banten



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.20. Impor Barang Modal Banten

Perkembangan kinerja ekspor – impor pada triwulan III 2016 diperkirakan mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil liaison, terjadi peningkatan penjualan ekspor pada produk Tekstil dan Produk dari Tekstil (TPT) ke Eropa dan Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan musim panas. Meskipun demikian, risiko terjadinya perlambatan ekspor akibat belum stabilnya perekonomian negara mitra dagang masih mungkin terjadi khususnya apabila industri tidak memperluas pangsa pasarnya ke negara lain. Seperti diketahui bahwa terdapat dua kawasan yang diharapkan menjadi pasar potensial bagi produk dalam negeri yaitu Afrika dan India. Kedua kawasan tersebut saat ini telah menjadi negara tujuan ekspor untuk produk TPT oleh beberapa wilayah di Indonesia.

Ekspor antar daerah masih akan menjadi penopang tumbuhnya ekspor triwulan III 2016 yang utamanya ditopang oleh realiasi proyek pemerintah maupun swasta. Industri di Provinsi Banten yang diantaranya menghasilkan produk bahan baku bangunan seperti besi, baja, dan semen diperkirakan akan mengalami kenaikan permintaan sejalan dengan terealisasinya proyek di

berbagai daerah di Indonesia. Di sisi lain, kinerja impor diperkirakan tumbuh lebih tinggi seiring dengan meningkatnya permintaan pada industri pengolahan yang mendorong impor bahan baku. Impor modal juga diperkirakan meningkat sejalan dengan realisasi proyek investasi yang dipercepat pada triwulan III 2016.

1.2. SISI PENAWARAN

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten di sisi produksi pada triwulan II 2016 ditopang oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh lebih tinggi. Hal ini merupakan dampak musiman yang terjadi memasuki bulan Ramadhan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pertumbuhan yang terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan II 2016 mencatatkan angka yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015.

Konsumsi yang pada triwulan II 2016 tumbuh lebih tinggi menjadi pendorong tumbuhnya lapangan usaha di sisi penawaran. Selain lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha *real estate* dan pertanian yang masing – masing memiliki pangsa 8% dan 6% dari total PDRB Provinsi Banten triwulan II 2016 juga mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi. Di sisi lain kinerja sektor utama ekonomi Provinsi Banten yaitu industri pengolahan justru mengalami perlambatan yang disebabkan oleh tertekannya permintaan ekspor atas produk industri. Hal tersebut menyebabkan beberapa subkategori pada industri pengolahan yang didominasi pasar ekspor mengalami perlambatan kinerja.

Tabel 1.5. Pertumbuhan Ekonomi Banten Berdasarkan Sektor Ekonomi

KATEGORI (YOY)	2015				2015	2016		
	I	II	III	IV		I	Growth	Source of Growth
							II	
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.77	13.33	11.99	(1.08)	7.08	0.53	2.38	0.14
2. Pertambangan dan Penggalian	2.95	3.37	4.76	4.16	3.82	5.65	4.45	0.03
3. Industri Pengolahan	4.97	2.98	4.56	0.86	3.30	2.78	2.62	0.96
4. Pengadaan Listrik, Gas	(3.81)	(7.73)	0.31	1.36	(2.55)	0.22	(0.41)	(0.00)
5. Pengadaan Air	5.81	6.81	3.91	4.19	5.16	5.93	6.23	0.01
6. Konstruksi	7.57	3.94	8.44	14.41	8.62	5.76	4.25	0.39
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.79	5.94	2.88	5.39	4.49	3.88	3.91	0.52
8. Transportasi dan Pergudangan	6.72	8.08	6.68	5.36	6.69	9.16	7.81	0.50
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.57	7.70	7.68	8.91	7.98	9.71	9.75	0.23
10. Informasi dan Komunikasi	9.25	9.98	10.02	9.96	9.81	9.41	10.01	0.53
11. Jasa Keuangan	9.29	3.28	9.27	11.64	8.40	13.89	19.80	0.52
12. Real Estate	6.02	5.61	5.34	5.54	5.62	7.21	7.57	0.60
13. Jasa Perusahaan	7.41	7.83	7.96	8.65	7.97	8.12	8.28	0.08
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.65	6.09	5.29	9.37	6.62	8.64	10.14	0.17
15. Jasa Pendidikan	6.64	8.40	7.42	9.06	7.90	9.00	9.18	0.26
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.42	3.28	5.16	9.03	5.24	9.07	9.10	0.10
17. Jasa lainnya	6.19	6.32	6.60	7.01	6.54	7.20	7.30	0.10
PDRB	5.51	5.21	5.90	4.87	5.37	5.10	5.16	5.16

Sumber: BPS Provinsi Banten

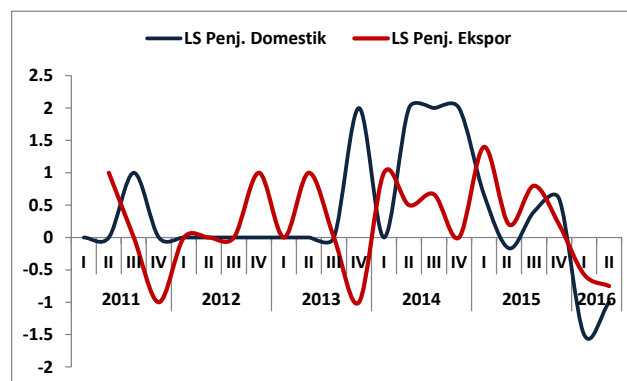
Tabel I. 6. PDRB Provinsi Banten ADHB Berdasarkan Sektor Ekonomi (juta Rp)

KATEGORI	2015				2015	2016	
	I	II	III	IV		I	II
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,058,360	7,420,691	7,705,779	6,390,816	28,575,646	7,484,431	8,006,588.97
2. Pertambangan dan Penggalian	956,085	970,087	976,383	973,270	3,875,825	1,012,212	1,029,535.36
3. Industri Pengolahan	38,779,423	39,803,855	40,643,985	40,793,574	160,020,837	40,943,894	41,613,148.92
4. Pengadaan Listrik, Gas	3,238,965	3,171,040	3,318,518	3,385,465	13,113,987	3,229,669	3,241,489.12
5. Pengadaan Air	88,571	92,059	91,801	94,022	366,453	96,336	100,956.43
6. Konstruksi	10,925,290	11,637,899	12,259,409	13,013,548	47,836,145	11,923,688	12,635,174.36
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,866,720	14,369,889	14,634,373	14,876,989	57,747,971	14,753,172	15,315,219.39
8. Transportasi dan Pergudangan	10,951,403	11,793,834	12,847,857	13,274,624	48,867,718	13,177,772	13,483,068.74
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,759,414	2,868,962	2,977,138	3,103,129	11,708,643	3,118,880	3,209,948.59
10. Informasi dan Komunikasi	4,023,759	4,152,348	4,354,783	4,392,461	16,923,351	4,400,649	4,573,055.20
11. Jasa Keuangan	3,222,255	3,145,858	3,460,470	3,575,853	13,404,437	3,786,113	3,885,092.45
12. Real Estate	8,117,380	8,312,871	8,495,986	8,681,781	33,608,018	8,917,411	9,139,815.05
13. Jasa Perusahaan	1,172,110	1,201,811	1,247,290	1,274,342	4,895,553	1,323,768	1,354,794.70
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,184,905	2,293,166	2,340,093	2,461,815	9,279,980	2,487,581	2,591,978.66
15. Jasa Pendidikan	3,547,995	3,652,976	3,758,958	3,914,233	14,874,161	3,948,513	4,072,076.69
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,278,357	1,329,072	1,371,195	1,428,981	5,407,605	1,436,695	1,473,194.69
17. Jasa lainnya	1,796,496	1,828,206	1,883,327	1,922,158	7,430,188	1,959,155	2,005,439.15
PDRB	113,967,487	118,044,627	122,367,344	123,557,061	477,936,519	123,999,940	127,730,576

Sumber: BPS Provinsi Banten

1.2.1. Industri Pengolahan

Lapangan usaha industri pengolahan mengalami perlambatan dari sebelumnya tumbuh 2,78% (yoy) pada triwulan I 2016, menjadi 2,62% (yoy) pada triwulan II 2016. Dominannya produk dengan penjualan ekspor luar negeri menyebabkan belum stabilnya kinerja pada industri pengolahan di Provinsi Banten. Kondisi ini tercermin dari hasil liaison, yang mencatatkan dominasi permintaan pada triwulan II 2016 masih berasal dari konsumsi domestik. Hal tersebut juga tercermin dalam *likert scale* yang menunjukkan perbaikan permintaan domestik di tengah belum pulihnya permintaan luar negeri.



Sumber : Bank Indonesia

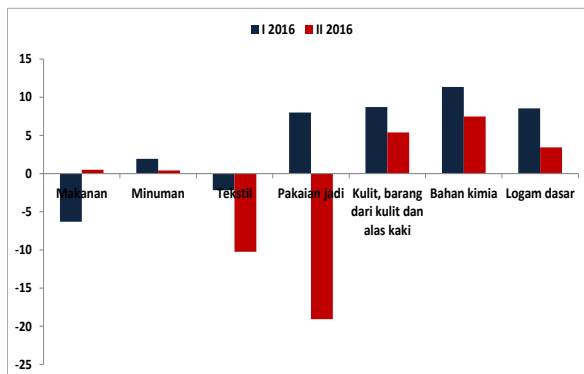
Grafik I.21. Penjualan Lapus. Industri Pengolahan

Industri pengolahan sebagai *leading economic sector* dengan pangsa 36% memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Perlambatan yang terjadi pada industri pengolahan bisa berdampak pada perlambatan yang terjadi pada perekonomian Provinsi Banten. Seperti yang terjadi saat ini, dimana perlambatan yang terjadi pada industri pengolahan menahan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten untuk tumbuh lebih tinggi. Secara umum perkembangan industri pengolahan pada triwulan II 2016 juga relatif bervariasi. Di tengah perlambatan yang terjadi pada beberapa subkategori industri pengolahan, masih terdapat pula subkategori lain yang pertumbuhannya mencatatkan perbaikan dibandingkan triwulan I 2016.

Melambatnya produksi manufaktur juga tercermin dari pertumbuhan impor bahan baku yang mengalami kontraksi lebih dalam dari sebelumnya -0,61% (yoy) pada triwulan I 2016, menjadi -3,68% (yoy) pada triwulan II 2016. Melambatnya impor bahan baku tidak hanya berimplikasi pada produksi industri pengolahan yang mengalami penurunan, namun juga sebagai dampak positif dari upaya pelaku usaha di Provinsi Banten yang telah dapat memproduksi bahan baku dalam negeri.

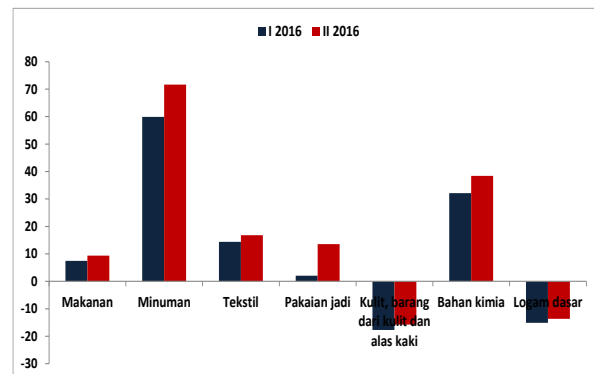
Kinerja pertumbuhan produksi subkategori industri pengolahan pada industri besar dan sedang triwulan II 2016 juga menunjukkan pertumbuhan tahunan yang relatif lebih rendah

dibandingkan kondisi triwulan I 2016. Pada industri besar dan sedang, penurunan terjadi pada subkategori pakaian jadi dan tekstil. Perlambatan tersebut utamanya disebabkan oleh melambatnya permintaan dari negara mitra dagang seperti Eropa dan Amerika Serikat. Di sisi lain, pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil justru menunjukkan peningkatan dibandingkan periode triwulan I 2016. Hal ini mengindikasikan kondisi industri mikro dan kecil di Provinsi Banten yang tumbuh relatif kuat. Sebagian besar subkategori utama pada industri mikro dan kecil mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi.



Sumber : Bloomberg

Grafik I.22. Pertumbuhan Produksi Subsektor Besar dan Sedang



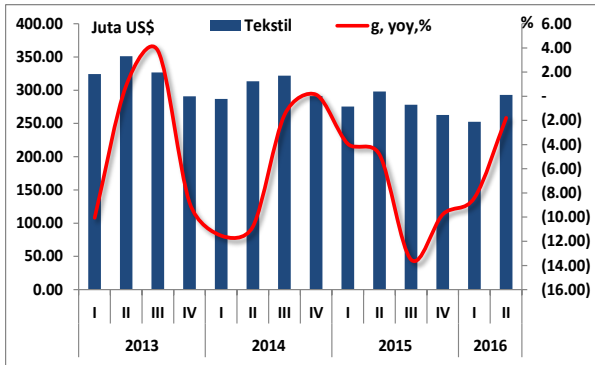
Sumber : Liaison – Bank Indonesia

Grafik I.23. Pertumbuhan Produksi Subsektor Mikro dan Kecil

Kinerja subkategori tekstil pada triwulan II 2016 mengalami tekanan yang disebabkan lemahnya permintaan baik domestik maupun luar negeri. Lemahnya permintaan dalam negeri merupakan dampak dari daya beli rumah tangga yang meskipun telah menunjukkan perbaikan namun belum cukup kuat dibandingkan kondisi normalnya. Hal ini terlihat dari penjualan tekstil dan pakaian jadi yang tumbuh tidak sekuat momentum Ramadhan pada tahun-tahun sebelumnya.

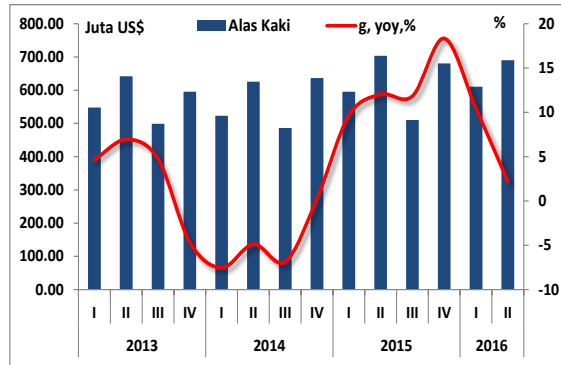
Pada subkategori tekstil permintaan luar negeri masih mengalami penurunan -1,79% (yoy) meskipun telah menunjukkan adanya perbaikan. Selain itu, Uni Eropa yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk pada negara-negara tertinggal seperti Myanmar, Bangladesh dan Vietnam menyebabkan produk tekstil dan pakaian menjadi kalah bersaing. Amerika Serikat juga memberikan pembebasan bea masuk kepada Vietnam sebagai negara kemitraan Trans Pacific. Rata-rata selisih bea masuk produk Indonesia dengan negara lain bahkan bisa mencapai 17%.

Kinerja subkategori alas kaki pada triwulan II 2016 juga menunjukkan perlambatan yang terindikasi dari penurunan ekspor alas kaki di level kontraksi -1,86% (yoy). Perlambatan yang terjadi pada industri alas kaki merupakan dampak dari semakin ketatnya persaingan antar pelaku usaha di pasar internasional seperti yang terjadi pada industri tekstil.



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.24. Nilai Ekspor Tekstil

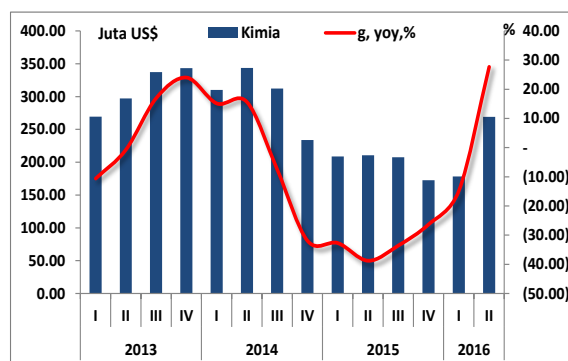


Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.25. Nilai Ekspor Alas Kaki

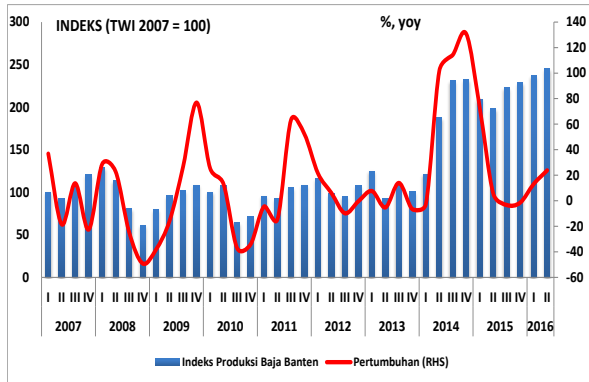
Perkembangan kinerja subkategori kimia pada triwulan II 2016 menunjukkan peningkatan terlihat dari produksi industri kimia yang tumbuh positif 7,48% (yoy). Ekspor kimia juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sebelumnya terkontraksi sebesar -14,69% (yoy) pada triwulan I 2016, menjadi 17,75% (yoy) pada triwulan II 2016. Membaiknya kinerja industri kimia diantaranya merupakan dampak dari pergerakan nilai tukar yang relatif stabil dan harga minyak dunia sebagai bahan baku yang masih berada di level rendah. Selain itu, ekspansi industri kimia di hulu pada awal tahun mendorong produksi kimia meningkat dan memberikan nilai tambah di sektor industri kimia hilir.

Perkembangan industri baja pada triwulan II 2016 juga menunjukkan adanya perbaikan yang didorong oleh meningkatnya permintaan dalam negeri seiring bergulirnya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah dan bertambahnya konsumen baru. Produksi industri baja pada manufaktur besar dan sedang juga tercatat meningkat pada level positif 3,42% (yoy) sejalan dengan indeks produksi baja yang juga tercatat meningkat. Penjualan ekspor industri baja juga menunjukkan peningkatan yang utamanya ditujukan ke negara Tiongkok dan Malaysia.



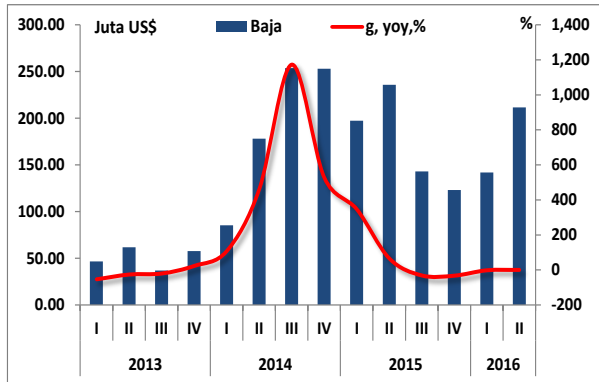
Sumber : Bea Cukai, diolah

Grafik I.26. Nilai Ekspor Kimia



Sumber : Produsen Baja, diolah

Grafik I.27. Indeks Produksi Baja Banten

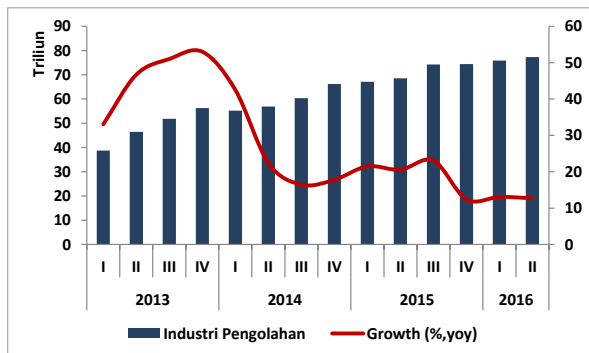


Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.28. Nilai Ekspor Baja

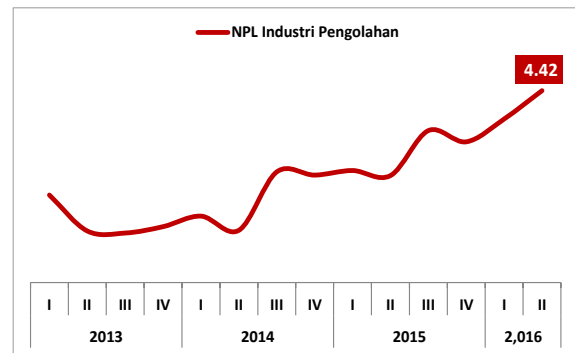
Sejalan dengan kebutuhan rumah tangga pada bulan Ramadhan yang utamanya merupakan barang primer, perkembangan industri makanan minuman pada triwulan II menunjukkan peningkatan. Upaya pelaku usaha dalam menerapkan strategi pemasaran melalui evaluasi dan sistem distribusi yang rapat dengan memperbanyak distributor, promosi yang gencar ditengah daya beli masyarakat yang membaik mendorong permintaan makanan minuman mengalami kenaikan.

Melambatnya industri pengolahan di triwulan II 2016 juga diiringi oleh perlambatan yang terjadi pada penyaluran kredit ke lapangan usaha industri pengolahan. Kredit korporasi ke industri pengolahan tumbuh 12,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit triwulan I 2016 yang tercatat 13,08% (yoy). Demikian pula yang terjadi pada risiko kredit, dimana terjadi kenaikan dari sebelumnya 3,76% pada triwulan I 2016 menjadi 4,42% pada triwulan II 2016.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik I.29. Kredit Korporasi Industri Pengolahan Lokasi Proyek di Banten



Sumber: Bank Indonesia

Grafik I.30. NPL Korporasi Sektor Industri Pengolahan Lokasi Proyek di Banten

Perkembangan kinerja industri pengolahan pada triwulan III 2016 diperkirakan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan realisasi proyek pemerintah yang semakin terakselerasi sehingga mendorong permintaan domestik pada industri pengolahan di Provinsi Banten khususnya pada subkategori pendukung bahan bangunan seperti baja dan semen. Pada

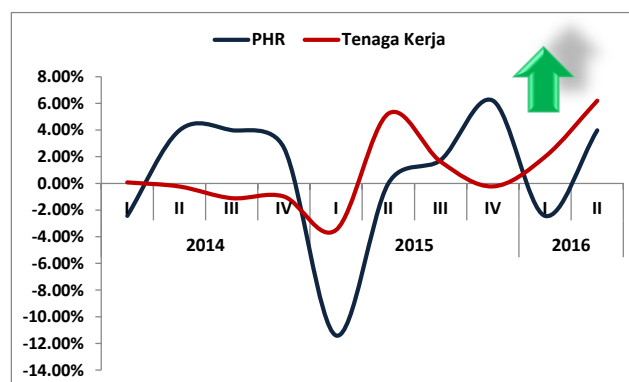
subkategori kimia juga terindikasi adanya beberapa jenis investasi yang sifatnya mendukung penciptaan bahan baku guna mendorong efisiensi dan daya saing industri.

Pada subkategori pakaian jadi dan alas kaki diperkirakan akan mengalami peningkatan khususnya pada pasar ekspor sejalan dengan kebutuhan musim panas di negara tujuan. Demikian pula yang terjadi pada industri makanan minuman yang diperkirakan tumbuh stabil ditopang permintaan domestik. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam memberlakukan *tax amnesty* juga diharapkan dapat menjadi pendorong masuknya investasi pada lapangan usaha konstruksi dan *real estate* sehingga memiliki *multiplier effect* terhadap perkembangan industri pengolahan yang terkait.

1.2.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 3,91% (yoy) pada triwulan II 2016, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2016 yang tercatat 3,88% (yoy). Meningkatnya kinerja perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan II 2016 merupakan pola musiman yang terjadi setiap tahunnya memasuki bulan Ramadhan. Tingginya kebutuhan rumah tangga memasuki bulan Ramadhan, mendorong tumbuhnya konsumsi yang kemudian berpotensi memicu berkembangnya lapangan usaha perdagangan.

Meningkatnya kinerja lapangan usaha perdagangan di triwulan II 2016 juga tercermin dalam realisasi kegiatan usaha pada SKDU yang menunjukkan kenaikan. Tingginya arus perdagangan pada momentum Hari Raya berdampak pada penggunaan tenaga kerja yang juga tercatat terserap lebih tinggi.



Sumber: SKDU - Bank Indonesia

Grafik I.31. Realisasi Usaha dan Tenaga Kerja

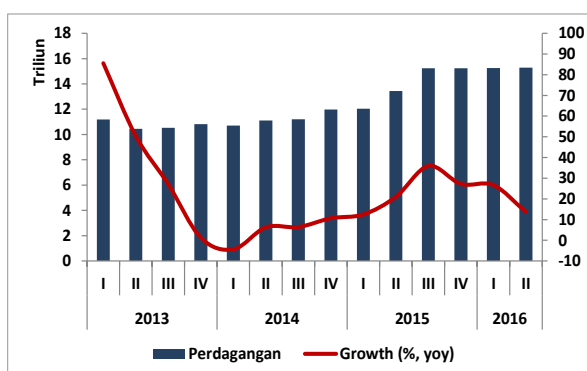
Dalam struktur perekonomian Provinsi Banten, subkategori perdagangan besar dan eceran memiliki pangsa 86% dari total sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Oleh sebab itu, perkembangan pada subkategori perdagangan besar dan eceran sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Hal ini juga diperkuat

oleh karakteristik Provinsi Banten khususnya bagian Utara yang merupakan daerah penyangga DKI Jakarta menyebabkan pendapatan masyarakat relatif tinggi dan berdampak pada kuatnya konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan hasil liaison, meskipun terjadi peningkatan penjualan pada triwulan II 2016 dibandingkan triwulan I 2016, namun peningkatannya tidak setinggi pada periode yang sama tahun 2015. Hal tersebut merupakan dampak dari beralihnya kebiasaan masyarakat untuk belanja *online*. Melihat kondisi tersebut, pelaku usaha melakukan strategi untuk menjual produknya secara *online* dengan bekerjasama dengan beberapa toko *online*.

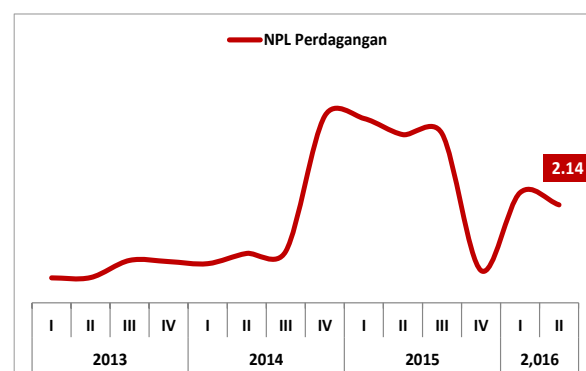
Hasil liaison juga menyebutkan adanya peningkatan penjualan pada jenis barang-barang elektronik dan *spare part* kendaraan. Membaiknya penjualan pada kendaraan bermotor menjadi salah satu cerminan tumbuhnya lapangan usaha perdagangan. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan kendaraan roda empat telah mencatatkan adanya kenaikan penjualan domestik sebesar 7,6% (yoy), begitu pula dengan penjualan ekspor yang tumbuh 1,9% (yoy). Adapun jenis kendaraan roda empat yang mendorong tingginya penjualan pada triwulan II 2016 adalah jenis mobil *low cost green car* (LCGC)

Penyaluran kredit ke lapangan usaha perdagangan besar dan eceran pada triwulan II 2016 justru mengalami perlambatan dari sebelumnya tumbuh 26,66% (yoy) di triwulan I 2016, menjadi 13,68% (yoy) di triwulan II 2016. Turunnya suku bunga kredit pada lapangan usaha perdagangan belum mampu mendorong penyaluran kredit untuk tumbuh lebih tinggi. Meskipun demikian, risiko kredit lapangan usaha perdagangan menunjukkan penurunan yang mengindikasikan kondisi lapangan usaha perdagangan yang masih sehat..



Sumber: Bank Indonesia

Grafik I.32. Kredit Korporasi Perdagangan Besar & Eceran Lokasi Proyek di Banten



Sumber: Bank Indonesia

Grafik I.33. NPL Korporasi Perdagangan Besar & Eceran Lokasi Proyek di Banten

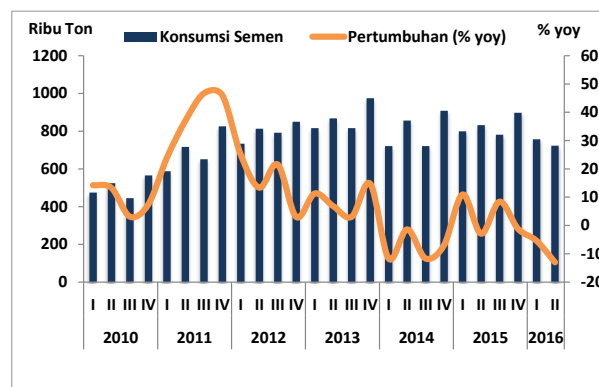
Perkembangan kinerja lapangan usaha perdagangan pada triwulan III 2016 diperkirakan sedikit melambat seiring dengan pola konsumsi masyarakat yang telah mencapai puncaknya pada triwulan II 2016. Perdagangan antar negara atau ekspor impor diperkirakan masih tumbuh

terbatas ditengah risiko perlambatan negara mitra dagang. Sementara perdagangan antar daerah diperkirakan meningkat seiring dengan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang lebih tinggi. Realisasi proyek yang diharapkan terakselerasi pada triwulan III 2016 diharapkan dapat menjadi penopang tumbuhnya lapangan usaha perdagangan.

1.2.3. Konstruksi

Kinerja lapangan usaha konstruksi pada triwulan II 2016 mengalami perlambatan dari sebelumnya tumbuh 5,76% (yoy) pada triwulan I 2016, menjadi 4,25% (yoy). Melambatnya kinerja lapangan usaha konstruksi pada triwulan II 2016 merupakan dampak dari belum optimalnya realisasi investasi di Provinsi Banten khususnya yang dilakukan pemerintah. Hal ini terlihat dari belanja modal yang hanya terealisasi sebesar 19% dari total pagu anggaran. Sementara itu pembangunan proyek swasta pada triwulan II 2016 lebih didominasi oleh pembangunan pabrik yang bersifat *multiyears*.

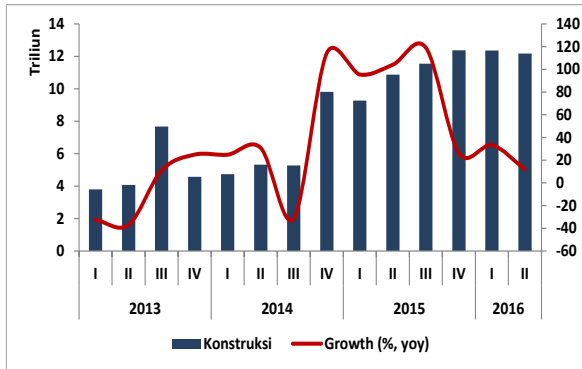
Pelaku usaha pada triwulan II 2016 masih belum banyak melakukan investasi baru mengingat kondisi penjualan yang masih belum stabil. Mereka cenderung menunggu hingga semester II 2016 untuk memutuskan investasi apa yang akan dilakukan pada tahun 2016 setelah ada kepastian dari pemerintah terkait insentif yang diperoleh pelaku usaha. Perlambatan yang terjadi pada lapangan usaha konstruksi juga tercermin dari konsumsi semen yang menunjukkan penurunan yang semakin dalam.



Sumber: ASI

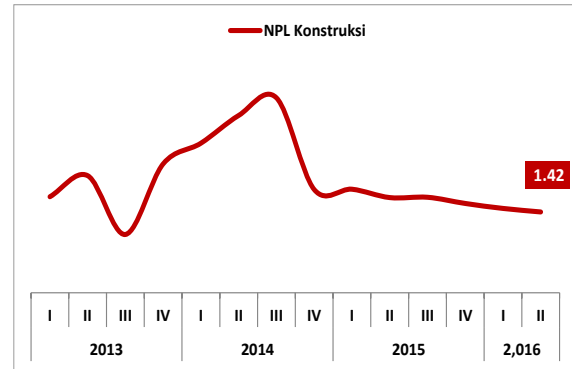
Grafik I.34. Konsumsi Semen

Perlambatan yang terjadi pada lapangan usaha konstruksi sejalan dengan pertumbuhan penyaluran kredit ke lapangan usaha konstruksi yang mengalami perlambatan dari sebelumnya 33,35% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi 12,02% (yoy) pada triwulan II 2016. Meskipun demikian, risiko kredit masih terjaga rendah di level 1,42% pada triwulan II 2016..



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.35. Kredit Korporasi Konstruksi Lokasi Proyek di Banten



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.36. NPL Korporasi Kpnstruksi Lokasi Proyek di Banten

Kinerja lapangan usaha konstruksi pada triwulan III 2016 diperkirakan tumbuh lebih kuat seiring dengan percepatan realisasi proyek pemerintah. Selain itu, optimisme pelaku usaha pada perekonomian di semester II 2016 juga mendorong masuknya investasi baru. Di samping itu, kelanjutan proyek-proyek *multiyears* swasta juga masih banyak berlangsung pada triwulan III 2016. Membbaiknya sektor properti juga diperkirakan mendorong berkembangnya lapangan usaha konstruksi.

1.2.4. Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada triwulan II 2016 tumbuh 7,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan 9,16% (yoy) pada triwulan I 2016. Pada lapangan usaha tersebut, pertumbuhan lebih didominasi oleh subkategori pergudangan. Perlambatan yang terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan merupakan dampak dari kinerja industri pengolahan yang belum kuat. Hal ini mencerminkan karakteristik Provinsi Banten yang perekonomiannya didominasi oleh industri pengolahan dimana perkembangannya memberikan pengaruh terhadap lapangan usaha lainnya tidak hanya perdagangan, namun juga berpengaruh terhadap kinerja jasa pergudangan.

Pada subkategori transportasi, kinerja subkategori ditopang oleh permintaan yang meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri dan libur sekolah. Hal ini tercermin dari kenaikan harga pada komoditas angkutan yang menjadi komoditas penyumbang inflasi triwulan II 2016. Meningkatnya harga jual pada lapangan usaha transportasi merupakan pola musiman yang terjadi setiap tahunnya dan akan kembali normal paska momentum Hari Raya selesai.

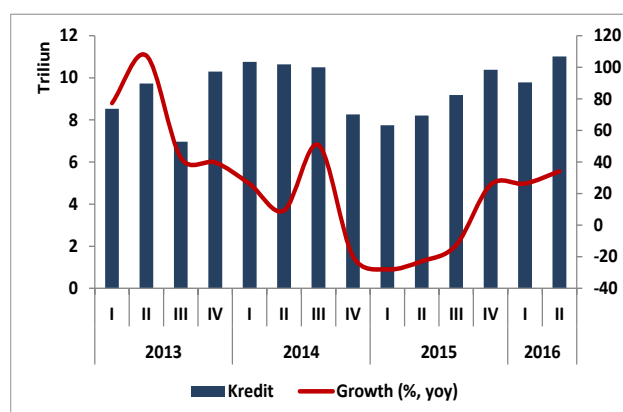
Perkembangan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada triwulan III 2016 diperkirakan mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya permintaan pada industri pengolahan yang mendorong kebutuhan jasa transportasi dan pergudangan. Selain itu, perluasan pabrik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan *heavy industry* dalam rangka

mendorong produksi tahun 2016 juga mendorong permintaan jumlah gudang di Provinsi Banten.

1.2.5. Real Estate

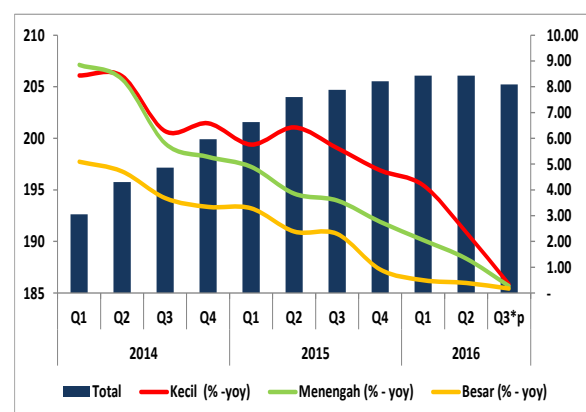
Kinerja lapangan usaha real estate pada triwulan II 2016 tumbuh 7,57% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2016 yang tumbuh 7,21% (yoy). Meningkatnya lapangan usaha *real estate* merupakan hasil dari upaya pelaku usaha dalam menghasilkan diversifikasi produk dengan harga yang lebih terjangkau. Peningkatan kinerja lapangan usaha real estate sejalan dengan tingkat kebutuhan hunian yang semakin tinggi. Pada beberapa wilayah di Provinsi Banten yang berpotensi tumbuh seiring dengan masuknya transportasi publik, pelaku usaha melakukan pengembangan terhadap rumah hunian.

Sejalan dengan kinerja lapangan usaha *real estate* yang tumbuh lebih tinggi, penyaluran kredit ke lapangan usaha *real estate* juga menunjukkan peningkatan. Kredit tumbuh 34,13% (yoy) pada triwulan II 2016, meningkat dibandingkan pertumbuhan kredit pada triwulan I 2016 yang tercatat 26,35% (yoy). Pada jenis kredit rumah tangga, pertumbuhan kredit KPR/KPA/Ruko juga mengalami kenaikan dari sebelumnya 9,35% (yoy) pada triwulan I 2016, menjadi 12,66% (yoy) pada triwulan II 2016. Kinerja lapangan usaha *real estate* yang meningkat pada triwulan II 2016 sejalan dengan perlambatan kenaikan harga pada ketiga tipe properti residensial tipe kecil, sedang, dan besar.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik I.37. Kredit Real Estate



Sumber: Bank Indonesia

Grafik I.38. Pertumbuhan Harga Residensial Jabodebek-Banten

Perkembangan kinerja lapangan usaha *real estate* pada triwulan III 2016 diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan optimisme pelaku usaha bahwa akan ada akselerasi penjualan di semester II 2016. Membaiknya kondisi perekonomian domestik diperkirakan mendorong permintaan pada lapangan usaha properti. Selain itu, upaya pemerintah dalam mendorong penjualan sejuta rumah melalui tiga skema subsidi yaitu Fasilitas Likuiditas

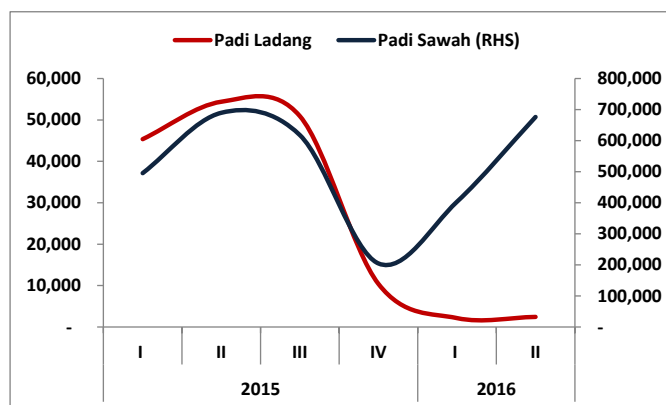
Pembiayaan Perumahan (FLPP), Selisih Suku Bunga (SSB), dan Bantuan Uang Muka (BUM) diharapkan mampu mendorong kemampuan masyarakat untuk membeli rumah.

Penjualan produk *real estate* di Provinsi Banten masih ditopang oleh segmen residensial dengan jenis produk rumah tapak. Dalam mendorong penjualan di semester II 2016, pelaku usaha melakukan diversifikasi produk dengan meluncurkan jenis properti dengan harga yang lebih terjangkau. Berdasarkan hasil liaison, pelaku usaha di lapangan usaha *real estate* akan melihat perkembangan dampak paket kebijakan fiskal khususnya yang mendorong tumbuhnya lapangan usaha properti sebelum merealisasikan investasi yang sempat tertunda di awal tahun akibat lemahnya permintaan.

1.2.6. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Perkembangan kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada triwulan II 2016 tumbuh 2,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2016 yang tercatat 0,53% (yoy). Meningkatnya kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ditopang oleh panen raya yang masih berlangsung pada triwulan II 2016. Meningkatnya realisasi kegiatan usaha pertanian juga tercermin dalam SKDU yang mengalami kenaikan dari sebelumnya 0% (SBT) menjadi 11,6% (SBT) ditopang oleh meningkatnya produksi tanaman pangan.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten guna mencapai target 3 juta ton gabah kering giling (GKG) hingga tahun 2017. Para petani memperoleh bantuan penyaluran bibit unggul, pupuk, pestisida, dan peralatan petani lainnya seperti traktor dan mesin perontok padi. Selain itu, perbaikan saluran irigasi dan pompanisasi juga sudah dilakukan. Oleh sebab itu, sampai dengan saat ini terdapat 7000 kelompok tani yang bekerja keras dalam meningkatkan produktifitas pangan. Indeks pertanaman (IP) di Provinsi Banten juga ditingkatkan dari dua kali musim tanam menjadi tiga kali musim tanam.



Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Banten

Grafik I.39. Pertumbuhan Produksi Padi

Perkembangan kinerja pertanian pada triwulan III 2016 diperkirakan tumbuh positif. Wilayah Lebak yang merupakan penghasil padi di Provinsi Banten akan memasuki musim panen pada bulan Agustus – September 2016 dengan luas panen mencapai 20 hektar. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca dua bulan ke depan akan memasuki musim penghujan dengan kapasitasnya sedang dan ringan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak akan mendorong petani untuk mengolah lahan sehingga musim panen dapat dipercepat dan produksi tidak mengalami gangguan. Panen pada triwulan III 2016 juga diperkirakan minim hama sehingga akan menguntungkan petani.

BAB II. KEUANGAN PEMERINTAH

Pada triwulan II 2016, realisasi anggaran pemerintah Provinsi Banten secara umum meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2015 khususnya pada komponen belanja daerah. Di sisi pendapatan daerah, ketiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah terealisasi lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Pada sisi belanja, kedua komponen belanja juga menunjukkan realisasi yang lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Belanja tidak langsung masih menjadi penopang terealisasinya belanja daerah di triwulan II 2016. Sementara belanja langsung baru terealisasi 27% ditengah tantangan proses pengadaan yang masih cukup tinggi.

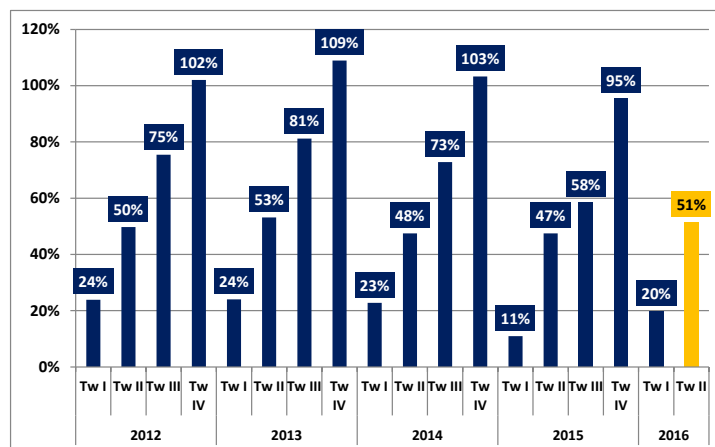
Tabel II. 1. Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Banten (Rp juta)

	2015	S.D. TW II-2015		2016	S.D. TW II-2016	
	APBD-P	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
Pendapatan Asli Daerah	5,133,482	2,346,051	46%	5,242,330	2,514,132	48%
Dana Perimbangan	1,122,954	590,784	53%	2,757,558	1,599,050	58%
Lain-lain pendapatan yang sah	1,388,198	690,266	50%	5,400	3,550	66%
Total Pendapatan Daerah	7,644,634	3,627,101	47%	8,005,287	4,116,732	51%
Belanja Tidak Langsung	4,927,482	1,635,900	33%	5,201,735	2,698,925	52%
Belanja Langsung	4,020,152	713,262	18%	3,609,342	984,999	27%
Total Belanja Daerah	8,947,634	2,349,162	26%	8,811,077	3,683,923	42%
Surplus / (Defisit)	(1,303,000)	1,277,939		(805,789)	432,809	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1,325,000	1,907,994	144%	878,289	-	0%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	1,325,000	1,907,994	144%	878,289	-	0%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	22,000	22,000	100%	72,500	-	0%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22,000	22,000	100%	72,500	-	0%
Pembiayaan Netto	1,303,000	1,885,994	145%	805,789	-	0%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	-	3,163,933		-	432,809	

Sumber: DPPKD Provinsi Banten

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Pemerintah Provinsi Banten sampai dengan triwulan II 2016 telah terserap sebesar Rp4,11 triliun atau terhitung 51% dari total pendapatan yang ditargetkan. Penyerapan pendapatan tersebut ditopang oleh realisasi pada triwulan II 2016 sebesar 32%, setelah sebelumnya hanya terealisasi 20% pada triwulan I 2016. Penyerapan ini juga tercatat lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2015 yang tercatat 47%. Adapun komponen yang mendorong tingginya pendapatan Pemerintah Provinsi Banten pada triwulan II 2016 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utamanya berasal dari pendapatan pajak daerah.



Sumber: DPPKD Provinsi Banten, diolah

Grafik II.1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Banten

Pada grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 sejak triwulan I, terlihat akselerasi penyerapan pendapatan daerah yang pada tahun 2015 sempat mengalami perlambatan atau tidak terserap optimal. Upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong penyerapan pendapatan salah satunya adalah melalui pelaksanaan gerai samsat di tempat publik. Keberadaan gerai samsat yang semakin tersebar mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sehingga potensi pendapatan daerah akan semakin besar. Kegiatan tersebut menjadi salah satu pendorong tingginya penyerapan pajak pada triwulan II 2016.

Tabel II.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Banten per Komponen (Rp juta)

URAIAN	2015	S.D. TW II-2015		2016	S.D. TW II-2016	
	APBD-P	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
Pajak Daerah	4,944,468	2,202,798	45%	4,985,942	2,369,878	48%
Retribusi Daerah	41,827	17,054	41%	52,629	32,755	62%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	40,900	42,400	104%	42,425	49,973	118%
Lain-lain PAD	106,288	83,799	79%	161,334	61,525	38%
Pendapatan Asli Daerah	5,133,482	2,346,051	46%	5,242,330	2,514,132	48%
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	460,986	210,466	46%	526,279	262,446	50%
Dana Alokasi Umum	640,981	374,022	58%	693,447	346,724	50%
Dana Alokasi Khusus	20,986	6,296	30%	1,537,832	989,880	64%
Dana Perimbangan	1,122,954	590,784	53%	2,757,558	1,599,050	58%
Pendapatan Hibah	5,400	437	8%	5,400	2,740	51%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,382,798	687,491	50%	-	-	
Pendapatan Lainnya	-	2,338		-	811	
Lain-lain Pendapatan	1,388,198	690,266	50%	5,400	3,550	66%
Total Pendapatan	7,644,634	3,627,101	47%	8,005,287	4,116,732	51%

Sumber: DPPKD Provinsi Banten

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen terbesar pada pendapatan daerah Provinsi Banten mampu terserap Rp2,51 triliun atau 48% dari total target PAD lebih tinggi dari penyerapan pada periode yang sama tahun 2015 yaitu 46%. Komponen Dana Perimbangan juga mampu terserap lebih tinggi yaitu 58% dibandingkan tahun 2015 yang terserap sebesar 53%. Sementara itu lain-lain pendapatan mampu terserap 51% dari target yang dianggarkan didorong oleh pendapatan hibah.

Peningkatan PAD terutama didorong oleh lebih tingginya penyerapan pajak daerah yang merupakan subkomponen yang memiliki kontribusi terbesar yaitu 95% dari PAD Provinsi Banten. Pajak daerah mampu terserap Rp2,37 triliun atau sebesar 48% dari target, lebih besar dari periode yang sama tahun 2015 yaitu 45%. Sementara itu, subkomponen terbesar dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) terserap sebesar Rp989,9 miliar atau mencapai 64% dari target, sehingga turut mendorong pendapatan Pemerintah Provinsi Banten.

Tabel II.3 Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Banten (Rp juta)

Jenis Pajak	APBD	I 2016	%	II 2016	%
Pajak kendaraan bermotor	1,697,220	276,894	16%	908,398	54%
Bea balik nama kendaraan bermotor	1,942,200	304,432	16%	986,584	51%
Pajak air permukaan	30,500	4,653	15%	15,931	52%
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	786,022	133,860	17%	378,398	48%
Pajak Rokok	530,000	80,568	15%	80,568	15%
Total	4,985,942	800,407	16%	2,369,878	48%

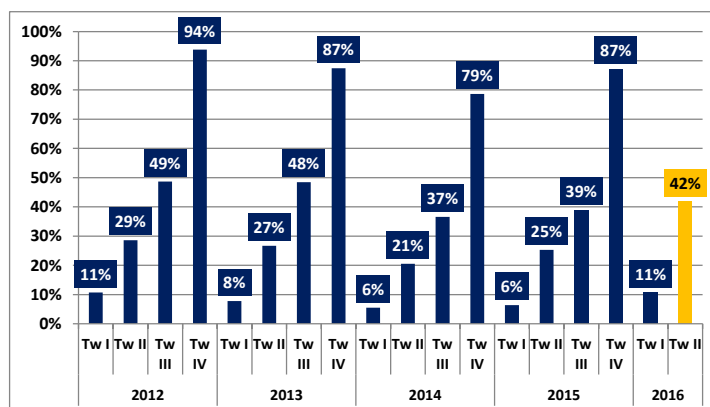
Sumber: DPPKD Provinsi Banten

Pada komponen pajak daerah, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki pangsa terbesar dengan realisasi sampai dengan triwulan II 2016 masing-masing sebesar 54% dan 51%. Peningkatan penyerapan pajak daerah cukup signifikan dari sebelumnya hanya terealisasi 16% pada triwulan I 2016, mampu terealisasi hingga 48% pada triwulan II 2016 sehingga mendorong total penyerapan pendapatan daerah.

Dalam rangka mendorong pendapatan pajak daerah, Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan perluasan gerai samsat di tempat publik seperti pada pusat perbelanjaan khususnya di wilayah Tangerang Raya, pelayanan *mobile* pajak kendaraan bermotor, informasi pajak kendaraan bermotor melalui *short message service* (sms), sistem pembayaran pajak online dan fasilitas penunjang pelayanan bagi wajib pajak. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga menerbitkan Peraturan Gubernur mengenai pembebasan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB bagi kendaraan mutasi masuk dari luar daerah atas nama perusahaan atau badan usaha.

2.2. BELANJA DAERAH

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Banten sampai dengan triwulan II 2016 adalah sebesar Rp3,68 triliun atau 42% dari total belanja yang ditargetkan. Realisasi belanja tersebut ditopang oleh realisasi pada triwulan II 2016 sebesar 31%, setelah sebelumnya hanya mencapai 11% pada triwulan I 2016. Realisasi belanja pada periode ini juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015 yang hanya mencapai 26%. Adapun komponen yang mendorong tingginya realisasi belanja Pemerintah Provinsi Banten pada triwulan II 2016 adalah belanja tidak langsung yang utamanya berasal dari realisasi belanja hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).



Sumber: DPPKD Provinsi Banten

Grafik II.2 – Perkembangan Realisasi Belanja Daerah terhadap APBD Provinsi Banten

Pada grafik di atas terlihat bahwa realisasi belanja pada tahun 2016 juga mengalami akselerasi seperti yang terjadi pada penyerapan pendapatan Pemerintah Provinsi. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong percepatan realisasi anggaran sehingga pada akhir tahun diharapkan anggaran dapat terealisasi optimal sesuai dengan kebutuhan daerah yang telah direncanakan. Meskipun demikian, masih terdapat hal-hal yang menjadi tantangan pemerintah daerah khususnya terkait pengadaan seperti pembebasan lahan dan jumlah tenaga ahli bersertifikasi pengadaan. Hal-hal tersebut harus segera ditangani guna pencapaian target belanja yang ditetapkan hingga akhir tahun.

Tabel II.4. Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Banten (Rp juta)

URAIAN	2015	S.D. TW II-2015		2016	S.D. TW II-2016	
	APBD-P	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
Belanja Pegawai	567,567	252,276	44%	651,529	307,973	47%
Belanja Hibah	1,544,470	781,314	51%	1,847,839	1,305,764	71%
Belanja Bantuan Sosial	136,250	35,720	26%	152,040	39,221	26%
Belanja Bagi Hasil	2,041,147	479,606	23%	1,978,573	840,181	42%
Belanja Bantuan Keuangan	659,210	86,984	13%	536,755	205,686	38%
Belanja Tidak Terduga	32,209	-	0%	35,000	99	0%
Belanja Tidak Langsung	4,980,853	1,635,900	33%	5,201,735	2,698,925	52%
Belanja Pegawai	172,548	43,893	25%	159,567	50,091	31%
Belanja Barang dan Jasa	1,991,961	383,111	19%	1,719,250	611,775	36%
Belanja Modal	1,855,643	286,258	15%	1,730,525	323,133	19%
Belanja Langsung	4,020,152	713,262	18%	3,609,342	984,999	27%
Total Belanja	9,001,005	2,349,162	26%	8,811,077	3,683,923	42%

Sumber: DPPKD Provinsi Banten

Secara umum, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Banten triwulan II 2016 masih ditopang belanja tidak langsung dengan realisasi sebesar Rp2,70 triliun atau terhitung 52% dari total target belanja tidak langsung. Salah satu komponen terbesar pada belanja tidak langsung yaitu belanja hibah, sampai dengan triwulan II 2016 terealisasi hingga 71%, lebih tinggi dari realisasi di periode yang sama tahun 2015 yaitu 51%. Komponen terbesar lainnya yaitu belanja bagi hasil telah terealisasi sebesar 42%.

Perkembangan belanja pegawai pada belanja tidak langsung tercatat terealisasi sebesar 47% ditopang oleh belanja gaji PNS khususnya pencairan gaji ke-14 pada bulan Juni 2016. Sementara perkembangan belanja pegawai pada belanja langsung hanya terserap 31% yang sebagian besar digunakan untuk honorarium PNS dan non PNS.

Pada belanja langsung yang merupakan indikator realisasi pembangunan proyek pemerintah, baru terealisasi sebesar 27% dari target, meskipun lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2015 yang hanya terserap 18%. Masih rendahnya realisasi belanja langsung disebabkan oleh belum optimalnya realisasi dua komponen terbesar yaitu belanja barang dan jasa serta belanja modal, masing-masing hanya terealisasi sebesar 36% dan 19% dari total belanja yang ditargetkan.

Tabel II.5. Realisasi Belanja Hibah (Rp juta)

Komponen	APBD	II 2016	%
Belanja hibah kepada Pemerintah	281,000	259,294	92%
Belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	184,558	97,661	53%
Belanja hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar	1,382,281	948,809	69%
Total	1,847,839	1,305,764	71%

Sumber: DPPKD Provinsi Banten

Pada komponen belanja hibah, realisasi belanja yang terbesar berasal dari belanja hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada satuan tingkat pendidikan dasar. Total anggaran untuk BOS di Provinsi Banten pada tahun 2016 mencapai Rp1,3 triliun dan sampai dengan triwulan II 2016 telah terealisasi sebesar Rp948 miliar atau sebesar 69%. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disebarkan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Komponen lainnya seperti belanja hibah kepada pemerintah dan organisasi kemasyarakatan juga telah terealisasi optimal sampai dengan triwulan II 2016 yang mencapai 92% dari target.

Tabel II.6 Penyerapan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Banten (Rp juta)

Belanja Modal	APBD	II 2016	%
Pengadaan Tanah	244,787	20,839	9%
Belanja Peralatan Barang dan Mesin	312,545	64,073	21%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	305,923	13,918	5%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	810,226	219,877	27%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35,965	1,333	4%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,213	2,908	35%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12,424	177	1%
Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Software	442	8	2%
Total	1,730,525	323,133	19%

Sumber: DPPKD Provinsi Banten

Komponen belanja langsung yang menjadi perhatian terkait realisasi proyek pemerintah adalah belanja modal. Sampai dengan triwulan II 2016, realisasi belanja modal Pemerintah Provinsi Banten baru mencapai 19% dari target belanja modal yang telah ditetapkan. Adapun realisasi terbesar belanja modal berasal dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp220 miliar. Realisasi belanja modal terkait proyek infrastruktur dilakukan oleh sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) seperti Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman. Sementara itu, belanja modal pengadaan tanah tercatat masih sangat rendah akibat tantangan yang dimiliki Pemerintah Daerah terkait pembebasan lahan pada beberapa proyek yang direncanakan.

BAB III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Secara umum, tingkat harga di Provinsi Banten pada triwulan II 2016 mencapai 3,77% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I 2016 sebesar 5,70% (yoy). Tekanan inflasi berkurang pada triwulan II 2016 didorong oleh penurunan harga kelompok bahan makanan atau komponen *volatile food* khususnya cabai merah, bawang merah, daging ayam ras dan beras. Pengeluaran masyarakat untuk barang yang harganya diatur pemerintah atau *administered prices* seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), angkutan dalam kota dan tarif listrik juga mengalami penurunan. Sementara itu, tekanan inflasi dari komponen inti juga berkurang dibandingkan triwulan lalu seperti yang terjadi pada komoditas makanan jadi, upah pembantu rumah tangga dan biaya tempat tinggal.

Secara spasial, inflasi di Kota Cilegon lebih tinggi dari kota lainnya yaitu Kota Tangerang dan Kota Serang. Inflasi Kota Cilegon pada triwulan II 2016 mencapai 4,68% (yoy), sementara Kota Tangerang dan Kota Serang mengalami inflasi masing-masing sebesar 3,49% (yoy) dan 4,41% (yoy).

3.1. KONDISI UMUM

Tingkat inflasi Provinsi Banten pada triwulan II-2016 mencapai 3,77% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I-2016 yaitu sebesar 5,70% (yoy). Tekanan inflasi berkurang pada triwulan II-2016 yang didorong oleh penurunan harga kelompok bahan makanan atau komponen *volatile food*⁶. Pergeseran musim panen dari triwulan I-2016 ke triwulan II-2016 mendorong penurunan harga bumbu-bumbuan seperti cabai merah dan bawang merah. Di sisi lain, faktor eksternal berupa pelemahan harga minyak bumi secara global berpengaruh terhadap penurunan Bahan Bakar Minyak (BBM), angkutan dalam kota dan tarif listrik pada komponen *administered prices*⁷.

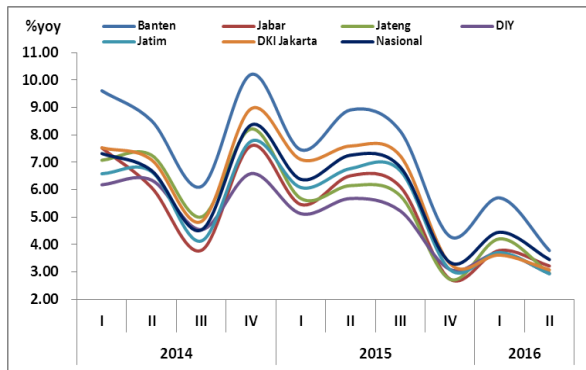
Meskipun demikian, secara spasial inflasi Provinsi Banten masih lebih tinggi dari nasional dan merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa. Relatif tingginya inflasi di Banten terutama dipengaruhi oleh inflasi inti akibat peningkatan permintaan masyarakat yang terjadi sebagai daerah industri dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat. Inflasi *core* atau yang biasa disebut sebagai inflasi inti⁸ Provinsi Banten berada pada kisaran 5-6% (yoy) setiap tahunnya yang terutama disebabkan oleh tingginya harga sewa rumah dan harga makanan jadi.

⁶ *Volatile Food* adalah kategori bahan makanan yang harganya berfluktuasi.

⁷ *Administered Prices* adalah kategori barang yang harganya diatur oleh pemerintah

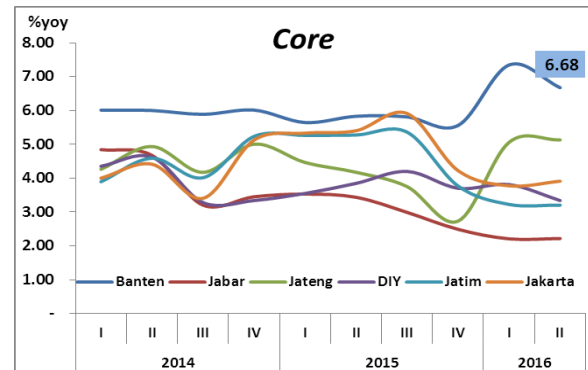
⁸ *Core/Inti* adalah kategori barang/jasa yang pergerakan harganya cenderung tetap dan persisten

Sedangkan untuk inflasi *administered prices* meskipun saat ini dalam tren menurun akibat penurunan harga bensin, namun peningkatan inflasi dari tarif angkutan udara dan antar kota di Banten masih lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Di sisi lain, tingkat inflasi Provinsi Banten pada komponen *volatile food* lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada ketersediaan dan distribusi harga komoditas *volatile food*.



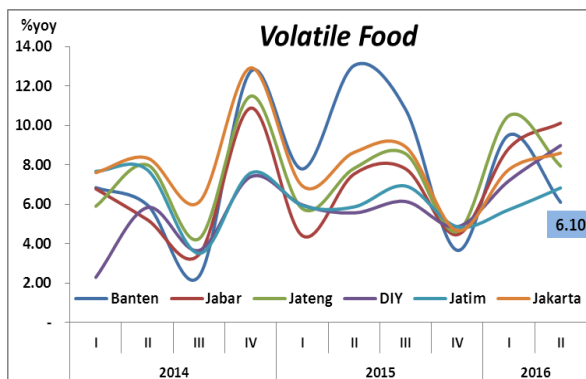
Sumber : BPS, diolah

Grafik III.1. Inflasi per Provinsi di Pulau Jawa (yoy)



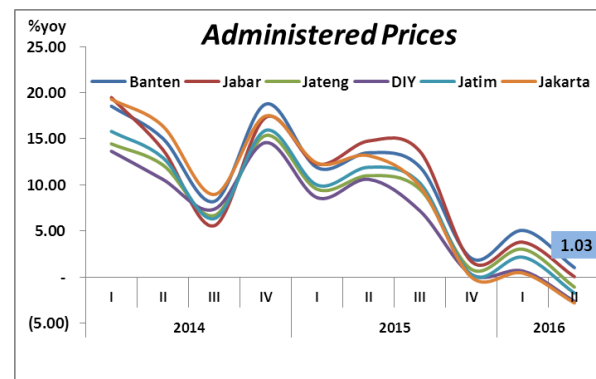
Sumber : BPS, diolah

Grafik III.2. Inflasi Inti per Provinsi (yoy)



Sumber : BPS, diolah

Grafik III.3. Inflasi *Volatile food* Per Provinsi (yoy)



Sumber : BPS, diolah

Grafik III.4. Inflasi *Administered Prices* per Provinsi

3.2. INFLASI BULANAN (% *month to month*)

Rata-rata inflasi bulanan Provinsi Banten selama triwulan II-2016 mencapai 0,06% (mtm), lebih rendah dibandingkan rata-rata pada triwulan II-2015 yaitu 0,68% (mtm). Hal ini disebabkan inflasi bahan makanan (bumbu-bumbuan) lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat terjadinya pergeseran musim panen yang biasanya terjadi di bulan Maret menjadi bulan April 2016. Selain itu, komoditas energi seperti tarif listrik, gas, dan tarif angkutan transportasi pada triwulan II-2016 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada bulan Juni 2016, inflasi di Provinsi Banten cukup terkendali di tingkat 0,55% (mtm). Meskipun lebih tinggi dari bulan Mei 2016 yang tercatat 0,29% (mtm), tingkat inflasi pada bulan Juni yang bertepatan dengan bulan Ramadhan relatif stabil dibandingkan bulan Juni

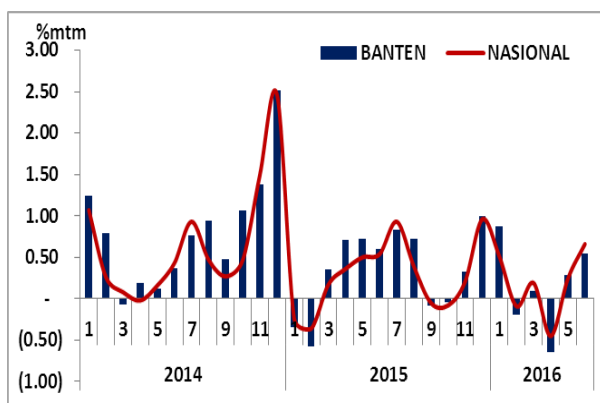
2015 yang mencapai 0,60% (mtm). Secara tahunan inflasi tercatat sebesar 3,78% (yoy) dan secara tahun kalender sebesar 0,97% (ytd).

Komponen *volatile food* mengalami peningkatan pada bulan Juni 2016 sebesar 1,60% (mtm), sebagai dampak dari tingginya permintaan bahan pangan pada bulan Ramadhan. Sementara itu komponen *administered prices* tercatat inflasi 0,50% (mtm) dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas transportasi, tarif listrik dan rokok. Di sisi lain, inflasi inti pada bulan Juni 2016 sebesar 0,15% (mtm), relatif stabil dibandingkan bulan Mei 2016 yaitu 0,14% (mtm). Adapun kelompok komoditas utama yang mendorong inflasi pada komponen inti adalah makanan jadi, sandang, dan perumahan.

Tabel III.1. Perkembangan Inflasi Bulanan

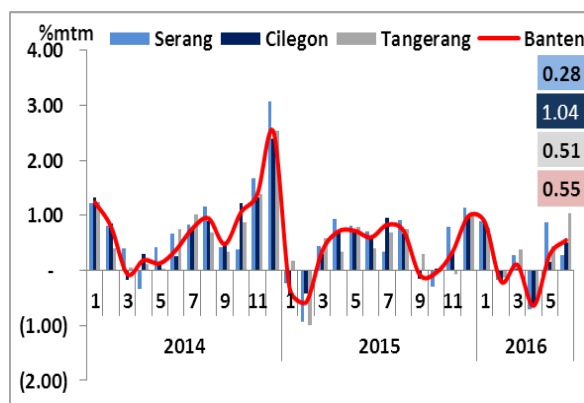
Kelompok Barang	Tw II - 2015				Tw II - 2016			
	April	Mei	Juni	Rata-rata	April	Mei	Juni	Rata-rata
Umum	0.71	0.72	0.60	0.68	(0.64)	0.29	0.55	0.06
Bahan Makanan	0.23	1.69	1.85	1.26	(1.21)	0.32	1.54	0.22
Makanan Jadi, Rokok & Tembakau	1.26	1.06	0.39	0.91	0.25	0.82	0.22	0.43
Perumahan, LGA	0.14	0.38	0.23	0.25	(0.33)	(0.06)	0.12	(0.09)
Sandang	(0.12)	0.60	0.37	0.28	0.30	(0.01)	0.46	0.25
Kesehatan	0.25	0.58	0.13	0.32	0.12	0.14	0.19	0.15
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0.25	(0.01)	0.03	0.09	0.01	0.01	0.03	0.02
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	2.12	0.08	0.31	0.84	(2.24)	0.31	(0.21)	(0.71)

Sumber : BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.5. Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Banten dan Nasional (% mtm)

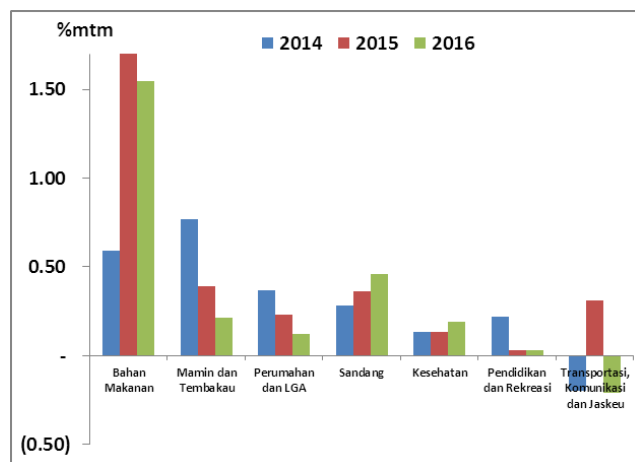


Sumber: BPS, diolah

Grafik III.6. Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Banten, Kota Serang, Cilegon dan Tangerang (% mtm)

Secara spasial, inflasi terjadi di ketiga kota sampel perhitungan inflasi yaitu Kota Tangerang sebesar 0,51% (mtm), Serang 0,28% (mtm) dan Cilegon sebesar 1,04% (mtm). Kota Cilegon menjadi kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Jawa. Secara umum komponen yang memberikan andil terhadap pembentukan inflasi pada Kota Tangerang dan Serang yaitu

komponen *volatile food* khususnya komoditas bahan pangan. Sementara inflasi yang terjadi di Kota Cilegon lebih dipengaruhi oleh komponen inti seperti makanan jadi dan sandang.



Sumber : BPS, diolah

Grafik III.7. Perkembangan Tingkat Inflasi per Sub Kelompok Barang Juni 2014-2016

Tabel. III.2. Komoditas Inflasi/Deflasi Juni 2016

Komoditas	Inflasi	Andil
Daging ayam ras	5.68	0.11
Telur ayam ras	11.01	0.10
Angkutan antar kota	7.94	0.08
Bayam	9.53	0.03
Jeruk	4.83	0.02
Komoditas	Deflasi	Andil
Bawang merah	(10.84)	(0.07)
Melon	(4.75)	(0.02)
Teri	(6.10)	(0.01)
Tomat buah	(12.93)	(0.01)
Baju kaos berkerah	(8.15)	(0.01)

Sumber : BPS, diolah

3.3. INFLASI TAHUNAN (%year on year atau yoy)

Inflasi Provinsi Banten pada triwulan II 2016 mencapai 3,77% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I-2016 sebesar 5,70% (yoy). Tingkat inflasi seluruh kelompok barang dan jasa lebih rendah pada periode laporan dengan penurunan paling besar terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Penurunan harga bahan makanan dipengaruhi oleh pergeseran musim panen sehingga pasokan beras dan tanaman hortikultura cukup terjaga pada triwulan II-2016. Tingkat harga bahan bakar minyak bumi yang semakin menurun pada triwulan II-2016 menyebabkan deflasi pada kelompok transportasi.

Di sisi lain, kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau masih memiliki kontribusi paling besar yang tercermin dari andil inflasi masing-masing kelompok tersebut. Tingkat inflasi untuk kedua kelompok ini mencapai kisaran 6% (yoy) yang berarti tingkat harga pada triwulan II 2016 lebih tinggi 6% dibandingkan triwulan II 2015. Penerapan cukai rokok secara bertahap mendorong inflasi rokok selalu terjadi setiap bulannya. Inflasi juga terjadi pada kelompok kesehatan mencapai 10,18%(yoy), sehingga turut memberikan andil inflasi yang cukup besar. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar masih stabil dengan tingkat inflasi yang berkisar 1,53%(yoy).

Di triwulan III-2016, tingkat inflasi diprediksi lebih rendah dibandingkan triwulan II-2016. Tingkat harga komponen *volatile food* cenderung lebih rendah dengan meningkatnya pasokan bahan pangan pada musim panen khususnya beras dan tanaman hortikultura. Komponen *administered price* seperti BBM, tarif listrik dan angkutan diperkirakan memberikan tekanan

inflasi yang cukup signifikan selama triwulan III 2016, meskipun sempat terkoreksi pada Agustus 2016. Kondisi ini sejalan dengan proyeksi harga komoditas minyak bumi global yang cenderung menguat. Tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh peningkatan harga rokok kretek seiring dengan pemberlakuan tarif progresif cukai rokok. Perayaan hari raya Idul Fitri juga diprediksi akan mendorong inflasi angkutan udara karena peningkatan permintaan. Sementara itu, komponen inflasi inti masih cenderung stabil dibandingkan triwulan II 2016 dipengaruhi oleh harga makanan jadi dan sewa rumah. Posisi hingga bulan Agustus, biaya pendidikan memberikan sumbangan inflasi dengan dimulainya tahun ajaran baru.

Tabel III.3. Inflasi Tahunan Provinsi Banten (%yoy)

Kelompok Barang Dan Jasa	2015						2016			
	II	Andil	III	Andil	IV	Andil	I	Andil	II	Andil
Umum	8,91	8,91	8,14	8,14	4,29	4,29	5,70	5,70	3,77	3,77
Bahan Makanan	12,67	2,68	10,56	2,25	3,82	0,83	9,49	2,04	6,14	1,34
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	12,07	2,31	9,24	1,80	8,18	1,57	8,21	1,61	6,69	1,32
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	7,72	1,75	5,70	1,29	4,55	1,01	2,57	0,58	1,53	0,34
Sandang	4,78	0,24	2,72	0,14	1,89	0,09	1,97	0,10	1,87	0,09
Kesehatan	5,95	0,33	12,37	0,68	12,81	0,68	10,74	0,59	10,18	0,55
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	4,26	0,38	6,11	0,54	6,04	0,51	4,50	0,39	4,27	0,36
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	7,18	1,27	8,42	1,46	(2,20)	(0,40)	2,45	0,42	(2,21)	(0,38)

Sumber : BPS, diolah

3.4. INFLASI MENURUT KOTA

Tabel III.4. Inflasi Per Kota Inflasi di Provinsi Banten

Wilayah	Inflasi Tahunan (YoY)				
	2015			2016	
	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II
Banten	8,91	8,14	4,29	5,70	3,77
Tangerang	8,85	8,11	4,28	5,62	3,49
Serang	9,63	8,34	4,67	6,52	4,41
Cilegon	8,41	8,08	3,94	5,23	4,68

Sumber : BPS, diolah

Secara umum, tekanan inflasi di seluruh kota perhitungan inflasi Provinsi Banten mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang lebih rendah pada triwulan II-2016 dibanding periode sebelumnya. Secara spasial, inflasi Kota Cilegon mencapai 4,41% (yoy), merupakan yang tertinggi dibandingkan Kota Tangerang (3,49%) dan Kota Serang (4,41%). Secara bulanan, inflasi terjadi di ketiga kota sampel perhitungan yaitu Kota Tangerang sebesar 0,51%(mtm), Serang sebesar 0,28%(mtm) dan Cilegon sebesar 1,04%(mtm). Dengan demikian, tingkat inflasi Kota Cilegon menjadi kota dengan tingkat inflasi tertinggi di pulau Jawa dipengaruhi oleh komponen inti seperti makanan jadi dan sandang. Secara umum

komponen yang memberikan andil terhadap pembentukan inflasi Kota Tangerang dan Kota Serang yaitu komponen *volatile food* khususnya komoditas bahan pangan.

3.4.1. Kota Tangerang

Inflasi di Kota Tangerang pada triwulan II 2016 mencapai 3,49% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I 2016 yaitu 5,62% (yoy). Bobot perhitungan inflasi Kota Tangerang menyumbang 72% perhitungan inflasi Provinsi Banten. Inflasi di Kota Tangerang pada triwulan II 2016 terutama didorong oleh kelompok inti yang dipengaruhi oleh kenaikan tarif rumah sakit, tempat tinggal dan bimbingan belajar. Dengan demikian, kondisi ini mendorong peningkatan harga properti di Kota Tangerang dibandingkan dengan Kota Serang dan Cilegon.

Selain itu, komoditas yang harganya ditetapkan oleh pemerintah seperti rokok dan tarif angkutan antar kota juga menjadi pendorong utama inflasi di Kota Tangerang. Dengan julukan sebagai kota industri sejuta jasa maka Kota Tangerang termasuk kota penerima pasokan bahan makanan sehingga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan makanan menjadi kunci utama penentu harga bahan makanan di Kota Tangerang.

Komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Tangerang pada triwulan II 2016 di antaranya adalah rokok kretek, tarif rumah sakit, bawang putih, dan angkutan antar kota. Kenaikan harga bawang putih pada periode laporan mencapai 103,58% (yoy) akibat kendala distribusi.

Tabel III.5. Perkembangan Tingkat Inflasi per Sub Kelompok Barang di Kota Tangerang Triwulan II-2016

Kelompok Barang (%yoy)	Tw II - 2016	
	Inflasi	Andil
Umum	3.49	3.49
Bahan Makanan	5.26	1.12
Makanan Jadi, Rokok & Tembakau	6.60	1.24
Perumahan, LGA	1.08	0.25
Sandang	1.20	0.05
Kesehatan	12.32	0.70
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	3.12	0.28
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	(1.91)	(0.33)

Sumber : BPS, diolah

Tabel III.6.. Komoditas Penyumbang Inflasi di Kota Tangerang Tw II-2016

TANGERANG		
Komoditas	Inflasi	Andil
Rokok kretek filter	17.62	0.36
Tarif rumah sakit	20.00	0.30
Bawang putih	103.58	0.26
Rokok kretek	17.92	0.20
Angkutan antar kota	26.70	0.16
Komoditas	Deflasi	Andil
Bensin	(12.92)	(0.58)
Beras	(2.78)	(0.10)
Tarif listrik	(1.84)	(0.08)
Cabai rawit	(40.21)	(0.06)
Bawang merah	(9.38)	(0.05)

Sumber : BPS, diolah

3.4.2. Kota Serang

Inflasi di Kota Serang pada triwulan II-2016 mencapai 4,41% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I-2016 sebesar 6,52% (yoy). Kelompok bahan makanan memberikan andil terbesar inflasi di Kota Serang. Inflasi bahan makanan didorong oleh peningkatan harga beras dan

bawang merah. Berbeda dengan dua kota lainnya di Banten di mana komoditas beras mengalami deflasi, harga beras di Kota Serang meningkat sebesar 6,04%(yoy).

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten melakukan kajian inflasi guna mengukur dampak peningkatan makanan jadi terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat. Hasilnya, tidak terdapat perubahan signifikan, meskipun tingkat konsumsi masyarakat Banten terhadap makanan jadi semakin tinggi.

Inflasi di Kota Serang juga dipengaruhi oleh komponen *administered prices* yaitu rokok yang naik bertahap selama tahun 2016.

Tabel III.7. Perkembangan Tingkat Inflasi per Sub Kelompok Barang di Kota Serang Triwulan II-2016

Kelompok Barang (%yoy)	Tw II - 2016	
	Inflasi	Andil
Umum	4.41	4.41
Bahan Makanan	8.04	1.72
Makanan Jadi, Rokok & Tembakau	7.18	1.65
Perumahan, LGA	4.64	0.94
Sandang	2.47	0.16
Kesehatan	3.30	0.17
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	6.42	0.46
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	(4.09)	(0.68)

Sumber : BPS. diolah

Tabel III.8. Komoditas Penyumbang Inflasi di Kota Serang Tw II-2016

SERANG		
Komoditas	Inflasi	Andil
Tukang Bukan Mandor	30.56	0.71
Rokok Kretek Filter	12.49	0.33
Beras	6.04	0.25
Rokok Kretek	10.14	0.19
Bawang Merah	21.67	0.18
Komoditas	Deflasi	Andil
Bensin	(13.02)	(0.56)
Angkutan Dalam Kota	(17.12)	(0.44)
Cabai Merah	(18.85)	(0.09)
BBG	(4.75)	(0.08)
Semen	(5.07)	(0.07)

Sumber : BPS. diolah

3.4.3. Kota Cilegon

Seperti halnya di Kota Tangerang dan Serang, inflasi di Kota Cilegon pada triwulan II-2016 mencapai 4,68% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan I-2016 sebesar 5,23% (yoy). Meskipun demikian, inflasi Kota Cilegon adalah yang paling tinggi dibandingkan dua kota lainnya. Secara umum, inflasi pada triwulan II-2016 terutama dipengaruhi oleh kelompok inti seperti nasi dengan lauk, harga mobil dan sewa rumah. Selain itu, tingkat perubahan harga komponen *volatile food* atau bahan makanan seperti beras, minyak goreng, bawang putih, daging ayam ras, dan bawang merah juga turut mendorong inflasi di Kota Cilegon pada triwulan II-2016. Kenaikan harga bawang putih di Kota Cilegon pada triwulan II-2016 mencapai 79,88% (yoy), sementara kenaikan harga bawang merah mencapai 41,45%(yoy).

Tabel III.9. Perkembangan Tingkat Inflasi per Sub Kelompok Barang di Kota Cilegon Triwulan II-2016

Kelompok Barang (%yoy)	Tw II - 2016	
	Inflasi	Andil
Umum	4.68	4.68
Bahan Makanan	9.09	2.34
Makanan Jadi, Rokok & Tembakau	6.66	1.39
Perumahan, LGA	0.70	0.13
Sandang	5.10	0.28
Kesehatan	5.83	0.23
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	8.21	0.62
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	(1.76)	(0.31)

Sumber : BPS. diolah

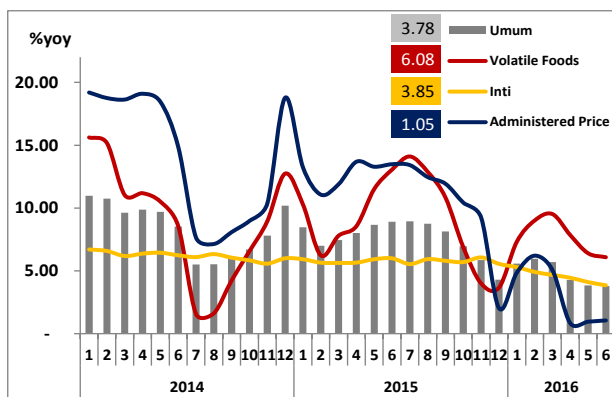
Tabel III.10. Komoditas Penyumbang Inflasi di Kota Cilegon Tw II-2016

CILEGON		
Komoditas	Inflasi	Andil
Nasi dengan Lauk	16.94	0.44
Beras	7.24	0.38
Rokok Kretek Filter	5.58	0.20
Mobil	7.47	0.19
Sewa Rumah	3.94	0.18
Komoditas	Deflasi	Andil
Bensin	(12.15)	(0.57)
Tempe	(7.09)	(0.09)
Baju Muslim	(15.49)	(0.05)
Cabai Merah	(8.49)	(0.04)
Tarif Listrik	(0.82)	(0.02)

Sumber : BPS. diolah

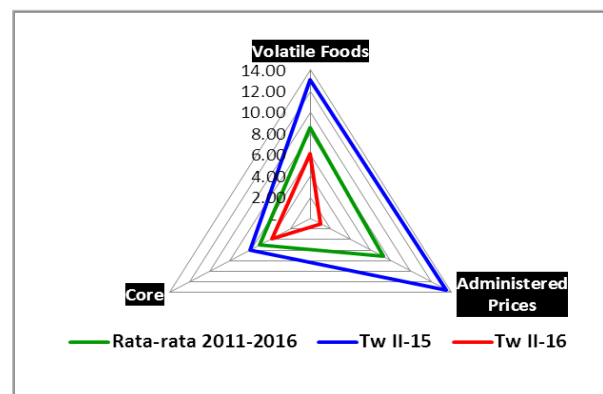
3.5. DISAGREGASI INFLASI

Berdasarkan disagregasi, inflasi tertinggi pada triwulan II-2016 terjadi pada komponen *volatile food* sebesar 6,08% (yoy), diikuti komponen inti yaitu 3,85% (yoy), dan komponen *administered prices* sebesar 1,05% (yoy). Apabila dilihat secara historis, deviasi inflasi terbesar terjadi pada komponen inflasi *administered prices* antara triwulan II-2016 dengan kondisi triwulan II-2015 dan rata-rata inflasi dalam lima tahun terakhir. Deviasi yang cukup lebar tersebut disebabkan oleh penurunan harga bensin mengikuti harga minyak bumi global. Menurunnya tekanan inflasi juga terlihat dari tingkat inflasi komponen inti yang cenderung menurun di bawah 4%(yoy) dari sebelumnya selama lima tahun terakhir mencapai 5% (yoy).



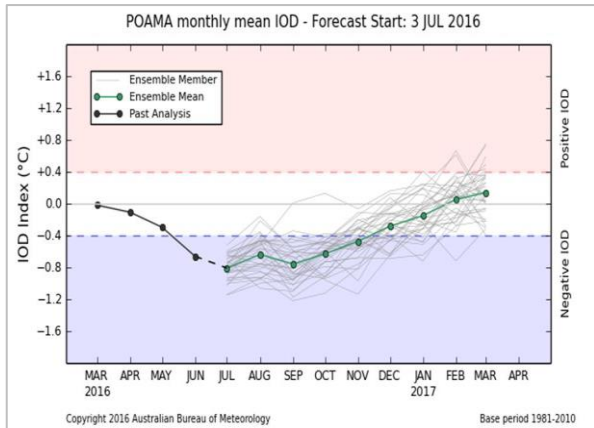
Sumber : BPS. diolah

Grafik III. 8. Disagregasi Inflasi Provinsi Banten (yoy)



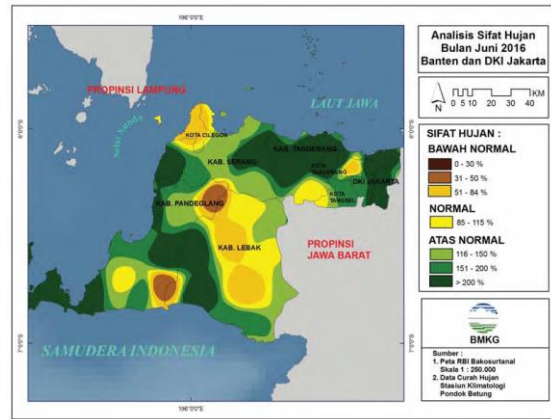
Sumber : BPS. diolah

Grafik III.9. Perbandingan Inflasi Banten dengan Rata-rata Inflasi Berdasarkan Disagregasi



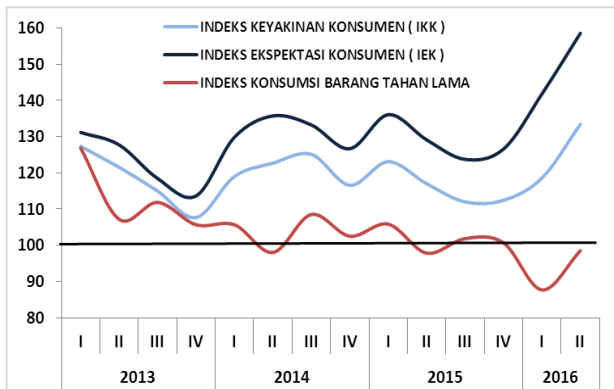
Sumber : Staklim Pondok Betung

Grafik III. 10. Perkembangan dan Proyeksi Intensitas Pasokan Uap Air (La Nina) di Indonesia



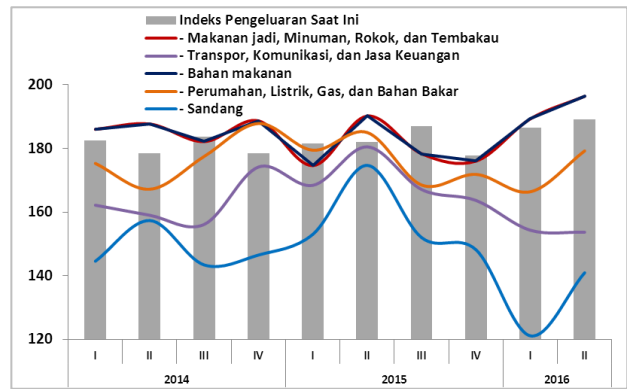
Sumber : BPS. Diolah

Grafik III. 11. Peta Sifat Hujan di Provinsi Banten Juni 2016



Sumber : Survei Konsumen BI. diolah

Grafik III. 12. Indeks Pengeluaran Konsumen Saat Ini Dibandingkan 3 Bulan Yang Lalu per Kelompok Pengeluaran



Sumber : Survei Konsumen BI. diolah

Grafik III. 13. Indeks Pengeluaran Konsumen Saat Ini Dibandingkan 3 Bulan Yang Lalu per Kelompok Pengeluaran

3.5.1. Komponen *Volatile Food*

Meskipun tingkat konsumsi masyarakat untuk kelompok bahan makanan meningkat pada triwulan II-2016 dibandingkan triwulan sebelumnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh indeks pengeluaran konsumen, inflasi komponen *volatile food* pada triwulan II-2016 sebesar 6,08% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I-2016 yang mencapai 9,52% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi kelompok *volatile food* didorong oleh deflasi pada bahan makanan seperti cabai rawit, ikan-ikanan, tempe, sayur-sayuran dan beras. Beberapa komoditas lainnya yang harganya kembali normal di antaranya adalah bawang merah, daging ayam ras, cabai merah dan telur ayam ras.

Berkurangnya tekanan inflasi bahan makanan dibandingkan triwulan I 2016 dipengaruhi oleh pasokan yang memadai dengan adanya panen raya tanaman hortikultura dan pergeseran musim panen padi, sehingga harga cabai merah, bawang merah dan beras mengalami penurunan sejak bulan April hingga Mei 2016. Hasil dari liaison ke kelompok tani, diperoleh

informasi bahwa panen cabai merah dan bawang merah di Banten dilakukan pada bulan April 2016. Meskipun demikian, produksi tanaman hortikultura pada triwulan II-2016 lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang disebabkan akibat peningkatan curah hujan. Untuk mencukupi kebutuhan pasokan maka Bulog dan TPID di Provinsi Banten juga aktif melakukan operasi pasar termasuk juga di antaranya untuk komoditas aneka bumbu-bumbuan seperti cabai merah dan bawang merah.

Peningkatan produksi padi yang tercermin dari luas sawah yang dipanen pada triwulan II-2016 mencapai 122.128 Ha, meningkat dibandingkan triwulan I-2016 yang hanya seluas 72.611 Ha. Demikian juga dengan produksi padi yang dihasilkan yaitu sebanyak 692.715 ton meningkat dibandingkan triwulan I 2016 sejumlah 422.034 ton dengan semakin bertambahnya intensitas hujan.

Sementara itu, beberapa komoditas yang mengalami inflasi pada triwulan II-2016 adalah bawang putih, kelapa dan minyak goreng. Inflasi bawang putih mencapai 99,37%(yoy) akibat berkurangnya persediaan bawang putih impor. Sementara itu harga kelapa dan minyak goreng meningkat pada akhir triwulan II-2016 yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan pada bulan Ramadhan. Peningkatan harga minyak goreng juga dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas CPO dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel III.11. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Banten Triwulan II-2016

KETERANGAN	2016							
	JAN	FEB	MAR	Tw I	APR	MEI	JUN	Tw II
Luas Panen (ha)	5.475	8.413	58.723	72.611	77.934	28.780	15.414	122.128
Produksi (ton)	32.969	49.203	339.863	422.034	439.041	165.197	88.476	692.715

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Banten. diolah

Tabel III.12. Komoditas *Volatile food* Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan II-2016 (% , yoy)

VOLATILE FOOD			VOLATILE FOOD		
Komoditas	Inflasi	Andil	Komoditas	Deflasi	Andil
Bawang putih	99.37	0.28	Cabai rawit	(37.77)	(0.05)
Kelapa	114.52	0.13	Udang basah	(16.53)	(0.05)
Minyak goreng	9.39	0.10	Tempe	(2.30)	(0.01)
Melon	30.41	0.09	Cumi-cumi	(6.37)	(0.01)
Tauge/kecambah	35.45	0.08	Petai	(26.77)	(0.01)
Bayam	32.64	0.08	Ketimun	(5.17)	(0.01)
Susu untuk balita	4.54	0.04	Labu siam/jipang	(12.00)	(0.00)
Susu kental manis	12.39	0.04	Rampela hati ayam	(3.62)	(0.00)
Daging ayam ras	1.85	0.04	Sawi putih	(6.71)	(0.00)
Kentang	21.98	0.03	Beras	(0.05)	(0.00)

Sumber : BPS. diolah

Tabel III.13. Perkembangan Harga Komoditas

Komoditas (Dalam Rupiah)	2015			2016		
	April	Mei	Juni	April	Mei	Juni
Daging Ayam Ras	32.350	33.713	34.618	34.388	35.975	37.263
Telur Ayam Ras	18.834	20.309	22.160	20.053	21.178	22.869
Bawang Merah	37.269	36.866	39.914	55.638	54.170	52.781
Cabai Merah	37.038	33.966	42.623	43.294	38.795	41.156
Beras	11.432	11.432	11.507	14.151	14.357	14.408
Daging Sapi	113.506	114.975	114.725	132.756	132.380	133.664

Sumber : Survei Pemantauan Harga Mingguan Kota Tangerang, KPw BI Provinsi Banten

3.5.2. Komponen *Administered Prices*

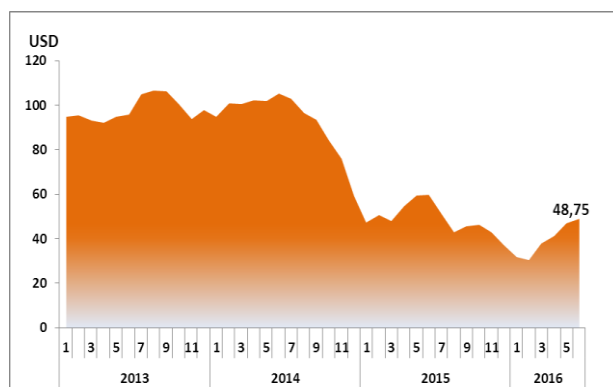
Inflasi komponen *administered prices* pada triwulan II- 2016 mencapai 1,05% (yoy) jauh lebih rendah dibandingkan triwulan I-2016 yang mencapai 5,07% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi didorong oleh penurunan harga bahan bakar minyak (bensin dan solar) yang kemudian mendorong turunnya tarif angkutan dalam kota. Selain itu, tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga (BBG) juga mengalami penurunan menyesuaikan penurunan harga komoditas energi gas dan minyak bumi. Harga minyak dunia pada triwulan II-2016 mencapai USD 48,75/barel, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 59,8/barel. Namun demikian, tingkat harga minyak bumi komoditas global pada triwulan II-2016 mulai bergerak naik dibandingkan pada triwulan I-2016 didorong oleh berkurangnya minyak produksi di AS dan gangguan pasokan di Libya, Nigeria, dan Kanada.

Sementara itu, kenaikan harga komoditas rokok kretek dan rokok kretek filter disebabkan oleh naiknya harga cukai rokok pada tahun 2016 rata-rata sebesar 11,19%. Kenaikan tarif angkutan udara dan angkutan antar kota (bus) mengalami kenaikan harga sebesar 33,64% (yoy) dan 21,63% (yoy) akibat kenaikan tarif transportasi pada bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Tabel III.14. Komoditas *Administered Prices* Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan II 2016 (% , yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil	Komoditas	Deflasi	Andil
Rokok kretek filter	15.35	0.36	Bensin	(12.83)	(0.57)
Rokok kretek	15.20	0.25	Angkutan dalam kota	(4.12)	(0.14)
Angkutan antar kota	21.63	0.18	Tarif listrik	(1.57)	(0.06)
Angkutan udara	33.64	0.12	Bahan bakar rumah tangga	(2.04)	(0.04)
Rokok putih	9.27	0.06	Solar	(25.36)	(0.01)

Sumber : BPS, diolah



Sumber : Bloomberg

Grafik III.14. Perkembangan Harga Minyak Bumi Global WTI

3.5.3. Komponen Inti

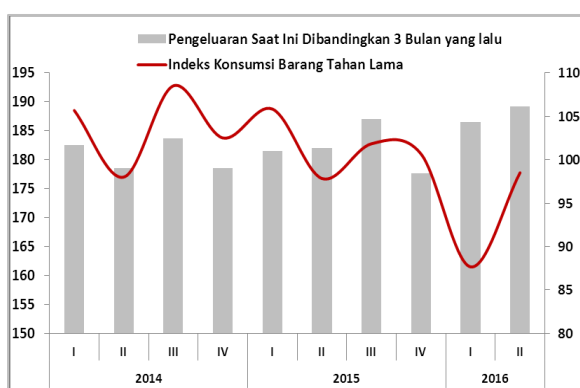
Inflasi komponen inti pada triwulan II-2016 mencapai 3,85% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan II-2015 sebesar 4,67% (yoy). Lebih rendahnya tekanan inflasi inti disebabkan salah satunya oleh penurunan harga barang tahan lama seperti perlengkapan rumah tangga dan sandang. Penurunan harga tersebut juga disebabkan daya beli masyarakat yang melemah diperlihatkan dari hasil survei konsumen untuk indeks konsumsi barang tahan lama yang masih menunjukkan kontraksi atau di bawah angka indeks 100.

Adapun inflasi inti masih didorong oleh peningkatan tarif rumah sakit, sewa rumah, bimbingan belajar dan kontrak rumah. Peningkatan tarif rumah sakit, sewa rumah dan kontrak rumah terjadi secara tahunan yang biasa terjadi pada akhir, awal atau pertengahan tahun. Inflasi bimbingan belajar yang meningkat hingga 40,48% (yoy) disebabkan oleh dimulainya tahun ajaran baru sekolah pada Juli 2016. Selain itu, inflasi inti juga masih disumbang oleh kelompok makanan jadi seperti mie, makanan ringan, bubur dan ayam goreng. Secara umum, peningkatan konsumsi masyarakat di bulan Ramadhan cenderung meningkat apabila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

Tabel III.15. Komoditas Komponen *Inti* Penyumbang Inflasi dan Deflasi Terbesar % (yoy)

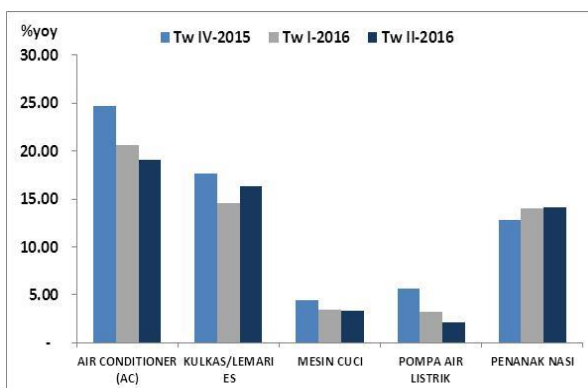
Komoditas	Inflasi	Andil	Komoditas	Deflasi	Andil
Tarip rumah sakit	14,75	0,21	Kursus musik	(100,00)	(0,03)
Sewa rumah	3,08	0,17	Besi beton	(11,39)	(0,02)
Bimbingan belajar	40,48	0,12	Semen	(2,05)	(0,02)
Kontrak rumah	4,97	0,10	Cumi-cumi	(6,37)	(0,01)
Mie	5,59	0,10	Laptop/notebook	(4,24)	(0,01)
Makanan ringan/snack	14,18	0,06	Sabun cream detergen	(4,65)	(0,01)
Sepatu	3,33	0,06	Batu bata/batu tela	(3,45)	(0,01)
Bubur	7,18	0,05	Kemeja pendek	(22,65)	(0,01)
Ayam goreng	5,81	0,05	Celana panjang jeans	(4,66)	(0,01)
Nasi dengan lauk	2,22	0,05	Ikan asin belah	(4,51)	(0,01)

Sumber : BPS, diolah



Sumber : Survei Konsumen BI, diolah

Grafik III. 15. Indeks Konsumsi Barang Tahan Lama oleh Konsumen



Sumber : BPS, diolah

Grafik III. 16. Inflasi Harga Barang Elektronik

BOKS 1. UPAYA PENGENDALIAN HARGA PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 2016

Sebagaimana biasanya, tren inflasi menjelang lebaran relatif tinggi. Oleh karena itu, TPID di Provinsi Banten melakukan beberapa upaya riil untuk mengendalikan kenaikan harga selama bulan Ramadhan ini seperti Warung TPID, Operasi Pasar Bulog, dan Pasar Murah.

Warung TPID merupakan kegiatan optimalisasi sinergitas anggota TPID (BI, Bulog, dan pemerintah daerah) dan mengoptimalkan peran Bulog dalam pengendalian harga. Warung TPID menyediakan beberapa bahan pangan yaitu minyak goreng, gula pasir, beras, bawang merah, cabai merah, bawang putih dan daging sapi dengan penyedia barang utama adalah BULOG.

Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Warung TPID sangat efektif dan efisien. Penentuan tanggal dan tanggung jawab masing-masing pihak dilakukan melalui whatsapp TPID Banten tanpa surat menyurat. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Warung TPID juga sedikit. Perizinan lokasi langsung ditangani oleh Biro Ekonomi di masing-masing kota/kabupaten, kendaraan angkutan barang menggunakan kendaraan yang dimiliki oleh Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tenda dan meja menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh KPw BI Provinsi Banten atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Rangkaian kegiatan Warung TPID dilakukan secara kontinyu sejak tanggal 22 Mei 2016, perdana di Kota Serang yang terkenal dengan tingkat inflasinya yang tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan Kota Cilegon pada tanggal 29 Mei 2016 pada kegiatan Sosialisasi Kesehatan Jantung ke Masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten.



Mempertimbangkan kecenderungan inflasi yang tinggi di Kota Serang, rangkaian kegiatan Warung TPID di Kota Serang kembali dilaksanakan pada tanggal 13 dan 16 Juni 2016. Rangkaian Warung TPID di Kota Serang selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 20-23 Juni 2016

yang disinergikan dengan kegiatan penukaran uang. Pada kesempatan tersebut, terdapat dua hal yang berbeda dari kegiatan Warung TPID sebelumnya yaitu kehadiran klaster binaan KPw BI Provinsi Banten serta Toko Tani Indonesia (TTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) binaan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. Klaster binaan KPw BI Provinsi Banten turut serta menyediakan komoditas seperti bawang merah, cabe merah, cabe rawit, tomat dan ketimun dengan harga jauh dibawah harga pasar karena langsung dari produsen. Selain itu, kehadiran TTI juga turut meramaikan Warung TPID kali ini. Pada kesempatan ini TTI menyediakan 1 ton beras premium dengan harga Rp7.500/kg. Sementara KTNA menyediakan sayuran dan produk olahan pangan.



Melihat efektifitas Warung TPID dalam penyediaan pasokan bahan pokok ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah dari pasar serta mengingat Polda Banten sebagai anggota TPID, maka Polda Banten meminta Warung TPID kembali dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2016 di Kota Cilegon untuk kegiatan HUT Bhayangkara ke-70. Acara tersebut dirangkaikan dengan acara Inbox.

Bukan hanya di Kota Serang dan Kota Cilegon, kegiatan Warung TPID juga dilaksanakan di kota/kabupaten lainnya oleh TPID Kab/Kota yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong pelaksanaan intensitas Operasi Pasar cukup tinggi di Kota Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Warung TPID

Tanggal	Lokasi
22 Mei 2016	Kota Serang
29 Mei 2016	Kota Cilegon
13 Juni 2016	Kota Serang
16 Juni 2016	Kota Serang
20-23 Juni 2016	Kota Serang
26 Juni 2016	Kota Cilegon
22 Juni 2016	Kota Tangerang
23 Juni 2016	Kota Tangerang Selatan

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Operasi Pasar Bulog

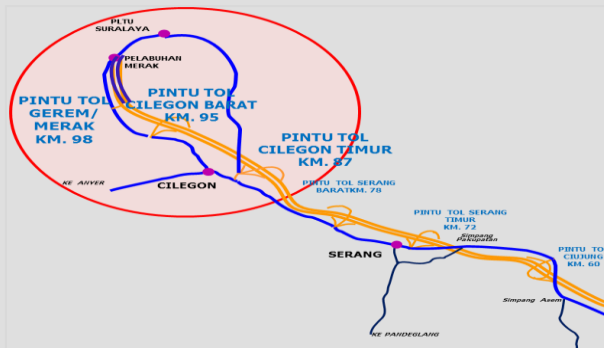
Tanggal	Lokasi	Tanggal	Lokasi
5 Juni 2016	Rangkas Bitung, Lebak	14 Juni 2016	Cinangka,
6 Juni 2016	Kota Tangerang	18 Juni 2016	Jatiuwung, Tangerang
9 Juni 2016	Pamulang, Tangerang Selatan	18 Juni 2016	Malingping, Pandeglang
9 Juni 2016	Lebak	19 Juni 2016	Saketi, Pandeglang
15 Juni 2016	Drangong, Taktakan, Serang	22 Juni 2016	Kota Tangerang Selatan
15 Juni 2016	Pasar Baru, Tangerang	22 Juni 2016	Kab. Pandeglang

Selain Warung TPID, upaya pengendalian inflasi lainnya yaitu kegiatan Pasar Murah. Tujuan utama dari kegiatan ini cenderung bersifat sosial yaitu untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang jauh dibawah harga pasar dengan adanya subsidi dari pemerintah daerah atau potongan harga barang dari retailer. Meski demikian, kegiatan ini juga memiliki tujuan lain yaitu mengendalikan harga dan menyediakan pasokan barang ke masyarakat.

Pada saat rapat TPID di Kabupaten Pandeglang, Asda II Kabupaten Pandeglang menginformasikan bahwa berdasarkan hasil survei, kenaikan harga oleh pedagang pasar di Kabupaten Pandeglang pada saat Ramadhan didasarkan keinginan untuk meningkatkan keuntungan bukan karena adanya gangguan pasokan. Oleh karena itu, kegiatan pasar murah tersebut diharapkan dapat meminimalisasi spekulasi pedagang.

BOKS 2. ANALISIS DAMPAK KEMACETAN DI PELABUHAN MERAK SAAT MUDIK LEBARAN 2016

Kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Merak sepanjang musim mudik Hari Raya Idul Fitri pada periode H-12 s.d Hari H atau tanggal 25 Juni 2016 s.d 5 Juli 2016 memberikan hambatan kepada pemudik yang akan menyeberang dari pulau Jawa ke Sumatera. *Opportunity cost* yang terbangun dalam kemacetan mudik lebaran tersebut dalam bentuk waktu, tenaga dan biaya bahan bakar. Di satu sisi, limpahan pemudik dalam jumlah banyak dalam waktu yang seketika tersebut memberikan dampak ekonomi peningkatan permintaan yang diikuti oleh peningkatan harga makanan dan minuman di Kota Cilegon.



Sumber : Dishub Provinsi Banten

Gambar 1 – Peta Kemacetan di Pelabuhan Merak

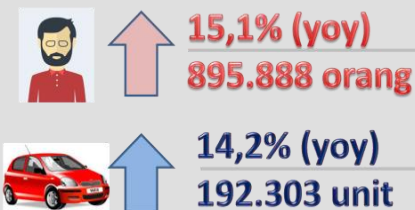


Sumber : Sumber : Dishub Provinsi Banten

Gambar 2 – Peta Kapasitas Parkir Pelabuhan Merak

Data Pemudik 2016 yang Menggunakan Jasa Pelabuhan Merak

Periode : H-12 s.d Hari H - Idul Fitri 2016
atau 25 Juni 2016 s.d 5 Juli 2016



Sumber : ASDP Indonesia Ferry cab. Pelabuhan Merak

PERBANDINGAN KONDISI KEMACETAN

Kondisi Normal	Saat Peak Hours*)	Over Capacity & Overtime
• KENDARAAN SEPEDA MOTOR : 8.624 Unit	• KENDARAAN SEPEDA MOTOR : 15.000 Unit	200%
• KENDARAAN CAMPURAN : 2.196 Unit	• KENDARAAN CAMPURAN : 11.500 Unit	500%
• Waktu tunggu : 1 jam	• Waktu tunggu : 5 - 7 jam	500-700%

*) Peak hours : Jumat (1/7) malam hingga Sabtu (2/7) sore
Waktu tunggu : dari pintu tol Merak s.d naik ke kapal ferry

DAMPAK EKONOMI

- Durasi macet ± 6 jam; jumlah kendaraan 11.500 unit
- Konsumsi bahan bakar, mobil *standby* ± 2,5 lt / jam*)
- Biaya tambahan bahan bakar :
 - a) Biaya bensin per mobil :
6 jam x 2,5 liter x Rp 6.550 = Rp 98.250 /mobil = Rp 100.000/mobil
 - b) Total bensin yang terbangun :
2,5 liter x 11.500 unit = 28,75 kLiter
 - c) Total biaya yang terbangun :
Rp 100.000 x 11.500 unit = **Rp 1,15 miliar/hari**



Keterangan :

1. perkiraan rata-rata bensin yang dibutuhkan oleh mobil 1.300 cc dengan kondisi mobil *standby*
2. untuk jenis kendaraan sepeda motor, biaya tambahan penggunaan bensin akibat kemacetan dianggap tidak signifikan

DAMPAK EKONOMI



1. Peningkatan permintaan makanan dan minuman - Prakiraan rata-rata harga pada saat lebaran (Juli 2016) untuk:
 - a) harga nasi dengan lauk naik 3-5%(mtm)
 - b) minuman kesegaran naik 4-6%(mtm)
(asumsi kenaikan harga sama dengan hasil dari survey BPS di kota Cilegon pada bulan Juni 2016)
2. Peningkatan biaya perawatan dan komponen mesin kendaraan bermotor
3. Harga bensin eceran meningkat hingga 10x lipat dari harga normal (Rp 70.000 s.d Rp 100.000 /liter)
4. Semakin cepat rusaknya infrastruktur jalan akibat dari banyaknya *volume* kendaraan yang melintasi ruas jalan

BAB IV. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas keuangan di Provinsi Banten masih terjaga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2016. Ketahanan korporasi di Provinsi Banten menunjukkan perbaikan walaupun masih dalam fase kontraksi. Optimisme perbaikan kondisi korporasi semakin ditunjukkan dengan peningkatan penyaluran kredit modal kerja. Namun demikian, risiko kredit korporasi masih mengalami peningkatan dipengaruhi perlambatan yang masih terjadi pada industri pengolahan. Di sisi lain, kondisi rumah tangga masih mengalami peningkatan penghasilan pada triwulan II 2016 sehingga mendorong pertumbuhan pengeluaran perseorangan. Eksposur perbankan terhadap rumah tangga juga masih terjaga dengan risiko pembiayaannya yang masih relatif stabil.

Tabel IV.1. Indikator Perbankan di Provinsi Banten

Indikator	2014	2015				2016		
		I	II	III	IV	I	II	
Aset	Rp triliun	140,87	137,09	143,87	148,25	151,73	160,52	166,96
	% (yoy)	14,80	8,04	8,55	8,34	7,71	17,09	16,04
DPK (Dana Pihak ketiga)	Rp triliun	121,61	118,91	124,03	127,86	129,64	130,88	139,31
	% (yoy)	15,28	6,71	7,61	8,51	6,60	10,07	12,32
Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek	Rp triliun	208,19	209,99	218,41	229,06	234,26	238,79	250,07
	% (yoy)	11,99	13,26	13,92	15,97	12,52	13,72	14,50
Rasio Kredit Non Lancar	%	1,99	2,13	2,13	2,47	1,98	2,34	2,55

Sumber: Bank Indonesia

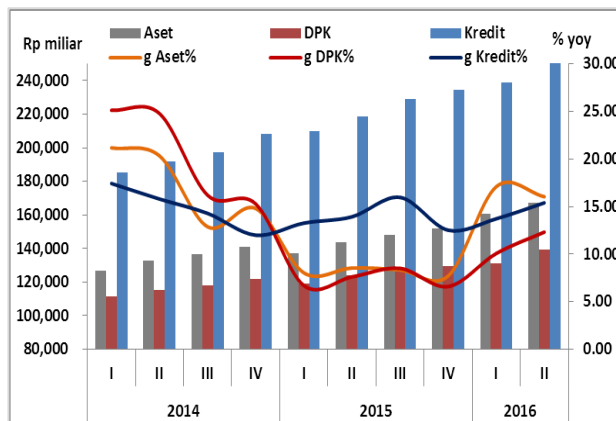
4.1. PERKEMBANGAN KINERJA PERBANKAN

Aset perbankan pada triwulan II 2016 mengalami peningkatan. Aset perbankan di Provinsi Banten pada triwulan II 2016 tercatat senilai Rp166,96 triliun, tumbuh 16,04% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,09% (yoy). Meskipun mengalami perlambatan, pertumbuhan aset yang tercatat 16,04% terbilang cukup tinggi, setelah sebelumnya selama tahun 2015 hanya tumbuh 7,7% (yoy). Terakselerasinya pertumbuhan aset didukung oleh penghimpunan simpanan masyarakat dan penyaluran kredit yang semakin menguat dibanding tahun 2015.

Secara nominal dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan di Banten pada triwulan II 2016 mencapai Rp139,10 triliun, tumbuh sebesar 12,32% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2016 yang tumbuh 10,07% (yoy). Pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut terutama didorong oleh peningkatan tabungan sebesar 20,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2016 yang tumbuh 16,10% (yoy) dengan nilai mencapai Rp49,31 triliun. Peningkatan tabungan masyarakat pada perbankan disebabkan oleh pembayaran

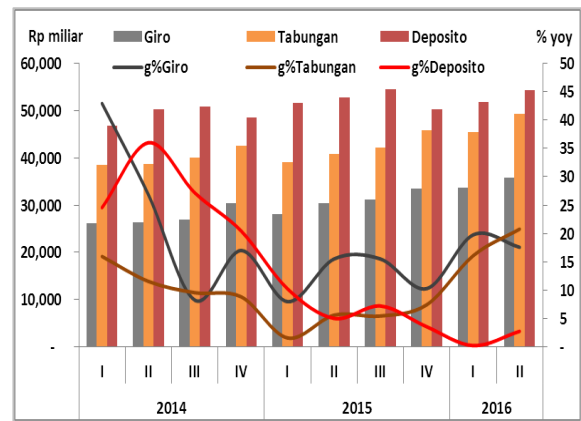
tunjangan hari raya (THR) pada bulan Juni 2016 yang diterima oleh karyawan swasta maupun PNS (Pegawai Negeri Sipil). Simpanan jenis deposito, yang mendominasi DPK di Banten dengan nilai mencapai Rp54,26 triliun dan pangsa sebesar 39%, juga mengalami peningkatan sebesar 2,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang hanya tumbuh 0,23% (yoy). Sementara itu giro tumbuh sebesar 17,57% (yoy), melambat dari sebelumnya tumbuh 19,77% (yoy) seiring pencairan giro perusahaan dan pemerintah untuk pembayaran gaji dan THR menjelang hari raya Idul Fitri.

Berdasarkan golongan nasabah, proporsi terbesar dana pihak ketiga perbankan di Provinsi Banten dimiliki oleh nasabah perseorangan dengan pangsa mencapai 56,65%, diikuti oleh nasabah korporasi (perusahaan) dengan pangsa 34,47%, dan sebanyak 8,81% dimiliki oleh pemerintah daerah.



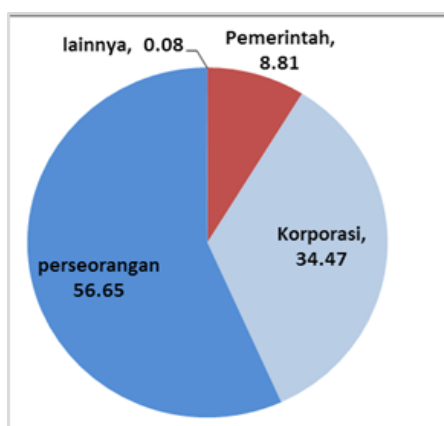
Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.1. Perkembangan Aset, DPK, dan Kredit Perbankan



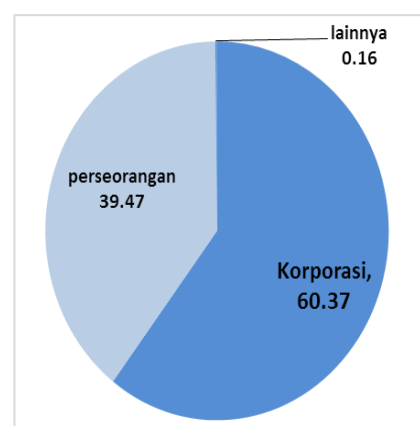
Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.2. Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Jenis Simpanan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.3. Struktur Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Nasabah



Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.4. Struktur Kredit Lokasi Proyek Berdasarkan Golongan Nasabah

Penyaluran kredit ke Provinsi Banten pada triwulan II 2016 dengan nilai mencapai Rp250,07 triliun, tumbuh 14,50% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu yang

tumbuh 13,72% (yoy). Berdasarkan golongan debitur, sebanyak 60,37% kredit yang disalurkan di Provinsi Banten ditujukan untuk sektor korporasi, sedangkan untuk kredit rumah tangga mencapai 39,47%. Pertumbuhan kredit didorong oleh peningkatan kredit modal kerja yang tumbuh 15,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu sebesar 13,03% (yoy) triliun. Kredit modal kerja mendominasi penyaluran kredit di Banten dengan pangsa mencapai 43,34% dengan nominal sebesar Rp108,39. Terakselerasinya pertumbuhan kredit modal kerja merupakan sinyal peningkatan aktivitas produksi pada dunia usaha di Provinsi Banten.

Sementara itu, kredit investasi dengan nominal mencapai Rp66,42 triliun tumbuh 13,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh 14,43% (yoy). Demikian juga dengan kredit konsumsi dengan nominal Rp75,26 triliun, mengalami perlambatan dari sebelumnya tumbuh 14,02% (yoy) menjadi 13,56% (yoy) pada triwulan II 2016. Pangsa kredit konsumsi pada triwulan II 2016 mencapai 30,09% lebih tinggi dari kredit investasi dengan pangsa 26,56%.

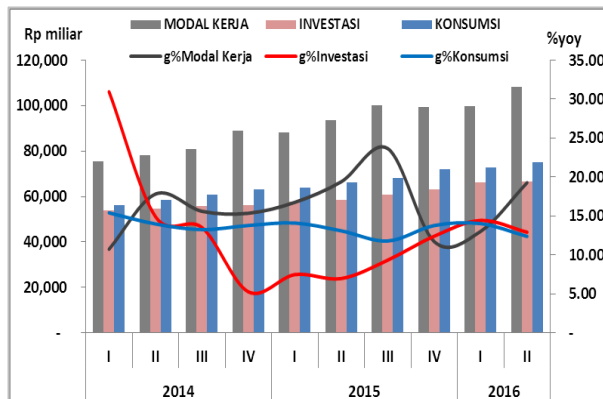
Melambatnya kredit investasi sejalan dengan informasi yang diperoleh dari liaison ke beberapa perusahaan dan perbankan di Provinsi Banten yang menyebutkan bahwa dalam kondisi perekonomian yang dinilai belum terlalu kuat, menyebabkan mayoritas pengusaha memilih untuk tidak melakukan ekspansi usaha atau berinvestasi yang bernilai besar melainkan hanya berupa pemeliharaan atau penggantian mesin. Dari sisi perbankan pun lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit investasi dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran angsuran dari debitur.

Secara spasial, sebagian besar kredit yang disalurkan di Provinsi Banten ditujukan ke wilayah sentra industri seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Kredit terbesar disalurkan ke Kabupaten Tangerang dengan nilai mencapai Rp109,25 triliun atau sekitar 44% dari total kredit di Banten. Kredit ke Kabupaten Tangerang tersebut mayoritas ditujukan ke sektor industri pengolahan. Penyaluran kredit terbesar kedua adalah kredit yang disalurkan ke Kota Tangerang mencapai Rp58,04 triliun dengan pangsa sebesar 23%. Sebagian besar kredit tersebut diberikan kepada sektor perdagangan. Posisi ketiga terbesar penyaluran kredit adalah ke Kota Cilegon dengan nilai mencapai Rp34,43 triliun atau dengan pangsa kredit sebesar 14%.

Secara nominal penyaluran kredit, terdapat perbedaan yang cukup besar antara ketiga wilayah tersebut dengan wilayah lain terutama wilayah Banten bagian Selatan yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan pangsa masing-masing sebesar 6% dan 2%.

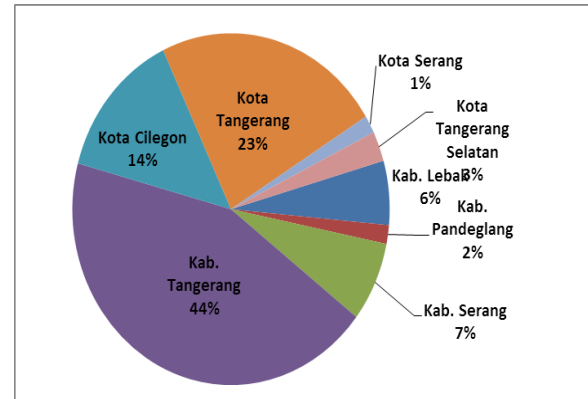
Peningkatan penyaluran kredit pada triwulan II 2016 juga diikuti oleh meningkatnya risiko kredit yang tercermin dari peningkatan NPL (*Non Performing Loan*) dari 2,34% di triwulan I

2016 menjadi 2,55% di triwulan II 2016. Meskipun meningkat, namun NPL masih berada pada level yang terkendali karena masih di bawah 5%. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan risiko kredit terutama didorong oleh meningkatnya risiko kredit modal kerja dan kredit investasi, sedangkan risiko kredit konsumsi relatif stabil rendah.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.5. Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: Bank Indonesia

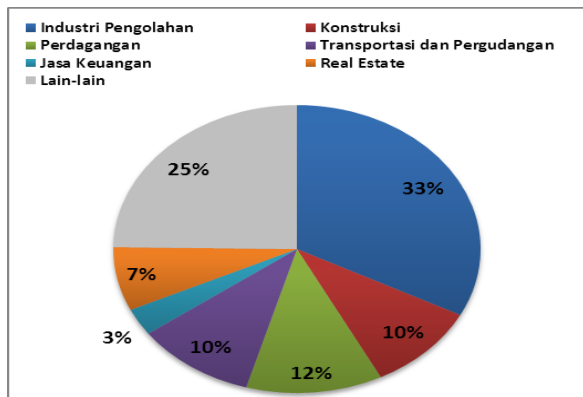
Grafik IV.6. Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek Pembiayaan

4.2. STABILITAS KEUANGAN DAERAH

4.2.1. Ketahanan Sektor Korporasi

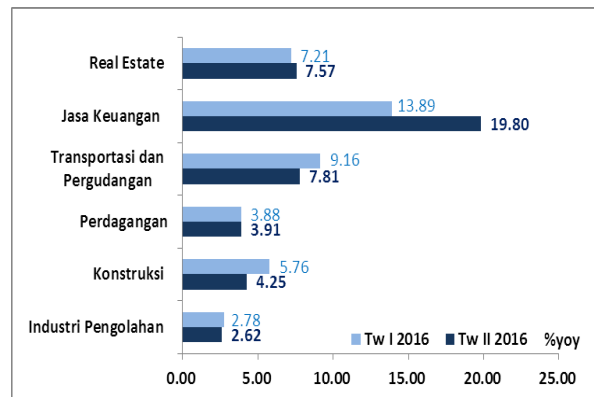
Perbaikan kondisi ekonomi Banten pada triwulan II 2016 secara umum didukung oleh perbaikan lapangan usaha utamanya seperti perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha real estate dan jasa keuangan. Meskipun demikian, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha konstruksi masih tumbuh melambat dibandingkan triwulan I 2016. Seperti yang telah dibahas pada Bab 1, lapangan usaha perdagangan, yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Banten sebesar 12%, mengalami pertumbuhan 3,91% (yoy) pada triwulan II 2016, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2016 yang mencapai 3,88% (yoy).

Di sisi lain, industri pengolahan dengan pangsa terbesar yaitu 33%, tumbuh 2,62% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh 2,78% (yoy). Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu jasa keuangan yang tumbuh 19,8% (yoy) pada triwulan II 2016. Kinerja perusahaan jasa keuangan yang sebagian besar adalah perbankan memberikan sumbangan sebesar 3% pada perhitungan perekonomian Banten.



Sumber: BPS, diolah

Grafik IV.7. Struktur PDRB Provinsi Banten Triwulan II 2016 menurut Lapangan Usaha

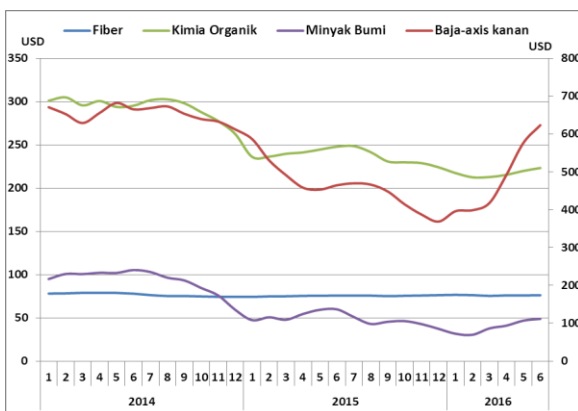


Sumber: BPS, diolah

Grafik IV.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Triwulan II 2016 menurut Lapangan Usaha

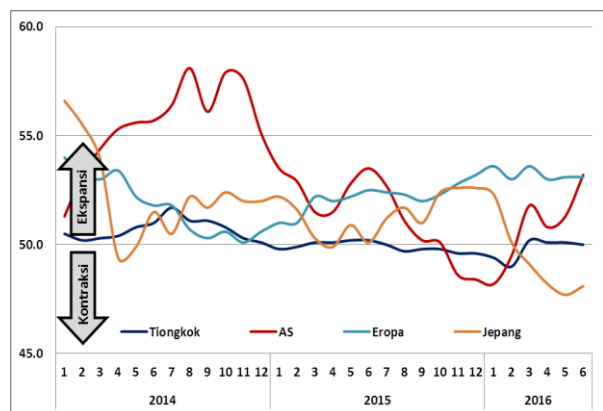
Relatif banyaknya industri di Provinsi Banten yang berorientasi pada ekspor, maka tantangan yang dihadapi diantaranya adalah fluktuasi harga komoditas global dan permintaan dari negara utama tujuan. Harga komoditas global yang sangat berpengaruh di antaranya adalah harga baja, minyak bumi dan gas, yang berdampak pada fluktuasi biaya bahan baku, biaya energi dan sebagai acuan harga jual. Seiring mulai meningkatnya tren harga baja di kisaran \$620/tray onz memberikan sentimen positif terhadap industri baja di Provinsi Banten. Selain itu, harga minyak bumi yang berada di kisaran \$50/barel lebih rendah dibandingkan historisnya juga memberikan pengaruh positif terhadap komponen biaya energi dan produksi yang menjadi relatif lebih murah.

Penjualan ekspor secara keseluruhan di Provinsi Banten juga menunjukkan peningkatan didorong oleh perbaikan ekonomi negara mitra dagang salah satunya Amerika Serikat yang dicerminkan oleh angka *Purchasing Managers Index* (PMI) di atas 50 dengan kecenderungan meningkat. Kondisi perekonomian Eropa dan Tiongkok yang belum menunjukkan perbaikan memberikan sentimen negatif terhadap penjualan ekspor khususnya untuk produk alas kaki dan tekstil.



Sumber: Bloomberg

Grafik IV.9. Harga Komoditas Global



Sumber: Bloomberg

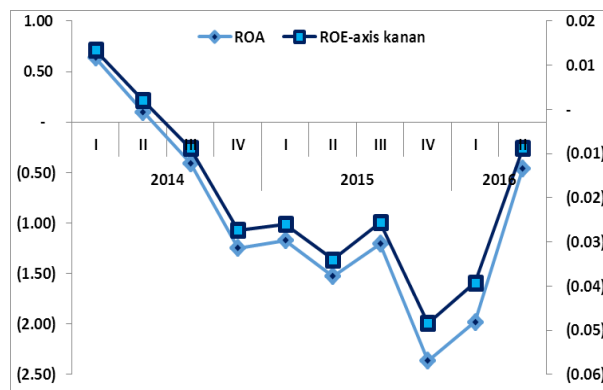
Grafik IV.10. *Purchasing Managers Index* (PMI) Negara Tujuan Ekspor

4.2.2. Kinerja Keuangan Korporasi

Kinerja keuangan korporasi di Banten pada triwulan II 2016 menunjukkan adanya perbaikan meskipun masih dalam fase kontraksi. Hal tersebut tercermin dari rasio rentabilitas korporasi yang ditunjukkan oleh rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Tingkat ROA atau perbandingan antara laba/rugi perusahaan dengan total aset mengalami perbaikan dari -1,98 menjadi -0,46. Demikian juga dengan ROE atau perbandingan antara laba/rugi perusahaan dengan total ekuitas mengalami perbaikan dari -0,04 menjadi -0,01.

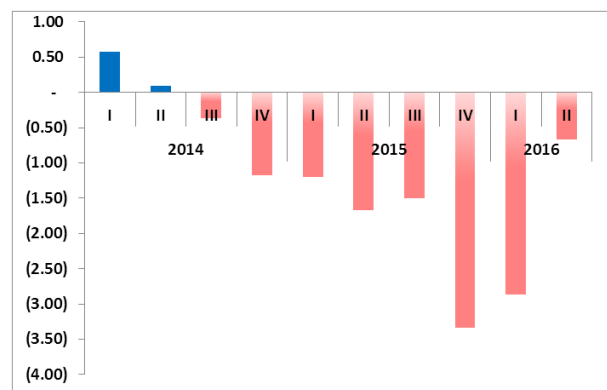
Hal yang sama juga terjadi pada tingkat profit margin atau perbandingan antara laba/rugi perusahaan dengan penjualan yang secara keseluruhan juga membaik dari -0,67% menjadi -2,87%. Meskipun sebagian besar perusahaan masih dalam kondisi *unfavorable* (*kurang menguntungkan*) yang ditunjukkan dengan kondisi ROA, ROE, dan profit margin dalam posisi negatif, kinerja keuangan sudah menunjukkan tren perbaikan.

Hasil dari kunjungan ke dunia usaha atau liaison yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten diperoleh informasi bahwa peningkatan margin di lapangan usaha perdagangan didorong oleh meningkatnya permintaan seiring meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan margin pada lapangan usaha industri pengolahan terutama terjadi pada subkategori sparepart otomotif, kimia hilir, baja, dan makanan minuman. Sementara korporasi di subkategori elektronik dan tekstil justru mengalami penurunan margin.



Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan

Grafik IV.11. Perkembangan Rasio Rentabilitas Perusahaan Terbuka di Provinsi Banten⁹



Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan

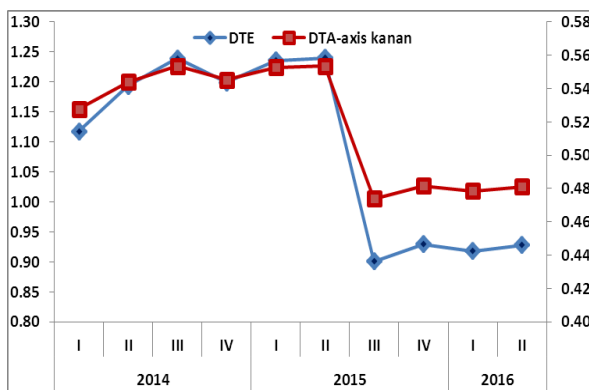
Grafik IV.12. Perkembangan Profit/Loss Margin Perusahaan Terbuka di Provinsi Banten

Tingkat kemampuan membayar hutang atau solvabilitas masih terjaga yang ditunjukkan dengan rasio *Debt to Equity* (DTE) dan *Debt to Asset* (DTA) yang relatif stabil pada triwulan II 2016 dibandingkan triwulan I 2016. Tingkat rasio DTE atau perbandingan antara total hutang dengan ekuitas mencapai 0,92. Sedangkan rasio DTA yang menunjukkan perbandingan antara

⁹ Sampling 9 Perusahaan Terbuka di Provinsi Banten

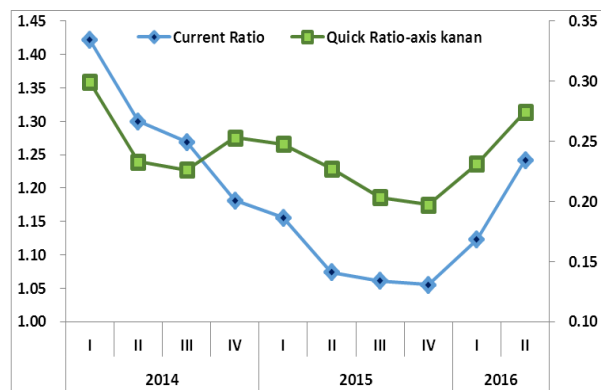
total hutang dengan total aset mencapai 0,48. Utang yang dimiliki oleh korporasi di Provinsi Banten yang berdenominasi mata uang asing menghadapi risiko nilai tukar. Untuk mengantisipasi risiko perubahan nilai tukar tersebut, sebagian besar perusahaan di Banten telah melaksanakan ketentuan tentang prinsip kehati-hatian (*hedging*) dalam pengelolaan utang luar negeri yang diwajibkan oleh Bank Indonesia¹⁰.

Sementara itu, rasio likuiditas (*current ratio* dan *quick ratio*) yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa dalam kondisi yang masih kontraksi, perusahaan masih dapat menjaga likuiditasnya. *Current ratio* atau perbandingan antara aset lancar dan hutang lancar korporasi di Banten pada triwulan II 2016 tercatat sebesar 1,24 atau meningkat dibandingkan triwulan I 2016 sebesar 1,12. Sedangkan untuk *quick ratio* atau rasio yang menunjukkan perbandingan posisi kas dan setara kas dengan hutang lancar juga meningkat dari 0,23 menjadi 0,27. Kinerja korporasi yang masih dalam fase kontraksi tersebut memberikan sinyal adanya sikap *wait and see* terhadap perkembangan ekonomi tahun 2016 yang menyebabkan sebagian korporasi menunda realisasi investasi. Adapun investasi yang dilakukan di triwulan II 2016 antara lain peremajaan mesin yang merupakan investasi rutin.



Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan

Grafik IV.13. Perkembangan Rasio Solvabilitas Korporasi Perusahaan Terbuka di Provinsi Banten



Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan

Grafik IV.14. Perkembangan Rasio Likuiditas Korporasi Perusahaan Terbuka di Provinsi Banten

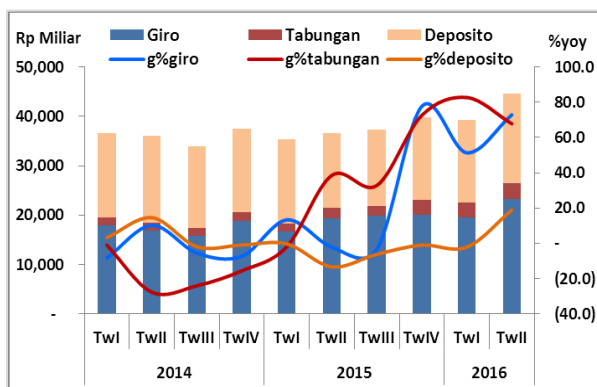
4.2.3. Eksposur Perbankan Terhadap Sektor Korporasi

Pertumbuhan dana pihak ketiga korporasi pada triwulan II 2016 mencapai Rp 44,67 triliun atau tumbuh 21,9% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu 10,9% (yoy). Pertumbuhan DPK korporasi tersebut disumbang paling besar dalam bentuk giro yang tumbuh hingga mencapai 19,6% (yoy). Peningkatan simpanan dalam bentuk giro tersebut juga menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan yang semakin likuid dan cenderung menahan investasi dalam kondisi perekonomian yang masih tumbuh moderat.

¹⁰ PBI No. 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014

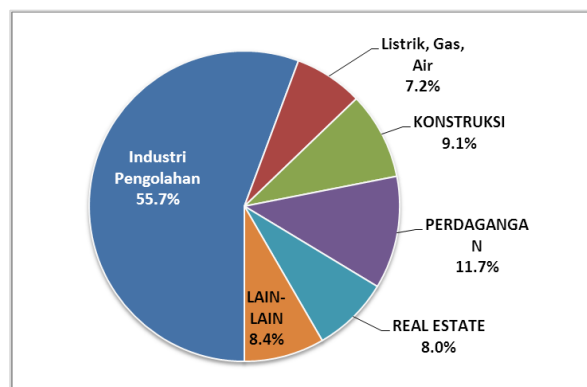
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Banten yang mengalami peningkatan, penyaluran kredit yang ditujukan kepada sektor korporasi di Provinsi Banten pada triwulan II 2016 juga mengalami peningkatan yaitu tumbuh 18,32% (yoy), lebih tinggi dari triwulan lalu yang tumbuh 14,58% (yoy). Berdasarkan lapangan usaha, kredit korporasi paling besar disalurkan kepada lapangan usaha industri pengolahan dengan nominal Rp79,95 triliun dan pangsa 55,7%, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan dengan nominal Rp16,76 triliun (pangsa 11,6%) dan konstruksi senilai Rp13,31 triliun (pangsa 9,2%).

Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Banten didorong oleh peningkatan kredit ke lapangan usaha utama seperti industri pengolahan yang tumbuh 18,59% (yoy), lebih tinggi dari sebelumnya 14,73% (yoy) dan lapangan usaha real estate yang tumbuh 42,35% (yoy), terakselerasi dari 32,56% (yoy) pada triwulan I 2016. Penyaluran kredit ke lapangan usaha perdagangan besar dan eceran tumbuh relatif tinggi yaitu 27,58% (yoy) meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan I 2016 yang tumbuh 28,47% (yoy). Demikian juga dengan lapangan usaha konstruksi tumbuh 22,18% (yoy), melambat dari sebelumnya yang tumbuh 27,29% (yoy).



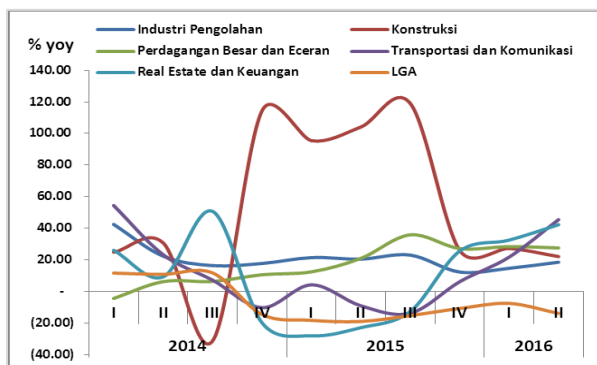
Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.15. Komposisi Dana Pihak Ketiga Korporasi



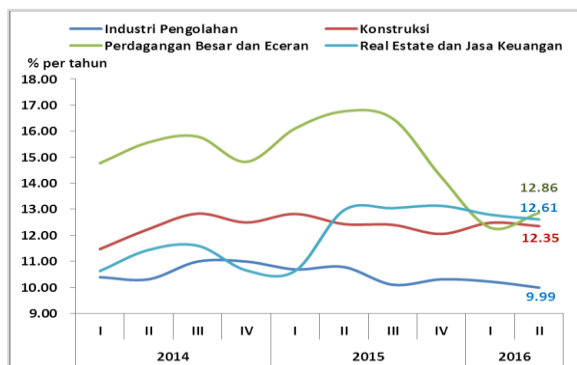
Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.16. Struktur Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.17. Perkembangan Penyaluran Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha

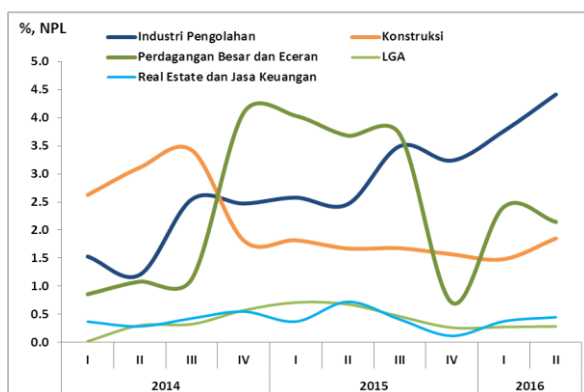


Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.18. Perkembangan Suku Bunga Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha

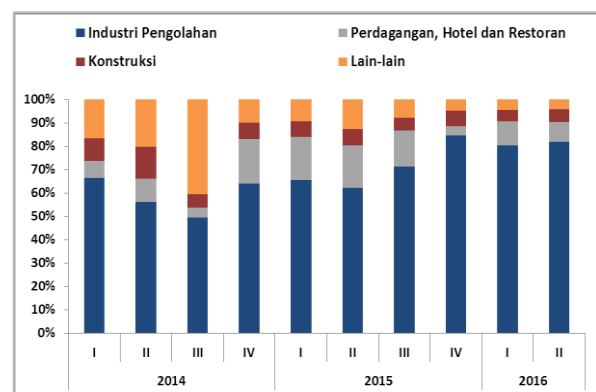
Sementara itu, tingkat suku bunga kredit korporasi tertinggi terjadi untuk jenis kredit perdagangan besar dan eceran yaitu mencapai 12,86%, meningkat dibandingkan triwulan I 2016 yaitu 12,29%. Sementara itu suku bunga kredit kepada industri pengolahan, konstruksi, dan *real estate* mengalami penurunan seiring dengan penurunan BI Rate menjadi 6,50% dari sebelumnya 6,75%. Ketahanan korporasi di Provinsi Banten juga tercermin dari perkembangan risiko kredit korporasi yang ditunjukkan oleh tingkat NPL. Risiko kredit korporasi mengalami peningkatan yaitu dari 2,64% di triwulan I 2016 menjadi 3,00% pada triwulan II 2016. Peningkatan risiko kredit korporasi terutama didorong oleh meningkatnya NPL lapangan usaha industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 80% dari total NPL sektor korporasi. NPL kredit industri pengolahan pada triwulan II 2016 mencapai 4,42%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 3,76%. Peningkatan tersebut ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB Provinsi Banten dari 2,78% (yoy) di triwulan I 2016 menjadi 2,62% (yoy) di triwulan II 2016.

Peningkatan risiko kredit juga terjadi pada lapangan usaha konstruksi yaitu 1,85% dari sebelumnya 1,48%, meskipun masih pada level aman, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi sektor ini di triwulan II 2016. Sementara itu, perbaikan risiko terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang ditunjukkan dengan penurunan NPL dari 2,41% menjadi 2,14%. Kondisi ini dipengaruhi oleh perbaikan kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran di Provinsi Banten sebagaimana tercermin dari peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor ini dari 3,88% (yoy) di triwulan I 2016 menjadi 3,91% (yoy) di triwulan II 2016.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.19. Perkembangan Tingkat NPL Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usah



Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.20. Proporsi NPL Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha

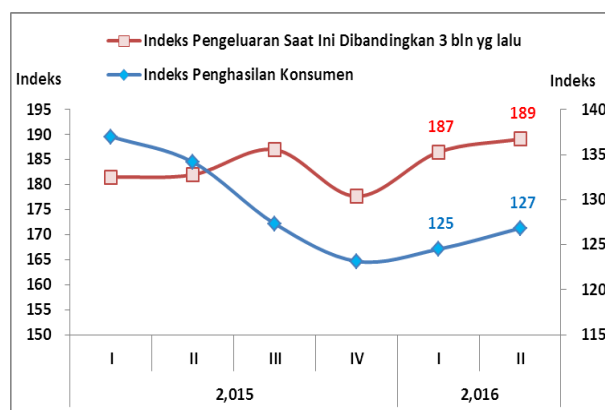
4.2.4. Ketahanan Sektor Rumah Tangga

Pada triwulan II 2016, pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten dengan andil terbesar hingga 53% terhadap

total pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Terjaganya ketahanan rumah tangga tersebut terjadi seiring dengan peningkatan penghasilan.

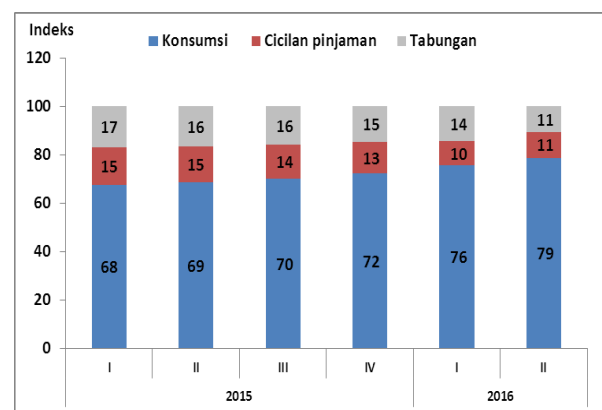
Berdasarkan hasil survei konsumen yang dilakukan oleh KPw BI Provinsi Banten, indeks penghasilan rumah tangga meningkat pada triwulan II 2016 dari level 125 menjadi 127 seiring dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR). Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan kondisi kegiatan usaha sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya penghasilan juga mempengaruhi peningkatan konsumsi rumah tangga yang diperlihatkan oleh indeks pengeluaran dari level 187 menjadi 189 seiring dengan masuknya bulan Ramadhan.

Dari survei konsumen diketahui bahwa struktur pengeluaran masyarakat pada triwulan II 2016 didominasi untuk keperluan konsumsi dengan pangsa 79%, meningkat dibandingkan triwulan I 2016 dengan pangsa 76%. Peningkatan konsumsi ini mendorong penurunan alokasi pengeluaran untuk tabungan dari sebelumnya 14% menjadi 11%. Survei konsumen ini juga memperlihatkan bahwa preferensi masyarakat dalam melakukan cicilan pinjaman masih relatif stabil dibandingkan triwulan lalu.



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

Grafik IV.21. Perkembangan Indeks Pengeluaran Saat Ini Dibandingkan 3 Bulan Yang Lalu dan Penghasilan Konsumen



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

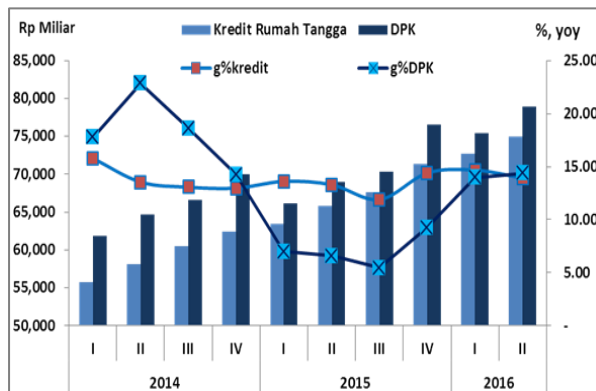
Grafik IV.22. Perkembangan Rata-Rata Penggunaan Penghasilan Rumah Tangga (%)

4.2.5. Eksposur Perbankan dalam Sektor Rumah Tangga

Dana pihak ketiga sektor rumah tangga pada triwulan II 2016 mencapai Rp78,92 triliun atau tumbuh sebesar 14% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan lalu. Pertumbuhan DPK rumah tangga tersebut disumbang paling besar dalam bentuk tabungan yang tumbuh hingga 18,6%(yoy). Peningkatan simpanan dalam bentuk tabungan tersebut disebabkan oleh penerimaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada bulan Juni 2016.

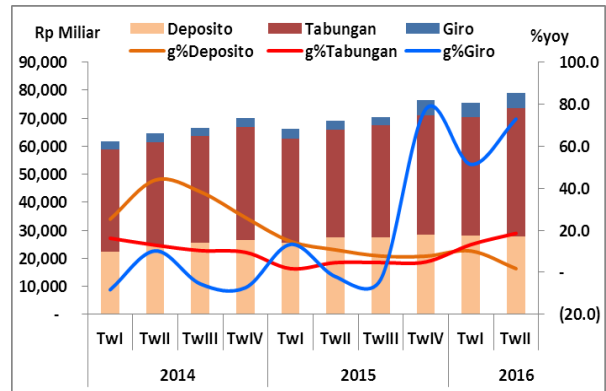
Penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga pada triwulan II 2016 senilai Rp74,99 triliun, tumbuh sebesar 13,92% (yoy) melambat dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh

14,68% (yoy). Kredit kepada sektor rumah tangga didominasi oleh KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan pangsa sebesar 52,7% diikuti oleh kredit multiguna dan kendaraan bermotor (KKB) dengan pangsa masing-masing sebesar 17,4% dan 11,4%.



Sumber: Bank Indonesia

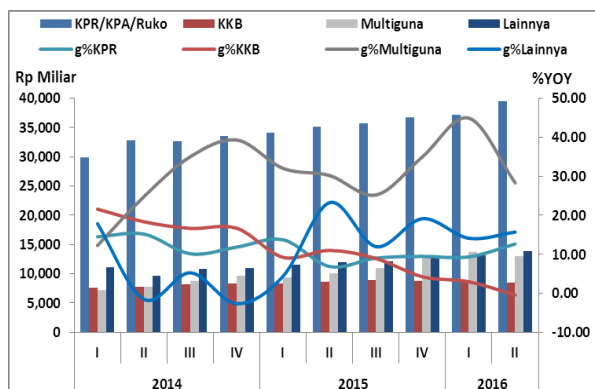
Grafik IV.23. Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan DPK Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia

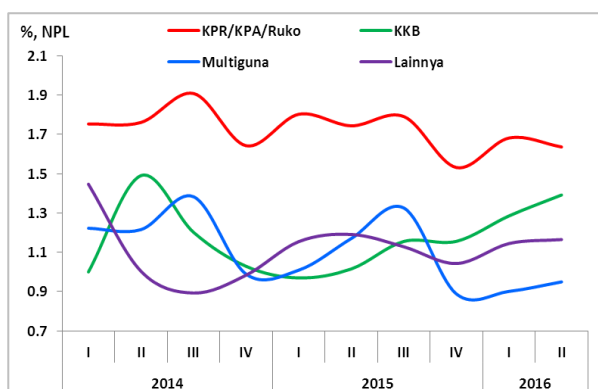
Grafik IV.24. Perkembangan Pertumbuhan DPK Rumah Tangga

Pertumbuhan kredit rumah tangga paling tinggi terjadi pada kredit multiguna yang tumbuh 28,34% (yoy) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 44,93% (yoy). Berdasarkan hasil liaison ke perbankan, tingginya pertumbuhan kredit multiguna disebabkan oleh persyaratan yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan jenis kredit rumah tangga lainnya seperti KPR atau KKB karena nilainya yang relatif kecil dan tidak memerlukan agunan. Sementara itu KPR pada triwulan II 2016 tumbuh sebesar 12,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,35% (yoy), sedangkan KKB mengalami penurunan dari 2,98% (yoy) di triwulan I 2016 menjadi -0,43% (yoy) di triwulan II 2016.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.25. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia

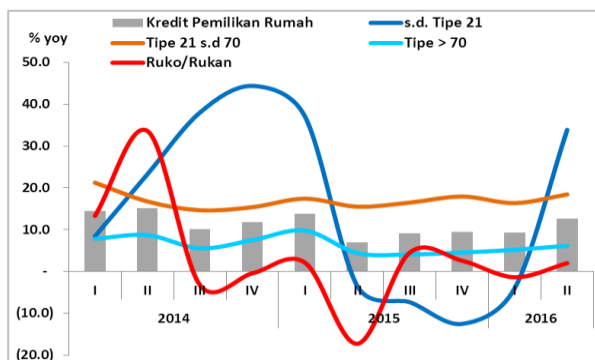
Grafik IV.26. Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

Peningkatan KPR terutama terjadi pada rumah tipe kecil yaitu tipe sampai dengan 21 yang meningkat signifikan dari -3,98% (yoy) di triwulan I 2016 menjadi 33,87% (yoy) di triwulan II 2016. Pertumbuhan kredit rumah tipe kecil tersebut sejalan dengan realisasi pembangunan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Banten. Real Estate Indonesia

(REI) DPD Banten menyatakan akan membangun sebanyak 5.000 unit rumah murah di Provinsi Banten pada 2016. Hingga triwulan II 2016, pembangunan rumah untuk MBR tersebut telah terlaksana sebanyak 1.000 unit. Peningkatan KPR untuk tipe tersebut mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat dan juga menunjukkan tingginya minat masyarakat akan tempat tinggal yang layak.

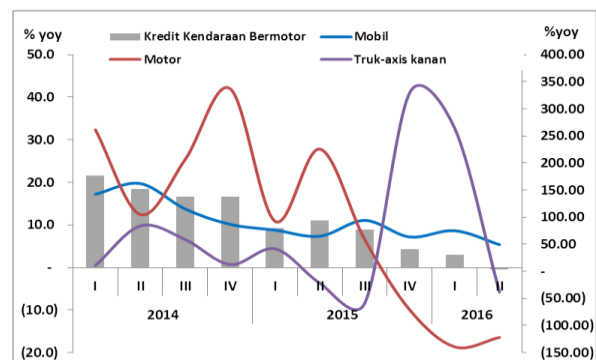
KPR untuk tipe 21 sampai dengan 70 juga tumbuh lebih tinggi yaitu 18,45% (yoy) dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh 16,38% (yoy). Demikian juga KPR tipe di atas 70 tumbuh 6,16% (yoy) dari sebelumnya 5,12% (yoy). Kondisi pembiayaan properti untuk keperluan niaga seperti kredit ruko/rukan juga telah mengalami perbaikan setelah sempat mengalami pertumbuhan negatif 1,37% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi 2% (yoy).

Sementara itu, turunnya KKB didorong oleh pertumbuhan negatif pada kredit sepeda motor dan kredit truk. Kredit sepeda motor tumbuh -16,43% (yoy), membaik dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh -18,64% (yoy). Kredit truk tumbuh -38,45% (yoy) dari sebelumnya tumbuh 264% (yoy). Penurunan KKB tersebut tertahan oleh kredit kendaraan roda empat (mobil) yang masih tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan yaitu 5,36% (yoy) dari 8,64% (yoy).



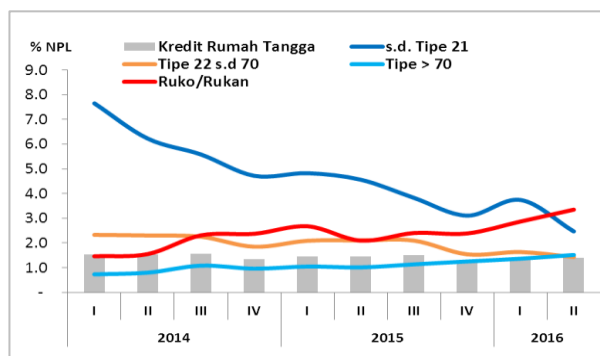
Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.27 Perkembangan Pertumbuhan Kredit per Tipe KPR



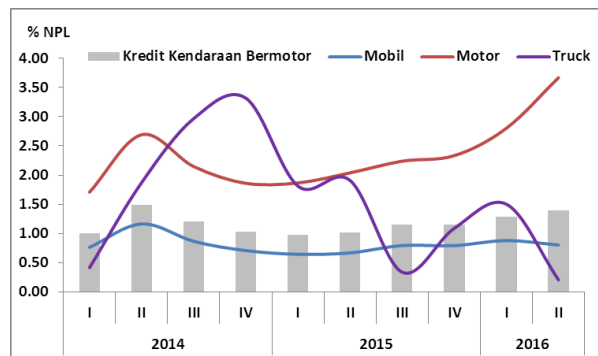
Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.28. Perkembangan Pertumbuhan KKB Berdasarkan Jenis



Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.29. Perkembangan NPL per Jenis KPR



Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.30. Posisi NPL KKB Berdasarkan Tipe

Risiko pembiayaan kredit rumah tangga pada triwulan II 2016 relatif stabil dengan tingkat NPL sebesar 1,40% dibandingkan sebelumnya 1,39%. Kemampuan masyarakat dalam membayar kredit properti juga membaik yang tercermin dari penurunan NPL KPR tipe sampai dengan 21 dari 3,74% di triwulan I 2016 menjadi 2,47% di triwulan II 2016. Sedangkan untuk NPL KPR jenis lain relatif stabil dibandingkan triwulan lalu.

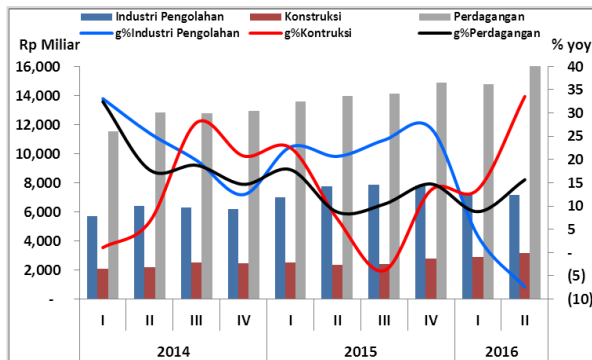
Risiko kredit rumah tangga untuk jenis KKB juga relatif kecil meskipun mengalami peningkatan dari 1,29% menjadi 1,39%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan NPL kredit sepeda motor yang mencapai 3,67%. Di sisi lain, perbaikan risiko kredit terjadi untuk jenis kredit kendaraan untuk truk yang turun signifikan dari 1,5% menjadi 0,2%. Sedangkan risiko kredit kendaraan roda empat masih stabil.

4.3. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.3.1. Perkembangan Pembiayaan UMKM

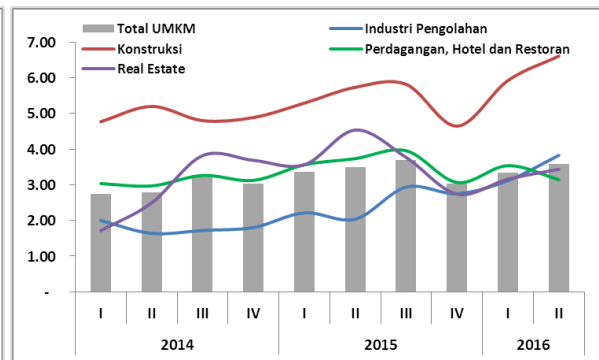
Berbeda dengan pertumbuhan kredit perbankan secara total, kredit UMKM justru menunjukkan perlambatan. Penyaluran kredit UMKM tumbuh 10,78% (yoy) lebih rendah dari triwulan lalu yang tumbuh sebesar 12,26% (yoy). Nominal kredit UMKM yang disalurkan mencapai Rp33,11 triliun, atau sekitar 13,24% dari total kredit yang disalurkan di Provinsi Banten. Berdasarkan lapangan usaha, pangsa terbesar penyaluran kredit UMKM masih ditujukan kepada lapangan usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) sebesar 49% diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan (22%), serta lapangan usaha konstruksi (10%).

Pertumbuhan kredit UMKM di lapangan usaha konstruksi tumbuh paling tinggi hingga mencapai 33,56% (yoy), sedangkan pertumbuhan kredit UMKM yang bergerak di industri pengolahan mengalami penurunan hingga -7,41% (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh strategi mayoritas perbankan yang saat ini lebih memilih sektor perdagangan atau konstruksi dengan pertimbangan risiko kredit yang lebih rendah dibandingkan UMKM di industri pengolahan.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.31. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Utama



Sumber: Bank Indonesia

Grafik IV.32. Perkembangan NPL Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha

Secara umum, risiko kredit UMKM di Provinsi Banten pada triwulan II 2016 mencapai 3,59% meningkat dibandingkan triwulan I 2016 sebesar 3,33%. Peningkatan tingkat NPL ini terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha termasuk tiga lapangan usaha terbesar tujuan penyaluran kredit UMKM. Tingkat NPL pada lapangan usaha konstruksi tercatat paling tinggi hingga 6,61% meningkat dibandingkan triwulan lalu yaitu 5,92%. NPL pada industri pengolahan naik dari 3,12% menjadi 3,83%. Risiko kredit UMKM pada lapangan usaha keuangan real estate dan jasa perusahaan juga meningkat dari 3,16% menjadi 3,43%. Sementara itu, tingkat NPL pada lapangan usaha PHR turun dari 3,54% menjadi 3,14%.

4.3.2. Program Pengembangan UMKM

Program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Peningkatan produksi melalui penggunaan teknologi dan kerjasama dengan *stakeholders*

Pemberian Bantuan Teknis (Bantek) kepada Program Pengendalian Inflasi (d/h Klaster) binaan KPw BI Provinsi Banten dengan tujuan untuk meningkatkan produksi. Peningkatan produksi ini membantu binaan untuk meningkatkan pendapatannya sehingga dapat mandiri dalam bertani.

Beberapa bentuk Bantuan Teknis yang telah dilakukan adalah :

- Program Pengendalian Inflasi cabai merah di Desa Cimenteng Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak mendapatkan fasilitas *screenhouse* untuk mengoptimalkan hasil produksi cabai. Sejak awal tahun telah dilaksanakan kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Banten untuk mengembangkan persemaian cabai dengan bibit varietas kencana yang tahan hama.
- Program Pengendalian Inflasi padi di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak mendapatkan fasilitas demplot padi dengan metode Hazton dalam rangka

meningkatkan produksi padi di wilayah tersebut. Rata-rata produksi sebelum demplot mencapai 5,5 ton – 6 ton/Ha dan setelah ada demplot meningkat menjadi 7 ton – 8 ton/Ha.

- Inisiasi persemaian bawang merah dari biji di Provinsi Banten pada Program Pengendalian Inflasi Bawang Merah Binaan KPw BI Provinsi Banten bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa). Mahalnya biaya pembelian bibit bawang merah yang berasal dari umbi dapat dikurangi dengan persemaian bibit dari biji yang harganya relatif stabil dan diharapkan mampu meningkatkan produksi bawang merah di Provinsi Banten.
- Pertemuan kelompok setiap bulan yang membahas mengenai konsep manajemen *Business Model Canvas* (BMC). Secara singkat, *Business Model Canvas* (BMC) adalah sebuah manajemen strategi bisnis yang memungkinkan kita untuk menggambarkan, mendesain, kemudian mengerucutkan beberapa aspek bisnis menjadi satu strategi bisnis yang utuh. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul "*Business Model Generation*". Dengan penerapan konsep BMC ini, diharapkan seluruh program pengendali inflasi dapat menggali nilai lebih produk mereka dibandingkan produk-produk lain. Setelah mengetahui nilai lebih ini, masing-masing program pengendali inflasi dapat memfokuskan perhatian mereka pada nilai lebih ini untuk meningkatkan produktivitas.
- Edukasi keuangan dilakukan kepada program pengendali inflasi KPw BI provinsi Banten dengan materi pengenalan bank, konsep menabung serta akses keuangan melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya.
- Penguatan kelembagaan untuk meningkatkan akses keuangan melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini Bank Indonesia Provinsi Banten menginisiasi pembentukan koperasi di program pengendali inflasi cabai merah binaan KPw BI Provinsi Banten yang berada di desa Pamarayan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang.

4.3.3. Tantangan Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

- Masih relatif minimnya pengetahuan klaster mengenai perbankan
- Masih terbatasnya akses perbankan terhadap UMKM di Provinsi Banten
- Minimnya penguatan kelembagaan pada gapoktan
- Budaya yang mengharapkan Bantuan dalam budidaya pertanian

BOKS 3. BI 7-DAY REPO RATE

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/12/PBI/2016 tentang Operasi Moneter, disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang diantaranya dilaksanakan melalui operasi moneter. Tujuan dari operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mendukung pencapaian stabilitas moneter, melalui pengendalian suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N) dan stabilitas nilai tukar. Suku bunga PUAB O/N dikendalikan agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Sementara nilai tukar dijaga agar bergerak stabil sejalan dengan nilai tukar fundamental.

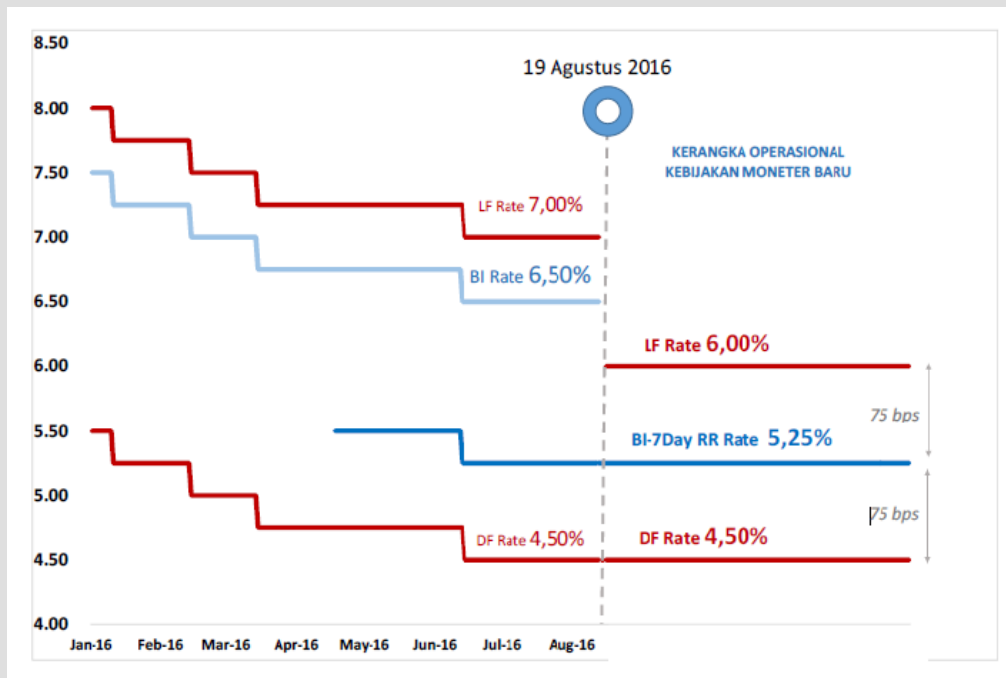
Terkait operasi moneter yang dilakukan melalui pengendalian suku bunga, pada tanggal 19 Agustus 2016, Bank Indonesia telah resmi menggunakan Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) sebagai suku bunga kebijakan baru menggantikan BI Rate yang sebelumnya digunakan sebagai acuan. Implementasi pemberlakuan BI 7-day RR Rate secara teknis akan diringi oleh normalisasi koridor atas dan bawah suku bunga. Dalam hal ini, *Lending Facility* (LF) dan *Deposit Facility* (DF) tetap berperan sebagai koridor atas dan bawah suku bunga acuan.

Pemilihan BI 7-day RR Rate sebagai suku bunga kebijakan baru didasari oleh :

- a. 7-day RR Rate mengacu pada instrument operasi moneter yang aktif dan ditransaksikan antara BI dan perbankan (transaksional).
- b. Instrumen Operasi Moneter 7-day RR Rate memiliki pasar yang realtif dalam.
- c. 7-day RR Rate memiliki hubungan yang kuat dengan suku bunga sasaran operasional kebijakan moneter, yaitu suku bunga PUAB O/N.

Perbedaan Kerangka Operasi Moenter yang lama dan baru adalah sebagai berikut :

	Kerangka Operasi Moneter LAMA	Kerangka Operasi Moneter BARU
Suku Bunga Kebijakan	BI Rate	BI 7-day RR Rate
Tercermin pada Tenor OM	12 bulan	1 minggu
Standing Facilities	LF (ceiling) dan DF (floor)	LF (ceiling) dan DF (floor)
Koridor	Asimetris (50 bps + 200 bps)	Simetris (75 bps + 75 bps)



Adapun tujuan utama penguatan Operasi Moneter adalah :

- Memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga BI 7-day RR Rate sebagai acuan utama di pasar keuangan. Dengan demikian, pelaku pasar dapat menggunakan BI 7-day RR Rate sebagai acuan utama dalam menentukan suku bunga lainnya di pasar keuangan.
- Memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan.
- Mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di PUAB untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan. Untuk itu, penguatan Operasi Moneter akan disertai dengan langkah-langkah untuk mempercepat pendalaman pasar uang.

BOKS 4. RELAKSASI KEBIJAKAN *LOAN TO VALUE* DAN *FINANCING TO VALUE*

Dalam rangka meningkatkan permintaan domestik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap kebijakan makroprudensial dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini juga dilakukan untuk mendukung berjalannya fungsi intermediasi perbankan yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Penyempurnaan ketentuan mengenai *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV) yang telah dilakukan Bank Indonesia tahun 2015 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/10/PBI/2015 tentang “Rasio *Loan to Value* atau Rasio *Financing to Value* untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor”, telah mampu menahan penurunan kredit/pembiayaan kepemilikan rumah yang diberikan bank namun dirasa belum cukup kuat untuk meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan.

Oleh sebab itu, diperlukan relaksasi lebih lanjut yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kredit/pembiayaan di sektor properti (berlaku sejak 29 Agustus 2016), mengingat sektor ini memberikan dampak *multiplier* yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, penyempurnaan PBI LTV/FTV dan uang muka tersebut perlu dilakukan secara proporsional dan terukur. Adapun pokok – pokok penyesuaian dalam PBI LTV/FTV dan uang muka meliputi hal-hal berikut :

- ✚ Perubahan rasio dan *tiering* LTV/FTV untuk Kredit Properti atau Pembiayaan Properti pada fasilitas ke-1, fasilitas ke-2, fasilitas ke-3 dan seterusnya sehingga rasio LTV dan FTV yang baru adalah sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut

KREDIT & PEMBIAYAAN PROPERTI			
Akad Murabahah dan Istishnak			
TIPE PROPERTI (m ²)	KP & KP Syariah		
	I	II	III
RUMAH TAPAK			
Tipe > 70	85%	80%	75%
Tipe 22 – 70	-	85%	80%
Tipe ≤ 21	-	-	-
RUMAH SUSUN			
Tipe > 70	85%	80%	75%
Tipe 22 – 70	90%	85%	80%
Tipe ≤ 21	-	85%	80%
RUKO/RUKAN	-	85%	80%

PEMBIAYAAN PROPERTI SYARIAH			
Akad MMQ & IMBT			
TIPE PROPERTI (m ²)	KP Syariah		
	I	II	III
RUMAH TAPAK			
Tipe > 70	90%	85%	80%
Tipe 22 – 70	-	90%	85%
Tipe ≤ 21	-	-	-
RUMAH SUSUN			
Tipe > 70	90%	85%	80%
Tipe 22 – 70	90%	85%	80%
Tipe ≤ 21	-	85%	80%
RUKO/RUKAN	-	85%	75%

- ✚ Penyesuaian persyaratan *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) secara total untuk penggunaan rasio LTV untuk Kredit Properti dan rasio FTV untuk Pembiayaan Properti dari *gross* menjadi *net*.
- ✚ Kredit tambahan (*top up*) oleh Bank Umum dan Pembiayaan baru oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang merupakan tambahan dari pembiayaan sebelumnya menggunakan rasio LTV Kredit Properti atau FTV Pembiayaan Properti yang sama sepanjang kredit/pembiayaan tersebut memiliki kualitas kredit lancar. Hal tersebut juga berlaku bagi kredit yang diambil alih (*take over*) dengan kredit tambahan atau disertai dengan pembiayaan baru.
- ✚ Kredit Properti atau Pembiayaan Properti untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh (*indent*) diperbolehkan sampai dengan urutan fasilitas ke-2 dengan proses pencairan yang bertahap dimana mekanismenya akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, ditentukan syarat bagi perbankan yang ingin menerapkan rasio LTV/FTV sebagaimana diatur dalam PBI yaitu :

- ✚ Rasio kredit bermasalah dari total kredit atau rasio pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan secara bersih (*net*) kurang dari 5%.
- ✚ Rasio Kredit Properti bermasalah dari total Kredit Properti atau rasio Pembiayaan Properti bermasalah dari total Pembiayaan Properti secara bruto (*gross*) kurang dari 5%.

Bagi perbankan yang memiliki rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah yang melebihi batasan yang ditentukan pada penyesuaian, maka rasio LTV/FTV yang berlaku adalah ketentuan yang sebelumnya (tidak terdapat perubahan), yaitu :

KREDIT & PEMBIAYAAN PROPERTI			
Akad Murabahah dan Istishnak			
TIPE PROPERTI (m²)	KP & KP Syariah		
	I	II	III
RUMAH TAPAK			
Tipe > 70	80%	70%	60%
Tipe 22 – 70	-	80%	70%
Tipe ≤ 21	-	-	-
RUMAH SUSUN			
Tipe > 70	80%	70%	60%
Tipe 22 – 70	90%	80%	70%
Tipe ≤ 21	-	80%	70%
RUKO/RUKAN	-	80%	70%

PEMBIAYAAN PROPERTI SYARIAH			
Akad MMQ & IMBT			
TIPE PROPERTI (m²)	KP Syariah		
	I	II	III
RUMAH TAPAK			
Tipe > 70	85%	75%	65%
Tipe 22 – 70	-	80%	70%
Tipe ≤ 21	-	-	-
RUMAH SUSUN			
Tipe > 70	85%	75%	65%
Tipe 22 – 70	90%	80%	70%
Tipe ≤ 21	-	80%	70%
RUKO/RUKAN	-	80%	70%

BAB V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Secara umum perkembangan sistem pembayaran non tunai di Provinsi Banten masih belum tumbuh kuat pada triwulan II 2016. Transaksi non tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami perlambatan di triwulan II 2016 baik secara nominal maupun volume. Sementara transaksi non tunai melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) masih belum pulih dan berada pada level kontraksi pada triwulan II 2016 paska adanya perubahan ketentuan terkait batas minimal transfer dana melalui RTGS.

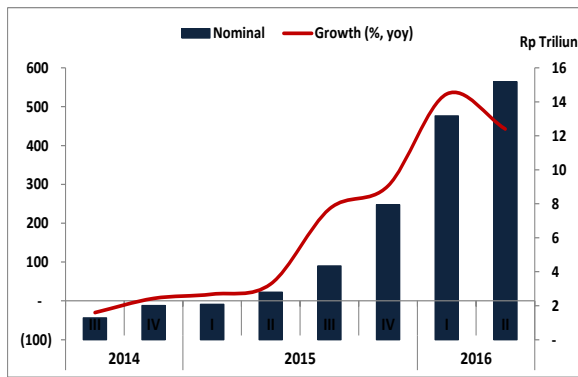
5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

5.1.1. Perkembangan Transaksi Kliring

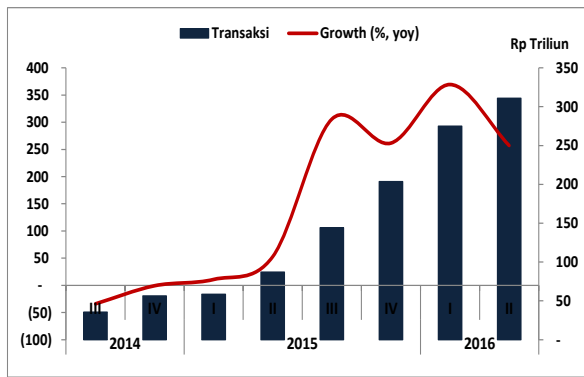
Transaksi non tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan II 2016 mengalami perlambatan baik secara nominal maupun volume. Perkembangan nominal transaksi kliring pada triwulan II 2016 tercatat mengalami perlambatan dari sebelumnya tumbuh 533% (yoy) pada triwulan I 2016, menjadi 442% (yoy) pada triwulan II 2016. Sementara itu volume transaksi kliring mengalami perlambatan yang lebih dalam dari sebelumnya tumbuh 369% (yoy) pada triwulan I 2016, menjadi 257% (yoy) pada triwulan II 2016.

Perlambatan yang terjadi pada transaksi kliring juga terindikasi dari konsumsi barang tahan lama yang mengalami perlambatan. Di tengah perekonomian yang belum stabil, rumah tangga lebih cenderung melakukan konsumsi untuk barang-barang kebutuhan utama atau primer dan menahan konsumsi sekunder maupun tersiernya. Hal ini juga terindikasi dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh lebih tinggi pada triwulan II 2016, dimana kelebihan dana yang dimiliki rumah tangga lebih banyak disimpan untuk berjaga-jaga.

Meskipun mengalami perlambatan, pertumbuhan transaksi kliring tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sejak triwulan IV 2015 paska pemberlakuan RTGS Generasi II yang menyebabkan beralihkannya transaksi pengiriman uang dengan nominal di atas Rp100 juta dari RTGS menjadi melalui kliring.

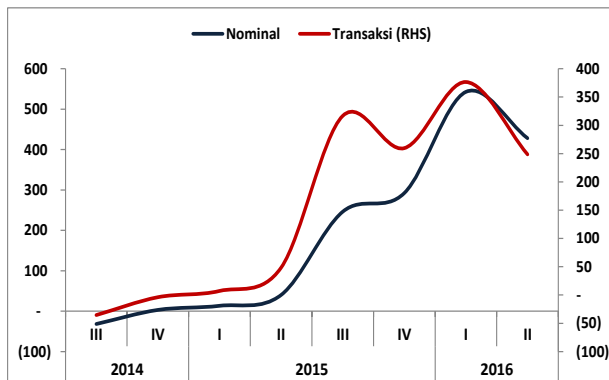


Grafik V.1.
Perkembangan Transaksi Kliring di Wilayah Banten Berdasarkan Nominal
Sumber: Bank Indonesia

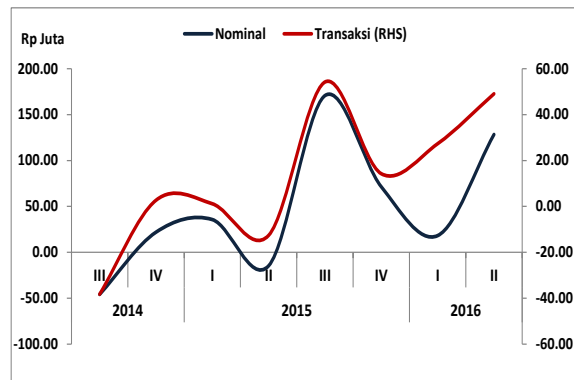


Grafik V.2.
Perkembangan Transaksi Kliring di Wilayah Banten Berdasarkan Volume
Sumber: Bank Indonesia

Transaksi harian pada SKNBI mengalami perlambatan yang cukup dalam dari periode sebelumnya dimana secara volume hanya tumbuh 249% (yoy), lebih rendah dibandingkan transaksi pada triwulan I 2016 yang mencapai 277% (yoy). Demikian pula secara nominal yang tumbuh 428% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2016 yang mencapai 543% (yoy). Perlambatan yang terjadi pada transaksi harian menjadi penyebab rendahnya total transaksi di triwulan II 2016. Sayangnya, perlambatan yang terjadi di triwulan II 2016 pada transaksi kliring disertai oleh peningkatan cek atau bilyet kosong yang mencapai 1.300 warkat atau secara nominal Rp64,5 miliar.



Grafik V.3.
Perkembangan Transaksi Kliring Harian di Wilayah Banten
Sumber: Bank Indonesia



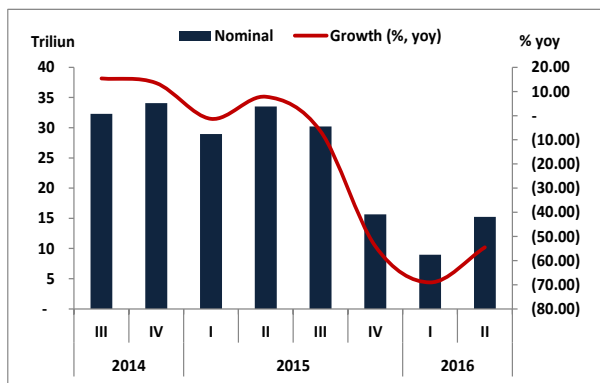
Grafik V.4.
Perkembangan Cek/BG Kosong
Sumber: Bank Indonesia

5.1.2. Perkembangan Transaksi RTGS

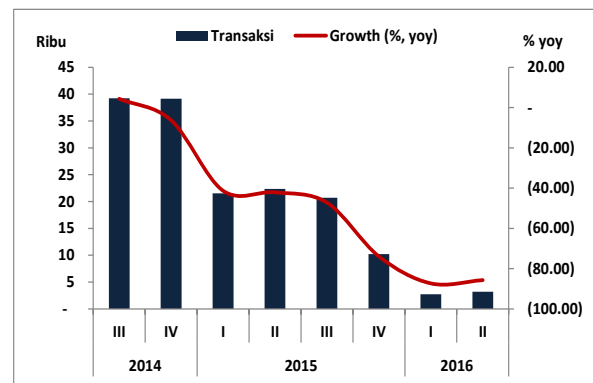
Transaksi non tunai melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) pada triwulan II 2016 masih berada pada level kontraksi baik secara nominal maupun volume. Perkembangan nominal transaksi RTGS pada triwulan II 2016 tercatat mengalami penurunan sebesar 55% (yoy). Sementara volume transaksi RTGS mengalami penurunan sebesar 86% (yoy). Namun demikian, penurunan yang terjadi pada triwulan II 2016 pada transaksi RTGS mulai menunjukkan

perbaikan dibandingkan posisi triwulan I 2016 yang masing-masing mengalami kontraksi mencapai 69% (yoy) secara nominal dan 87% (yoy) secara volume.

Penurunan transaksi yang terjadi pada RTGS merupakan dampak dari adanya kebijakan peningkatan batas minimal nilai transaksi melalui sistem BI RTGS dari yang sebelumnya di atas Rp 100 juta menjadi di atas Rp 500 juta. Ketentuan tersebut berlaku paska beroperasinya sistem BI RTGS Generasi II pada bulan November 2015.



Grafik V.5.
Perkembangan Transaksi RTGS di Wilayah Banten Berdasarkan Nominal
Sumber: Bank Indonesia



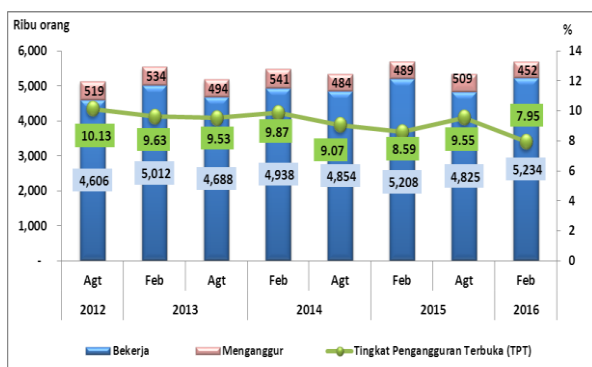
Grafik V.6.
Perkembangan Transaksi RTGS di Wilayah Banten Berdasarkan Volume
Sumber: Bank Indonesia

BAB VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Indikator ketenagakerjaan di Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana tercermin dari peningkatan jumlah penduduk yang bekerja pengangguran yang disertai oleh menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selain itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan yang diikuti oleh turunnya angka kemiskinan. Demikian juga Indeks Kedalaman dan Indeks Keperahan menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin, meskipun belum merata ke daerah perdesaan.

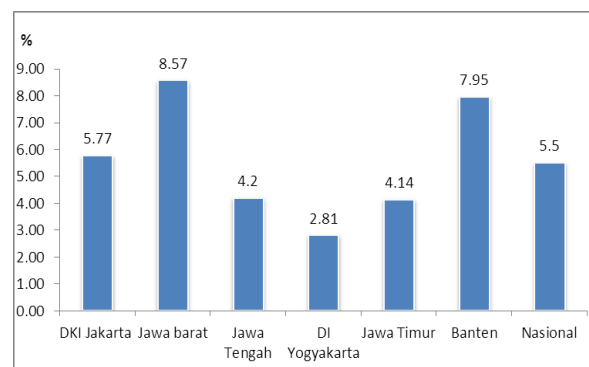
6.1. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data tenaga kerja dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, jumlah orang yang bekerja di Provinsi Banten mengalami peningkatan sebesar 0,5% (yoy) dari 5.208 ribu orang pada Februari 2015 menjadi 5.234 ribu orang pada Februari 2016. Sementara itu, terjadi penurunan jumlah pengangguran di Banten dari sebelumnya 489 ribu orang pada Februari 2015 dan 509 ribu orang di Agustus 2015 menjadi yaitu 452 ribu orang pada Februari 2016. Demikian juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu menurun dari 8,59% di Februari 2015 dan 9,55% di Agustus 2015 menjadi 7,95%. Angka pengangguran Banten lebih tinggi dari Nasional yaitu 5,5%. Dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, Banten berada di posisi terbesar kedua setelah Jawa Barat.



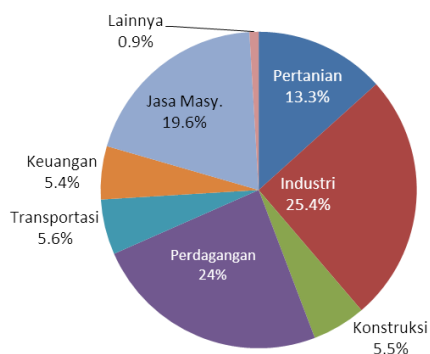
Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik VI.1. Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan



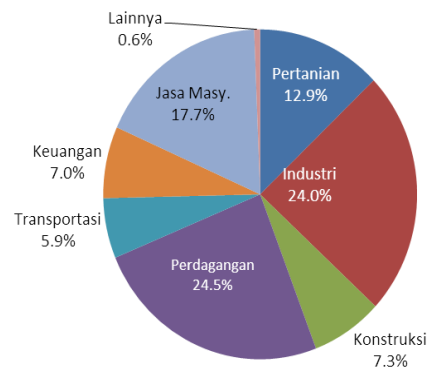
Sumber : BPS Provinsi Banten

Grafik. VI.2. Tingkat Pengangguran di Jawa



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik. VI.3. Pangsa Lapangan Pekerjaan Utama Posisi Februari 2015



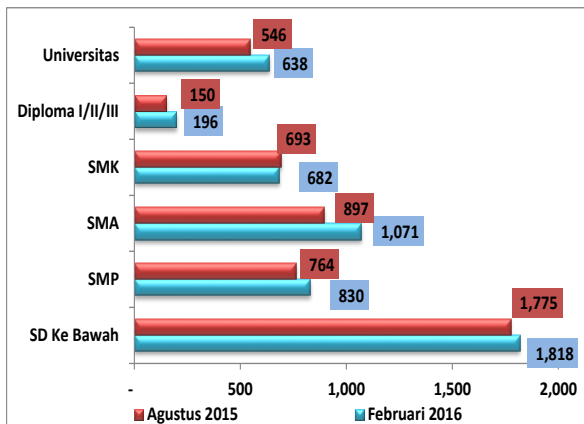
Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik. VI.4. Pangsa Lapangan Pekerjaan Utama Posisi Februari 2016

Dalam struktur perekonomian Banten, lapangan usaha industri pengolahan berkontribusi sebesar 33%. Pada triwulan I 2016, lapangan usaha industri pengolahan mengalami pertumbuhan 2,8% (yoy) lebih tinggi dari triwulan IV 2015 yang tumbuh 0,86% (yoy). Namun pertumbuhan industri pengolahan tidak disertai oleh meningkatnya jumlah penggunaan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terserap di industri pengolahan pada tahun 2016 sebanyak 1.257 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 4,9% dibandingkan posisi Februari 2015 yaitu sebanyak 1.322 ribu orang. Penurunan tersebut menyebabkan kontribusi industri pengolahan dalam penggunaan tenaga kerja menurun dari 25,4% menjadi 24%.

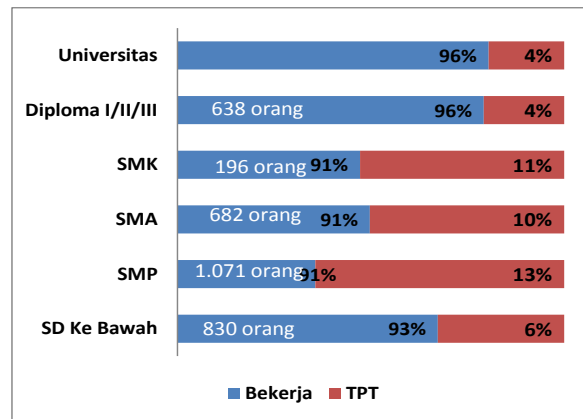
Sebaliknya penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha perdagangan meningkat dari 24% menjadi 24,5% jumlah tenaga kerja 1.283 ribu orang meningkat dari sebelumnya 1.259 ribu orang. Turunnya penggunaan tenaga kerja di industri pengolahan ditengarai disebabkan oleh adanya penutupan beberapa perusahaan di sektor industri pengolahan yang menyebabkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Total penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten pada Februari 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,5% dibandingkan Februari 2015, dari 5.208 ribu orang menjadi 5.234 ribu orang. Berdasarkan status formal pekerjaan, tenaga kerja yang bekerja di sektor formal memiliki pangsa lebih besar (59,71%) dibandingkan dengan pekerja informal (40,29%). Namun, jumlah pekerja yang terserap di sektor formal pada Februari 2016 mengalami penurunan 5,3% (yoy) sementara yang sektor non formal meningkat sebesar 10,53% (yoy). Berdasarkan latar belakang pendidikan, pekerja berpendidikan SD kebawah masih mendominasi dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 34,73% atau 1.818 ribu orang.



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik. VI.5. Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Sumber : BPS Provinsi Banten, diolah

Grafik. VI.6. Penduduk yang Bekerja dan TPT

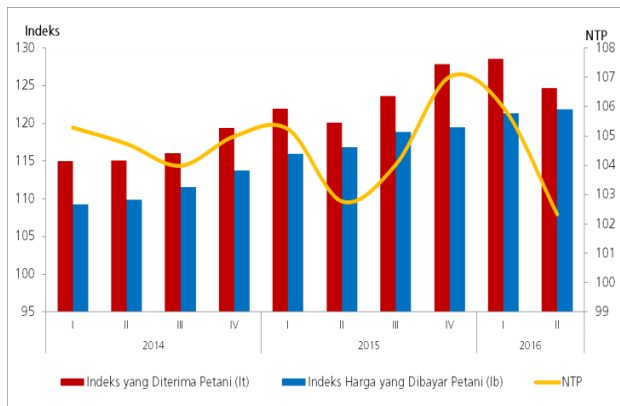
Beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten dalam rangka rencana percepatan pembangunan infrastruktur serta dengan masuknya 13 proyek strategis nasional, meningkatkan optimisme mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan yang diharapkan akan dapat menurunkan jumlah pengangguran di Banten. Selain itu, pembangunan lain yang sedang dilakukan yaitu pembentukan Kota Baru Maja yang didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga membangkitkan semangat munculnya kota pusat pertumbuhan baru di Provinsi Banten yang nantinya pasti akan membuka peluang pekerjaan ataupun usaha baru.

6.2. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

6.2.1. Nilai Tukar Petani

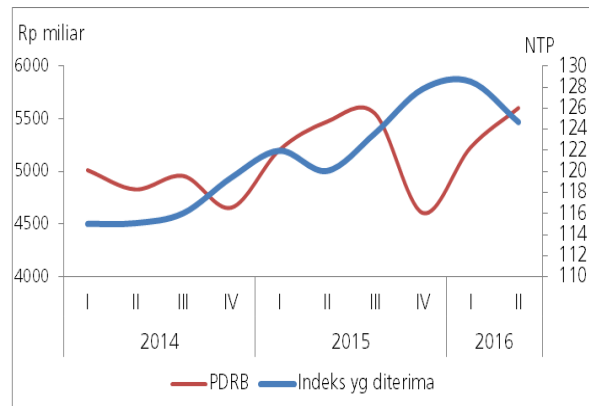
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan petani yang mencerminkan daya beli petani di pedesaan. Semakin tinggi NTP berarti bahwa kemampuan petani untuk membeli barang dan jasa yang dikonsumsi semakin menguat.

NTP di Provinsi Banten pada triwulan II 2016 mengalami penurunan sebesar 3,44% yaitu dari 105,97 di triwulan I 2016 menjadi 102,33. Penurunan NTP tersebut dipengaruhi oleh turunnya Indeks Harga yang diterima oleh petani sebesar 3%, sementara Indeks Harga yang dibayar Petani mengalami peningkatan sebesar 0,46%. Berdasarkan sub sektor, penurunan NTP didorong oleh turunnya NTP hampir seluruh sub sektor dibandingkan triwulan I 2016. Penurunan NTP terbesar terjadi di subsektor pangan yaitu sebesar 7,92%, diikuti oleh NTP Perkebunan Rakyat, NTP Peternakan, dan NTP Perikanan masing-masing sebesar 1,3%, 0,44%, dan 0,06%. Hortikultura menjadi satu-satunya subsektor yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,71%.



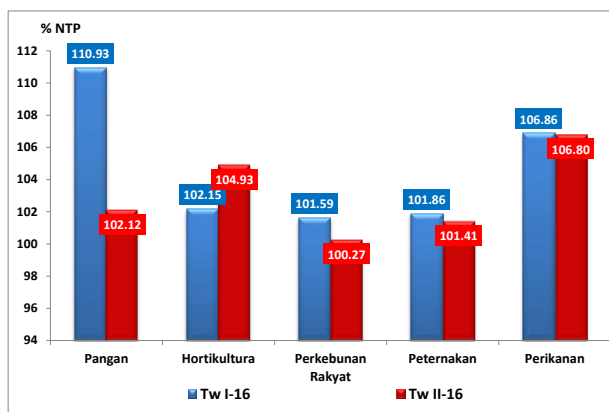
Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik VI.7. Nilai Tukar Petani



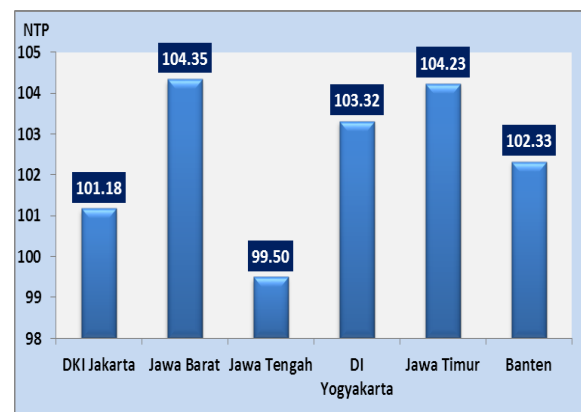
Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik VI.8. PDRB dan Indeks yang Diterima Petani



Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik VI.9. Nilai Tukar Petani Subkategori



Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik VI.10. NTP Provinsi di Pulau Jawa Triwulan II-2016

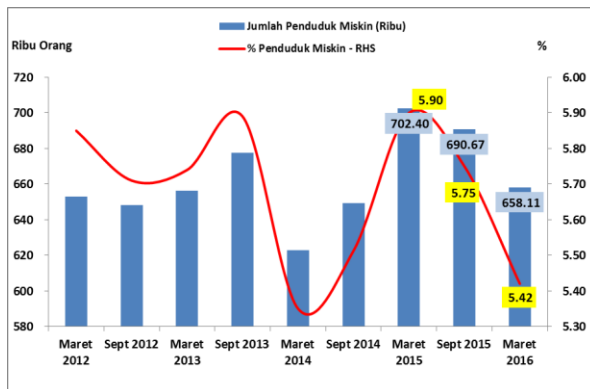
Penurunan NTP yang terjadi pada subsektor tanaman pangan cukup signifikan yaitu dari 110,93% menjadi 102,12, salah satunya disebabkan oleh turunnya harga yang diterima petani sebagaimana yang tercermin dari harga gabah. Rata-rata Gabah Kering Giling (GKG) dan Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,56% dan 19,9% dibandingkan rata-rata GKG dan GKP triwulan I 2016. Penurunan harga gabah tersebut diiringi oleh meningkatnya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani antara lain biaya upah butuh tani, pembelian pupuk dan obat-obatan.

Demikian juga yang terjadi pada subsektor pertanian rakyat, peternakan, dan perikanan, penurunan NTP terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan petani sementara biaya produksi mengalami peningkatan. Sementara itu peningkatan NTP pada subkategori hortikultura disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas seperti cengkeh.

Secara spasial, rata-rata NTP Banten pada triwulan II 2016 berada di posisi ke empat di bawah Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, namun lebih tinggi dari DKI Jakarta dan Jawa Tengah. NTP Banten juga lebih tinggi dari rata-rata NTP Nasional yaitu 101,41.

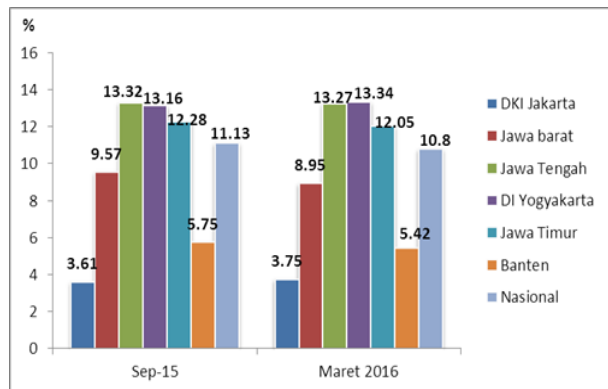
6.2.2. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin¹¹ di Provinsi Banten sejak Maret 2015 hingga posisi bulan Maret 2016 terus menunjukkan tren penurunan. Pada Maret 2016, dari sekitar 12,14 juta orang penduduk Banten, sejumlah 658,11 ribu orang merupakan penduduk miskin atau dengan persentase sebesar 5,42%. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 4,7% dibandingkan bulan September 2015 dengan jumlah 690,67 ribu orang dan persentase 5,75%, juga lebih rendah dari bulan Maret tahun 2015 dengan jumlah 702,4 ribu orang dengan persentase 5,9%.



Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik VI.11. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Banten



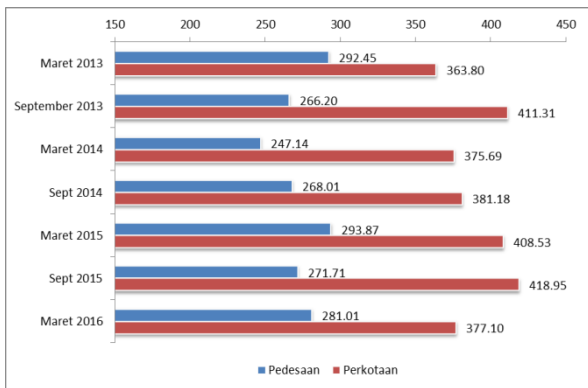
Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik VI.12. Persentase Kemiskinan per Provinsi di Pulau Jawa

Persentase penduduk miskin di Banten lebih rendah dari nasional yaitu 10,86%. Secara nasional, Banten termasuk dalam 5 besar Provinsi dengan angka kemiskinan terkecil setelah DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung. Di Pulau Jawa, posisi Banten berada di posisi kedua terkecil setelah DKI Jakarta dengan angka 3,75%.

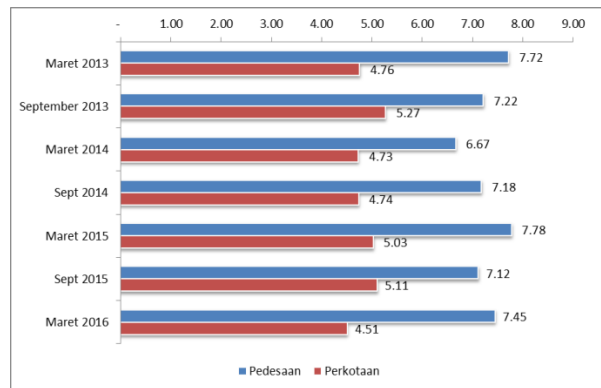
Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, penurunan angka kemiskinan didorong oleh turunnya jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 9,99% dari 418,95 ribu orang menjadi 377,1 ribu orang, atau dari 5,11% menjadi 4,51%. Sementara penduduk miskin di perdesaan justru mengalami peningkatan sebesar 3,42% dari 271,71 ribu orang menjadi 281,01 ribu orang, atau dari 7,12% naik menjadi 7,45%.

¹¹ Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan



Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik VI.13. Jumlah Penduduk Miskin Kota dan Desa

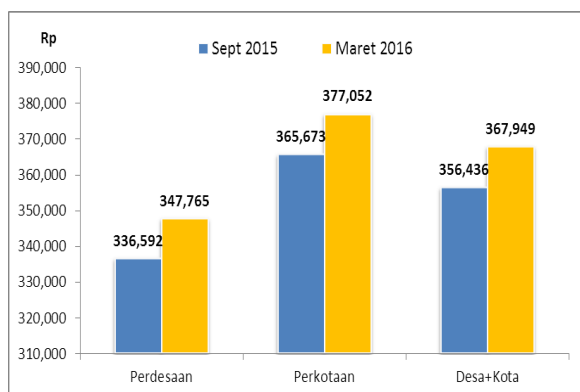


Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik VI.14. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Banten

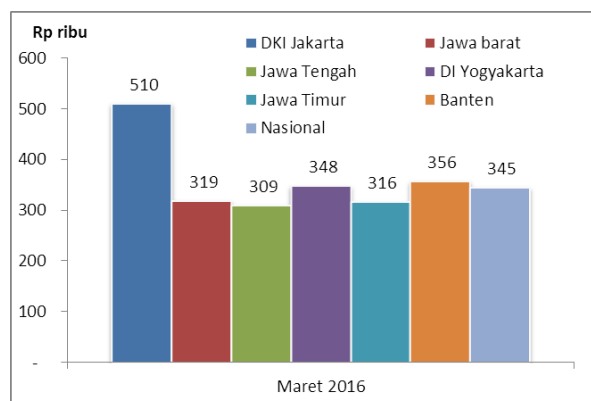
Menurunnya angka kemiskinan di Banten terutama di wilayah perkotaan disebabkan antara lain meningkatnya UMK (Upah Minimum Kota) yang berkisar 11,5% (yoy) pada awal tahun 2016. UMK di sentra industri seperti Kabupaten Tangerang, kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang berkisar Rp3 juta. Demikian juga dengan Kota Tangerang Selatan yang terletak berbatasan dengan Kota Jakarta. Sementara itu, UMK di Banten wilayah Selatan seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang hanya berkisar Rp1,9 juta.

Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan I 2016 yang mencapai 5,1% (yoy) dan disertai dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali juga mendorong membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat di Banten.



Sumber: BPS RI

Grafik VI.15. Perkembangan Garis Kemiskinan



Sumber: BPS RI

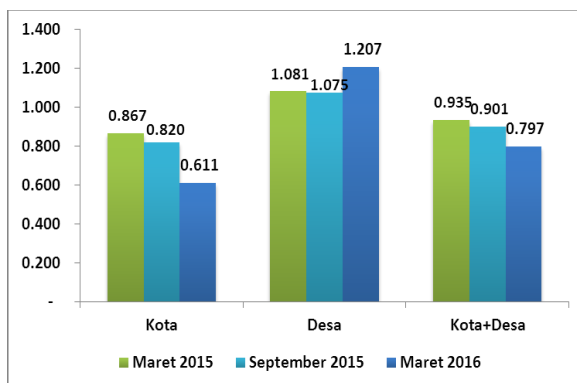
Grafik VI.16. Garis Kemiskinan Provinsi Di Jawa

Garis kemiskinan (GK) merupakan ukuran dalam mengelompokkan penduduk menjadi kategori miskin atau tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin jika rata-rata penghasilan perkapita perbulannya berada di bawah GK. Pada bulan Maret 2016, Garis Kemiskinan Provinsi Banten mengalami peningkatan sebesar 3,23% dibanding September 2015 dari Rp365.673/perkapita per bulan menjadi Rp367.949,-. Garis Kemiskinan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, keduanya mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,32% dan 3,11%

dibandingkan posisi September 2015. Garis kemiskinan Banten lebih tinggi dari nasional yaitu Rp354.386,-. Di bandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, garis kemiskinan di Banten berada di posisi kedua setelah DKI Jakarta.

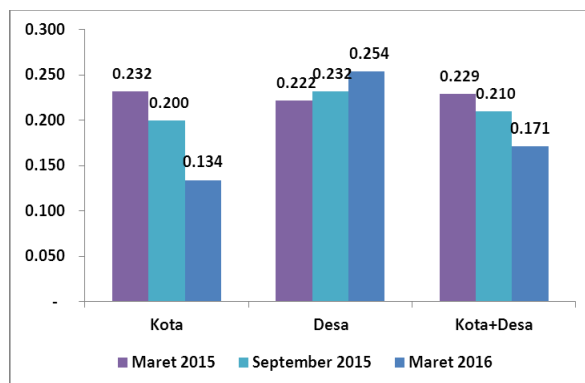
6.2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Banten pada posisi Maret 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi September. Indeks Kedalaman turun dari 0,901 menjadi 0,797, sedangkan Indeks Keparahan turun dari 0,254 menjadi 0,171. Penurunan kedua indeks tersebut mencerminkan adanya perbaikan pada kondisi masyarakat miskin di Banten dengan adanya peningkatan penghasilan mendekati Garis Kemiskinan. Penurunan kedua indeks tersebut juga mengisyaratkan semakin kecilnya ketimpangan penghasilan penduduk miskin.



Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik VI.17. Indeks Kedalaman Kemiskinan



Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik VI.18. Indeks Keparahan Kemiskinan

Berdasarkan wilayah, kedua indeks tersebut mengalami penurunan di perkotaan, sementara di perdesaan justru mengalami peningkatan. Hal tersebut menggambarkan bahwa kondisi masyarakat miskin di perkotaan mengalami perbaikan dibandingkan masyarakat miskin di perdesaan. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk miskin di perdesaan yang mengalami peningkatan sebesar 3,42% sementara di perkotaan mengalami penurunan.

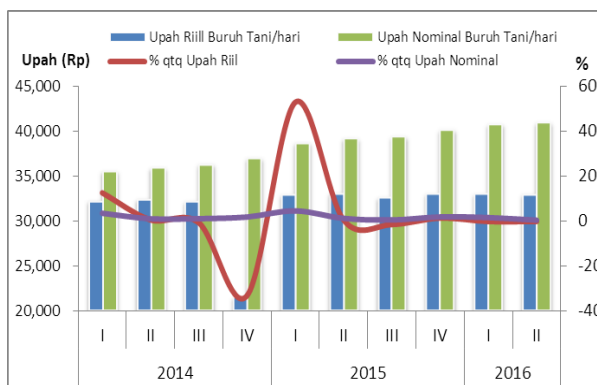
Fakta bahwa kesejahteraan masyarakat miskin di perdesaan yang semakin memburuk harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Berbagai kebijakan perekonomian diharapkan dapat diprioritaskan kepada masyarakat miskin yang mayoritas berprofesi sebagai petani atau nelayan.

6.2.4. Perkembangan Upah Buruh

Secara nominal, rata-rata upah buruh tani pada triwulan II 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,45% (qtq) yaitu menjadi Rp40.909/hari dari Rp40.727/hari pada triwulan I 2016. Namun upah riil buruh tani pada triwulan ini mengalami kondisi sebaliknya yaitu turun sebesar 0,11% (qtq) yaitu menjadi Rp32.936/hari dari Rp32.971/hari pada triwulan sebelumnya.

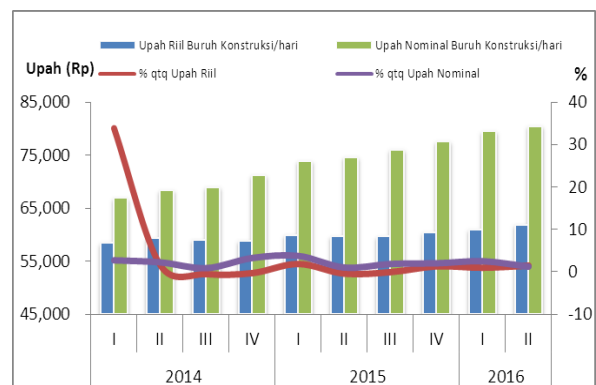
Sementara itu upah buruh konstruksi pada triwulan II 2016 baik secara nominal maupun riil menunjukkan kondisi membaik. Upah nominal meningkat sebesar 1,23% (qtq) dari Rp79.477/hari menjadi Rp80.451/hari. Upah riil tumbuh sebesar 1,47% (qtq) dari Rp60.976/hari menjadi Rp61.869/hari.

Demikian juga dengan upah pembantu rumah tangga juga mengalami peningkatan. Upah nominal meningkat sebesar 1,32% (qtq) dari Rp529.077/bulan menjadi Rp536.062/bulan. Adapun upah riil pembantu rumah tangga meningkat sebesar 1,56% (qtq) dari Rp405.915/bulan menjadi Rp412.245/bulan.



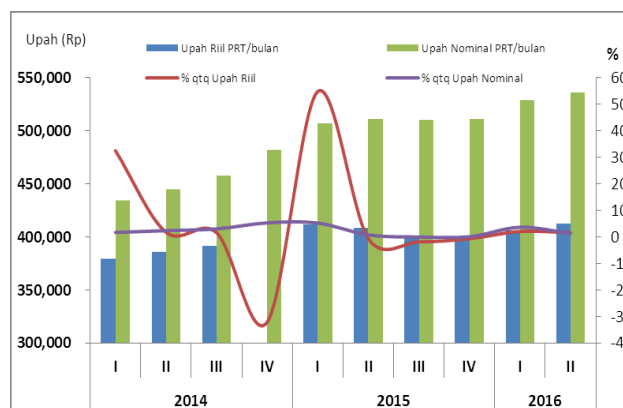
Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik V.18. Perkembangan Upah Buruh Tani



Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik V.20. Perkembangan Upah Buruh Konstruksi



Sumber: BPS Provinsi Banten

Grafik V.21. Perkembangan Upah Pembantu Rumah Tangga

BAB VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2016 diperkirakan tumbuh lebih tinggi di kisaran 5,5–5,8% (yoy). Di sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten didorong oleh konsumsi dan investasi yang meningkat sejalan dengan percepatan realisasi anggaran di sisi pengeluaran. Sementara itu di sisi penawaran, industri pengolahan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.

Secara keseluruhan, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten diperkirakan berada di kisaran 5,2 – 5,5% (yoy) dengan bias ke bawah. Relatif lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada semester I 2016, diharapkan dapat terdorong oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi pada semester II 2016.

Tingkat inflasi Banten triwulan IV 2016 diperkirakan terkendali di kisaran 3,0-3,3% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan III 2016. Seluruh komponen yaitu inflasi inti, administered prices dan volatile food diperkirakan akan mengalami inflasi seiring dengan peningkatan permintaan di akhir tahun.

7.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan IV 2016 diperkirakan terakselerasi meningkat sejalan dengan semakin kuatnya upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong komponen-komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kinerja perekonomian pada triwulan IV 2016 diperkirakan berada di kisaran 5,5% – 5,8% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2016. Dari sisi pengeluaran, tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada triwulan IV 2016 ditopang oleh konsumsi dan investasi. Sementara dari sisi penawaran, industri pengolahan dan konstruksi menjadi pendorong tingginya pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan IV 2016.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2016 tumbuh terbatas di kisaran 5,2% - 5,5% (yoy) dengan bias ke bawah. Kinerja perekonomian di semester I 2016 yang relatif lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2015 menyebabkan munculnya risiko perlambatan di tahun 2016. Meskipun demikian, dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan fiskalnya diharapkan perkembangan ekonomi pada semester II 2016 dapat tumbuh lebih tinggi dan mendorong perekonomian di akhir tahun.

VII.1. Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

Keterangan	2013	2014	2015					2016				
			I	II	III	IV	T	I	II	III ^p	IV ^p	T ^p
PDRB (yoy)	7.1	5.5	5.5	5.2	5.9	4.9	5.4	5.1	5.2	5.2 - 5.5	5.5 - 5.8	5.2 - 5.5

Sumber: BPS Provinsi Banten; p) = prakiraan Bank Indonesia

7.1.1. SISI PENGELUARAN

TRIWULAN IV 2016

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan IV 2016 diperkirakan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang kuat. Momentum Natal dan Tahun Baru diperkirakan dapat mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi. Berdasarkan survei konsumen, tercermin adanya peningkatan *consumer confidence* (keyakinan konsumen) pada 6 bulan mendatang yang didasari oleh meningkatnya ketiga komponen pembentuk *consumer confidence* yaitu optimisme terhadap penghasilan, lapangan pekerjaan dan kegiatan usaha.

Berbeda dengan konsumsi rumah tangga, naiknya konsumsi pemerintah merupakan bentuk percepatan realisasi anggaran di akhir tahun. Kondisi ini telah terjadi secara musiman dari tahun ke tahun yaitu realisasi belanja terbesar berada di triwulan IV. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Banten juga menjadi momentum pemerintah daerah dalam mendorong belanjanya guna persiapan menjelang Pilkada pada tahun 2017. Adapun konsumsi rumah tangga yang dikeluarkan dalam rangka Pilkada adalah belanja untuk atribut pendukung calon.

Investasi diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan akselerasi kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Investasi bangunan pemerintah pada triwulan IV 2016 diperkirakan masih mendominasi dengan adanya pembangunan proyek-proyek strategis pendukung infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan serta infrastruktur ketahanan pangan seperti waduk dan irigasi. Belanja modal diperkirakan akan mencapai puncaknya di akhir tahun dan mendorong realisasi investasi pemerintah.

Sementara itu, investasi swasta juga diperkirakan meningkat sejalan dengan kebijakan fiskal terkait insentif pajak yang mulai diberlakukan. Hal ini diperkirakan mendorong masuknya aliran investasi sejak triwulan III 2016. Terlebih lagi dengan dilaksanakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten melalui izin prinsip 3 jam, diperkirakan dapat menarik minat investor untuk masuk dan mengembangkan modalnya di Provinsi Banten.

Di sisi lain, ekspor Provinsi Banten pada triwulan IV 2016 diperkirakan meningkat sejalan dengan permintaan ekspor yang mencapai puncaknya untuk kebutuhan musiman di negara

tujuan. Berdasarkan hasil liaison, akan terjadi peningkatan permintaan di akhir tahun sebagai dampak dari terselenggaranya kompetisi olahraga internasional. Ekspor antar daerah juga diperkirakan meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan proyek yang berlangsung di sejumlah daerah.

Sementara itu, pada triwulan IV 2016 komponen impor diperkirakan akan terakselerasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku sebagai dampak dari membaiknya industri pengolahan. Impor modal juga diperkirakan akan mengalami peningkatan sejak triwulan III 2016. Hal tersebut berkaitan dengan investasi swasta yang meningkat baik bangunan maupun non bangunan. Selain itu, impor barang konsumsi juga mengalami peningkatan ditopang oleh kuatnya konsumsi di akhir tahun.

TAHUN 2016

Secara keseluruhan di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang didukung oleh terjaganya inflasi di level yang lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2015. Rendahnya angka inflasi yang diiringi oleh peningkatan pendapatan mendorong daya beli masyarakat mengalami kenaikan. Selain itu, optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian di tahun 2016 juga mendorong persepsi masyarakat untuk melakukan konsumsi.

Di sisi lain, investasi pemerintah diperkirakan tumbuh terbatas akibat belum optimalnya realisasi di semester I 2016. Meskipun demikian, pada semester II 2016 pemerintah masih berupaya untuk mendorong percepatan pembangunan proyek guna mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Begitu pula dengan investasi swasta yang pada semester I 2016 didominasi pembangunan *multiyears* dan investasi rutin, diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi pada semester II 2016.

Pada komponen ekspor, diperkirakan masih akan mengalami tekanan permintaan akibat belum pulihnya kondisi perekonomian global terutama negara utama tujuan ekspor. Selain itu, membanjirnya produk Tiongkok di pasar internasional juga menjadi tekanan pada produk dalam negeri dengan daya saing yang relatif rendah. Upaya diversifikasi pasar dan produk oleh pelaku usaha diharapkan terus dilakukan sehingga dapat mendorong kinerja ekspor Provinsi Banten. Secara umum di tengah melambatnya ekspor luar negeri, ekspor antar daerah masih menjadi penopang tumbuhnya ekspor di Provinsi Banten.

Sementara itu, komponen impor diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Hal ini merupakan dampak dari industri hulu di Provinsi Banten yang pada tahun 2016 telah melakukan penambahan kapasitas produksi bahan baku. Karakteristik impor di Provinsi Banten yang didominasi oleh impor bahan baku pada tahun 2016 mulai menunjukkan adanya

penurunan paska beroperasinya pabrik penghasil bahan baku. Impor barang konsumsi juga mengalami perlambatan yang utamanya disebabkan oleh lemahnya nilai tukar pada semester I 2016.

7.1.2. SISI PENAWARAN

TRIWULAN IV 2016

Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten triwulan IV 2016 masih ditopang oleh lapangan usaha industri pengolahan sebagai kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya permintaan baik domestik maupun luar negeri mendorong kinerja industri pengolahan tumbuh lebih tinggi. Kondisi ini secara langsung akan mendorong kinerja perdagangan di triwulan IV 2016. Persiapan menjelang Pilkada juga mendorong permintaan industri pengolahan khususnya pada komoditas pakaian jadi dan kertas.

Perkembangan kinerja lapangan usaha konstruksi pada triwulan IV 2016 juga diperkirakan meningkat dan mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi. Akselerasi pembangunan proyek di akhir tahun seiring dengan percepatan realisasi anggaran menjadi pendorong tingginya kinerja lapangan usaha konstruksi di triwulan IV 2016. Perkembangan investasi swasta juga berpotensi meningkat baik realisasi pembangunan proyek baru maupun proyek yang sedang berjalan.

Lapangan usaha *real estate* yang merupakan salah satu kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten juga diperkirakan tumbuh lebih kuat pada triwulan IV 2016. Hal ini merupakan dampak positif dari stimulus yang dilakukan pemerintah dalam mendorong masuknya investasi. Berdasarkan hasil liaison di lapangan usaha *real estate*, para pelaku usaha optimis akan terjadi perbaikan yang dimulai pada triwulan III 2016.

TAHUN 2016

Secara umum, perkembangan kinerja ekonomi pada tahun 2016 berdasarkan lapangan usaha masih didominasi oleh industri pengolahan. Meskipun demikian, kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh terbatas atau relatif bias kebawah terhadap proyeksi. Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada semester I 2016 yang tumbuh lebih rendah menahan pertumbuhan lapangan usaha secara keseluruhan. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan diversifikasi pasar dan produk oleh pelaku usaha sehingga perlambatan yang terjadi pada permintaan di negara tujuan utama dapat diminimalisir.

Kinerja lapangan usaha konstruksi diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha konstruksi pada tahun 2015 menyebabkan *base effect* pada kinerja lapangan usaha konstruksi tahun 2016. Realisasi pembangunan proyek

pemerintah yang belum optimal pada awal tahun menyebabkan munculnya risiko tertahannya kinerja lapangan usaha konstruksi. Terlebih lagi investasi swasta hingga pertengahan tahun lebih didominasi oleh investasi rutin berupa perawatan mesin.

Adapun lapangan usaha yang berpotensi tumbuh lebih kuat pada tahun 2016 diantaranya *real estate*. Tumbuhnya lapangan usaha *real estate* di tengah perlambatan yang terjadi secara nasional, merupakan dampak dari upaya pelaku usaha dalam menghasilkan diversifikasi produk agar dapat mendorong kinerja penjualan. Kebijakan fiskal untuk menstimulus investasi yang direalisasikan pada semester II 2016, juga berpotensi mendorong tumbuhnya kinerja lapangan usaha khususnya *real estate*. Begitu pula dengan kebijakan makroprudensial terkait kelonggaran pembiayaan di sektor properti juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya lapangan usaha *real estate*.

7.2. INFLASI

Tingkat inflasi pada triwulan IV 2016 diperkirakan di kisaran 3,0 – 3,3% (yoy) relatif meningkat dibandingkan triwulan III 2016. Seluruh komponen yaitu inti, *administered prices* dan *volatile food* diperkirakan akan mengalami inflasi seiring dengan peningkatan permintaan di akhir tahun.

. VII.2. Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Banten

Keterangan	2013	2014	2015					2016				
			I	II	III	IV	T	I	II	III ^p	IV ^p	T ^p
Inflasi (yoy)	9.7	10.2	7.5	8.9	8.1	4.3	4.3	5.7	3.8	2.8 – 3.1	3.0 – 3.3	3.0 – 3.3

Sumber: BPS Provinsi Banten; p) = prakiraan Bank Indonesia

Beberapa hal yang menjadi asumsi proyeksi inflasi pada triwulan IV 2016 antara lain sebagai berikut:

7.2.1. Komponen *Volatile Food*

Perkembangan harga pada komponen *volatile food* di triwulan IV 2016 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2016 didorong oleh peningkatan permintaan bahan makanan dan berkurangnya pasokan bahan makanan pada akhir tahun. Musim panen raya padi dan tanaman hortikultura diperkirakan akan terjadi pada awal triwulan IV 2016. Berdasarkan hasil liaison ke beberapa kelompok tani, produksi tanaman hortikultura di tahun 2016 cenderung berkurang karena peningkatan curah hujan sehingga menyebabkan penyakit tanaman dan panen dini.

Berdasarkan informasi dari Stasiun Klimatologi (Staklim) Pondok Betung diketahui bahwa peningkatan curah hujan ini dimulai pada triwulan II 2016 dan akan masih berlanjut hingga

akhir tahun 2016. Hal ini menyebabkan musim kemarau cenderung berlangsung singkat karena fenomena La Nina. Hujan diprediksi akan bersifat di atas normal dibandingkan historis sifat hujan pada periode tersebut. Harga daging dan telur ayam ras juga diperkirakan meningkat dengan pembatasan impor bahan pakan ternak yang selama ini menjadi salah satu komponen biaya terbesar. Pasokan *Days Old Chicken* (DOC) diprakirakan stabil memperhitungkan tingkat konsumsi masyarakat sehingga tidak kembali terjadi fluktuasi yang ekstrim seperti tahun lalu. Antisipasi lonjakan permintaan daging menjelang juga direspon oleh pemerintah dengan membuka impor untuk daging sapi.

7.2.2. Komponen *Administered Prices*

Tekanan inflasi pada *administered prices* pada triwulan IV 2016 relatif meningkat dibandingkan triwulan III 2016. Tekanan inflasi berasal dari kenaikan progresif cukai rokok, tarif listrik sesuai harga keekonomiannya dan tarif angkutan. Pergerakan harga minyak bumi (*Indonesia Crude Price*)¹² sebagai standar penentuan harga ekonomis bensin, pertamax dan tarif listrik diprediksi akan mengalami apresiasi sampai dengan triwulan IV 2016. Prediksi apresiasi harga minyak bumi yang mengalami peningkatan di triwulan IV 2016 juga akan mempengaruhi harga komoditas angkutan darat dan angkutan luar kota. *Peak season* libur akhir tahun mendorong peningkatan permintaan angkutan luar kota dan angkutan udara sehingga mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016. Selain itu, peningkatan tarif listrik 900 VA direncanakan akan terjadi pada Agustus, Oktober dan Desember 2016. Selanjutnya, inflasi rokok juga masih akan tetap memberikan sumbangan inflasi di Provinsi Banten.

7.2.3. Komponen Inti

Inflasi yang terjadi pada komponen inti diprakirakan meningkat pada triwulan IV 2016 yang disebabkan antara lain meningkatnya konsumsi masyarakat pada musim libur akhir tahun. Meskipun demikian, tingkat harga barang tahan lama seperti peralatan rumah tangga dan elektronik diprediksi masih akan relatif stabil dibandingkan triwulan III 2016. Selain itu, ekspektasi inflasi masyarakat juga cenderung meningkat pada akhir tahun. Di sisi lain, nilai tukar rupiah berisiko melemah terhadap mata uang asing karena peningkatan suku bunga acuan *Fed Fund Rate* (FFR) di Amerika Serikat pada akhir tahun 2016. Akibatnya, kondisi ini akan mendorong peningkatan harga barang-barang yang berkaitan dengan impor. Di sisi lain, dengan penguatan nilai tukar AS Dolar maka harga komoditas emas perhiasan yang mengikuti harga komoditas emas global akan cenderung melemah di akhir tahun 2016.

¹² Selain nilai tukar dan tingkat inflasi

DAFTAR ISTILAH

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
Belanja Bagi Hasil	Anggaran belanja yang dialokasikan sebagai dana bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja Bantuan Sosial	Anggaran belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Belanja Hibah	Anggaran belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Belanja Langsung	Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Tidak Langsung	Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
BI-RTGS (Real Time Gross Settlement)	Penyelesaian kewajiban bayar-membayar (<i>settlement</i>) yang dilakukan secara <i>on-line</i> atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana
CDD (Customer Due Diligence)	Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna.

Dana Alokasi Khusus	Dana alokasi dari APBN dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Dana Alokasi Umum	Dana alokasi dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang penggunaannya ditetapkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah (block grant) berdasarkan Peraturan Presiden
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Dana otonomi khusus adalah dana yang diberikan untuk daerah otonomi khusus yaitu Provinsi Papua dan Aceh. Sedangkan Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.
Dana Perimbangan	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No.55 Tahun 2005.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka.
Disagregasi inflasi	Pengelompokkan inflasi ke tiga komponen yaitu Volatile Foods, Administered Price, dan Core.
EDD (Enhanced Due Diligence)	Kegiatan CDD yang lebih mendalam pada saat melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada nasabah yang yang tergolong berisiko tinggi termasuk <i>politically exposed persons</i> , terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme
Ekspor Impor	Perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar daerah

Garis Kemiskinan	Batas pengeluaran kebutuhan pengeluaran minimum
Indeks Ekspektasi Konsumen	Komponen pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, skala 1-100
Indeks Keyakinan Konsumen	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, skala 1-100
Indeks Kondisi Ekonomi	Komponen pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, skala 1-100
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
Inflasi Administered	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan Harga Pemerintah, seperti Harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif price angkutan, dll.
Inflasi Core (inti)	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran; lingkungan eksternal: nilai tukar, Harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang; atau ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen.
Inflasi Volatile foods	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan
Kliring	Penyelesaian utang piutang antar bank-bank peserta kliring yang berbentuk surat-surat berHarga
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka

	waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk
Kredit Investasi	Kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka reHabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari Hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai
Kredit Konsumsi	Pemberian fasilitas kredit dari pihak bank ke konsumen yang digunakan untuk pembelian barang berupa rumah/kendaraan yang digunakan secara langsung oleh konsumen
Kredit Modal Kerja	Fasilitas kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun namun dapat diperpanjang
KUPVA BB (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank)	Kegiatan jual dan beli uang kertas asing serta pembelian cek pelawat (<i>traveller's cheque</i>).
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi FDR digunakan untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.
mtm	Month to Month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Nilai Tukar Petani	Indikator kesejahteraan petani yang membandingkan antara indeks Harga yang diterima petani terhadap indeks Harga yang dibayar petani

Non Performing Loan (NPL)	Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Kriteria NPL adalah (1) kurang lancar, (2) diragukan, dan (3) macet
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi atau biasa disebut investasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas ekonomi suatu daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, retribusi daerah, Hasil Iperusahaan milik daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah
Rasio Gini	Koefisien yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan di suatu daerah
Sektor Utama	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Sisa anggaran tahun lalu yang digunakan sebagai komponen pembiayaan APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Perbandingan jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15-64 tahun)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Perbandingan jumlah pengangguran dengan penduduk angkatan kerja
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)	Upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Warkat Kliring	Alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring, terdiri atas cek, biyet giro, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota (iriman uang), wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, nota debit atau kredit dan jenis-jenis warkat lain yang telah disetujui penyelenggara
yoy	Year on Year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya

